



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021



H. ANDI IBRAHIM MASDAR
Bupati Polewali Mandar

H.M.NATSIR RAHMAT
Wakil Bupati Polewali Mandar



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Polewali, 30 Maret 2022
INSPEKTUR KABUPATEN,



H. Ahmad Saifuddin, SH,MM.
NIP.19651231 200003 1 084

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa tercurahkan kehadirat ALLAH SWT. *Rabbul 'Alamin*, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun mengenai teknis penyusunan LPPD tersebut yang sesuai dengan amanat pasal 74 Undang-Undang 23 Tahun 2014 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat pada dasarnya memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan sepanjang tahun 2021. Dimana dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, LPPD juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021.

Dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2021, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Saran, pendapat, maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap semoga segala upaya yang kita lakukan dalam membangun Kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten yang MARASA (Maju Rakyat Sejahtera) dapat terwujud dan bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT. Aamiin.

Polewali Mandar, Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.1.1. Penjelasan Umum	2
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	16
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	55
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	60
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	61
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	61
2.1.2. Angka Kemiskinan	62
2.1.3. Angka Pengangguran	62
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	63
2.1.5. Pendapatan Per Kapita	64
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan	64
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	65
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	65
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	65
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	65
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	65
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	66
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	68
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	75
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	94
2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	98
2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	101
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	131
3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN	133
3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN	135
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	142
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	143
4.2. URUSAN KESEHATAN	148
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM	155
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	158
4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	161
4.6. URUSAN SOSIAL	168

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Indikator Kinerja Kunci Keluaran / *Output*
- Lampiran 2 : Indikator Kinerja Kunci Hasil / *Outcome*
- Lampiran 3 : Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	4
Tabel 1.2.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	6
Tabel 1.3.	Letak Astronomis dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar.....	6
Tabel 1.4.	Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar.....	7
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk per-Kecamatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2021	7
Tabel 1.6.	Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	8
Tabel 1.7.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	8
Tabel 1.8.	Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	9
Tabel 1.9.	Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.....	12
Tabel 1.10.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020.....	14
Tabel 1.11.	Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.....	20
Tabel 1.12.	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024	21
Tabel 1.13.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2019-2024.....	22
Tabel 1.14.	Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024	24
Tabel 1.15.	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	30
Tabel 1.16.	Program Prioritas Kabupaten Polewali Mandar yang Mendukung Prioritas Nasional, Tahun 2021	31
Tabel 1.17.	Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Sasaran Pembangunan Kab. Polewali Mandar.....	35
Tabel 1.18.	Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran, & Program Prioritas Tahun 2021	38
Tabel 1.19.	Program Kegiatan yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM 2021 ...	58
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Polewali Mandar 2020-2021	61
Tabel 2.2.	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	61
Tabel 2.3.	Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.....	62
Tabel 2.4.	Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	62
Tabel 2.5.	Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.....	63
Tabel 2.6.	Statistik Kunci Bidang Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar 2019-2021	64
Tabel 2.7.	Gini Rasio Kabupaten di Sulawesi Barat 2019-2027	64
Tabel 2.8.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	66
Tabel 2.9.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .	69
Tabel 2.10.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	72
Tabel 2.11.	Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021	90
Tabel 2.12.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	95

Tabel 2.13.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	101
Tabel 2.14.	Program Kegiatan Sasaran strategis berkurangnya pengangguran.....	103
Tabel 2.15.	Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan	104
Tabel 2.16.	Program Kegiatan Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal .	105
Tabel 2.17.	Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan	106
Tabel 2.18.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan	107
Tabel 2.19.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.....	112
Tabel 2.20.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	113
Tabel 2.21.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	115
Tabel 2.22.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Investasi Daerah.....	116
Tabel 2.23.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan.....	116
Tabel 2.24.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi.....	120
Tabel 2.25.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.....	122
Tabel 2.26.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi	122
Tabel 2.27.	Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pemukiman	123
Tabel 2.28.	Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	125
Tabel 2.29.	Program Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan .	126
Tabel 3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2021	137
Tabel 3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2021	139
Tabel 4.1.	Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	143
Tabel 4.2.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	143
Tabel 4.3.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	144
Tabel 4.4.	Dukungan Personil atau Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021	144
Tabel 4.5.	Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	145
Tabel 4.6.	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	149
Tabel 4.7.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	150
Tabel 4.8.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	151
Tabel 4.9.	Jumlah Personil / Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan, Instansi/Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2021	152
Tabel 4.10.	Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	154
Tabel 4.11.	Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	156
Tabel 4.12.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	156
Tabel 4.13.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	156
Tabel 4.14.	Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	158
Tabel 4.15.	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021.....	159
Tabel 4.16.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	159
Tabel 4.17.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	160
Tabel 4.18.	Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	161

Tabel 4.19.	Target Capaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021	162
Tabel 4.20.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021	162
Tabel 4.21.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021	163
Tabel 4.22.	Program & Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (Satpol PP) Tahun 2021 ..	166
Tabel 4.23.	Program & Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (BPBD) Tahun 2021	167
Tabel 4.24.	Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021	168
Tabel 4.25.	Realisasi Peencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021.....	169
Tabel 4.26.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021	170
Tabel 4.27.	Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial Tahun 2021	171

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

- Gambar 1.1. Persentase Luas Daerah Kabupaten Polewali Mandar per Kecamatan 5
Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar 5

CHART

- Chart 2.1. Trend Angka Kemiskinan Tahun 2013-2021..... 76
Chart 2.2. Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2013 - 2021 77
Chart 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2021 77
Chart 2.4. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2021 78
Chart 2.5. Capaian Kinerja Pengeluaran konsumsi Rata-rata Perkapita
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021 79
Chart 2.6. Perkembangan status Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2021 79
Chart 2.7. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2013-2021 80
Chart 2.8. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2014-2021 81
Chart 2.9. Angka Harapan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 - 2021 81
Chart 2.10. Trend Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2013-2021 82
Chart 2.11. Trend Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2018-2021 82
Chart 2.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021 83
Chart 2.13. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2021 84
Chart 2.14. Trend Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2017-2021 84
Chart 2.15. Trend Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2016-2021 85
Chart 2.16. Trend Pertumbuhan Investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2021.. 86
Chart 2.17. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 86
Chart 2.18. Trend Perkembangan Indeks Infrastruktur dan Persentase Fasilitas Layanan
RT di Kabupaten Polewali Mandar 2016-2021 87
Chart 2.19. Trend Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2017-2021 88
Chart 2.20. Trend Perkembangan Panjang Jalandalam Kondisi Mantap Tahun 2014-2020.. 88
Chart 2.21. Rasio Irigasi dalam kondisi baik terhadap Total Jaringan Irigasi 2021 89
Chart 2.22. Trend Perkembangan Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2019-2021 90
Chart 2.23. RTH Tahun 2021 91
Chart 2.24. Capaian Kinerja SAKIP Tahun 2015-2020..... 91
Chart 2.25. Trend Capaian Predikat Kinerja SAKIP Tahun 2015-2020 92
Chart 2.26. Indeks SPBE 2021 93
Chart 2.27. Hasil Survey Kepatuhan Atas Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Sulbar ... 93
Chart 2.28. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 94



**BAB
I**

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”. Pasal 72 menyatakan bahwa “Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Titik awal pembentukan Kabupaten polewali Mandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi, kemudian sebagai konsekuensi terbentuknya Kabupaten Mamasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa Berubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, maka 5 (lima) Kabupaten yang semula berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terpisah dari provinsi induk, selanjutnya masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk memberikan dasar kebijakan yang jelas, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 ini mengacu dan berpedoman pada Landasan Hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar



- Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 18) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 4);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
 - 20) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 No. 3);
 - 22) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 26).

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa dirubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006, setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah darat $\pm 2.022,30$ Km² dan luas wilayah laut ± 460 Km², serta panjang garis pantai $\pm 94,12$ Km². Kabupaten Polewali Mandar secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah $\pm 356,95$ Km² atau sekitar 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas $\pm 21,34$ Km² atau hanya 1,06 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.

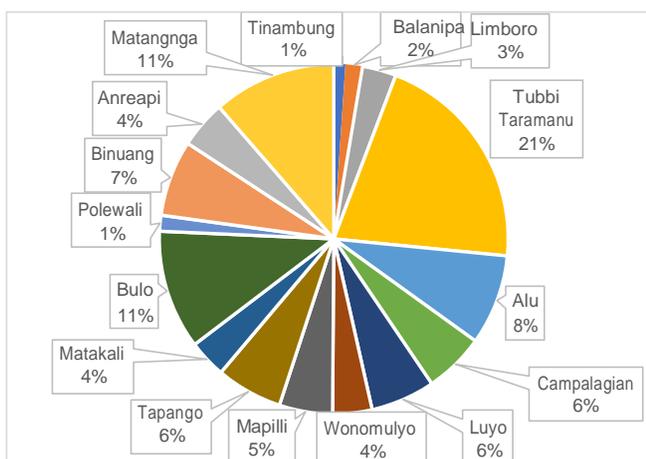
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	
		Luas Areal (Km ²)	Persentase (%)
1.	Tinambung	22,02	1,06
2.	Balanipa	33,03	1,59
3.	Limboro	65,06	3,14
4.	Tubbi Taramanu	430,56	20,75
5.	Allu	173,63	8,37
6.	Campalagian	116,01	5,59
7.	Luyo	123,71	5,96
8.	Wonomulyo	75,56	3,64
9.	Mapilli	102,53	4,94
10.	Tapango	127,50	6,15
11.	Matakali	72,70	3,50

12.	Polewali	30,36	1,46
13.	Binuang	145,82	7,03
14.	Anreapi	91,09	4,39
15.	Matangnga	236,8	11,41
16.	Bulo	228,38	11,01
JUMLAH		2.074,76	100,00

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

Gambar 1.1.
Persentase Luas Daerah Kabupaten Polewali Mandar per Kecamatan

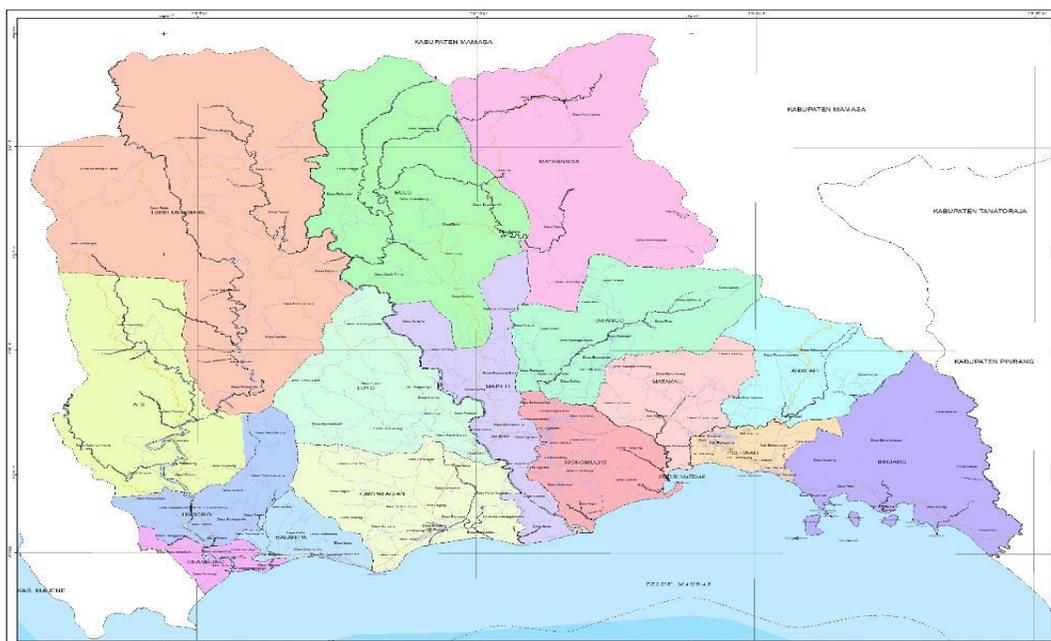


Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Majene
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pinrang (Provinsi Sulawesi Selatan)

Gambar 1.2.
Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar



Sumber : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.



Selama tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 196,6 hari hujan dengan curah hujan sebesar 2.526,8 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November dengan jumlah hari hujan 21 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 325,3 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan April dengan jumlah hari hujan 11 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebanyak 92 mm.

Tabel 1.2.
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	221,7	18,9
2	Februari	122,5	13,7
3	Maret	173,0	18,3
4	April	109,3	11,3
5	Mei	143,8	15,3
6	Juni	186,6	15,9
7	Juli	92,6	12,0
8	Agustus	306,4	17,3
9	September	222,4	16,2
10	Oktober	305,3	19,4
11	November	317,9	21,8
12	Desember	325,3	16,7
	TOTAL	2.526,8	196,6

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

Kabupaten Polewali Mandar secara astronomis terletak pada posisi $3^{\circ} 4' 7,83'' - 3^{\circ} 32' 3,79''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} 53' 57,55'' - 119^{\circ} 29' 33,31''$ Bujur Timur Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya, letak astronomis per kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.
Letak Astronomis dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan
Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Letak Astronomis		Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
		Lintang Selatan	Bujur Timur	
1	Tinambung	03° 30' 10,3"	119° 01' 36,6"	25
2	Balanipa	03° 30' 08,9"	119° 02' 48,0"	25
3	Limboro	03° 29' 12,6"	119° 00' 38,7"	25
4	Tubbi Taramanu	03° 20' 34,6"	119° 01' 33,1"	100
5	Alu	03° 25' 36,6"	118° 59' 34,0"	50
6	Campalagian	03° 28' 13,2"	119° 08' 26,0"	12
7	Luyo	03° 22' 24,8"	119° 08' 09,2"	25
8	Wonomulyo	03° 23' 51,0"	119° 12' 36,4"	13
9	Mapilli	03° 24' 14,8"	119° 10' 52,3"	18
10	Tapango	03° 19' 18,2"	119° 14' 54,2"	50
11	Matakali	03° 23' 00,1"	119° 16' 59,3"	12
12	Polewali	03° 24' 27,2"	119° 18' 33,5"	13
13	Binuang	03° 26' 53,8"	119° 24' 09,6"	25



14	Anreapi	03° 23' 01,3"	119° 21' 04,7"	50
15	Matangnga	03° 07' 41,4"	119° 13' 03,6"	295
16	Bulo	03° 13' 50,1"	119° 09' 06,6"	485

Sumber : Hasil Survei Balitbangren dan Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

Uraian tentang topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar menggambarkan secara rinci tentang bentuk permukaan bumi Kabupaten Polewali Mandar, secara topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar atau 15-40 persen dari luas wilayah memiliki topografi berbukit, >40 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar <2 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 41-60 persen dan >60 persen (>78 persen dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar perlu dilaksanakan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. Kondisi topografi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4.

Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar

No.	Topografi	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Datar	0 – 2	38.200	18,50
2	Landai	2 – 8	662	0,32
3	Bergelombang	9 – 15	3.120	1,51
4	Berbukit	16 – 25	1.897	0,92
5	Bergunung	41 – 60	100.010	48,42

Sumber Data : RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 mencapai 483.920 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tersebut didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 243.060 jiwa atau 50,23 % sedangkan laki-laki sebanyak 240.860 jiwa atau 49,77 %. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Polewali sebanyak 66.483 jiwa atau 13,74 % kemudian Kecamatan Campalagian sebanyak 64.709 jiwa atau 13,37 %. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yaitu sebanyak 5.879 jiwa atau 1,21 %.

Tabel 1.5.

Jumlah Penduduk per-Kecamatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)	%
Tinambung	12.120	5,03	12.914	5,31	25.034	5,17
Campalagian	32.030	13,30	32.679	13,44	64.709	13,37
Wonomulyo	25.485	10,58	26.131	10,75	51.616	10,67
Polewali	33.015	13,71	33.468	13,77	66.483	13,74
Tutar	11.868	4,93	11.556	4,75	23.424	4,84
Binuang	20.219	8,39	19.792	8,14	40.011	8,27



Tapango	13.097	5,44	12.864	5,29	25.961	5,36
Mapilli	16.939	7,03	17.036	7,01	33.975	7,02
Matangnga	3.033	1,26	2.846	1,17	5.879	1,21
Luyo	16.550	6,87	16.621	6,84	33.171	6,85
Limboro	9.452	3,92	10.010	4,12	19.462	4,02
Balanipa	14.609	6,07	14.842	6,11	29.451	6,09
Anreapi	5.742	2,38	5.564	2,29	11.306	2,34
Matakali	13.948	5,79	14.046	5,78	27.994	5,78
Allu	7.401	3,07	7.468	3,07	14.869	3,07
Bulo	5.352	2,22	5.223	2,15	10.575	2,19
TOTAL	240.860	49,77	243.060	50,23	483.920	100

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022.

Sedangkan proporsi penduduk Kabupaten Polewali Mandar menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 45.410 jiwa, kemudian kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 44.801 jiwa. Adapun kelompok umur dengan jumlah yang paling sedikit adalah umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 8.166 jiwa.

Tabel 1.6.
Jumlah Penduduk Kab. Polewali Mandar menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	22.520	22.281	44.801
5-9	22.150	22.177	44.327
10-14	23.368	22.042	45.410
15-19	21.986	20.576	42.562
20-24	21.049	19.931	40.980
25-29	21.468	20.373	41.841
30-34	19.285	18.656	37.941
35-39	17.231	17.139	34.370
40-44	15.785	16.133	31.918
45-49	14.339	15.140	29.479
50-54	12.270	13.044	25.314
55-59	9.995	10.948	20.943
60-64	7.128	8.346	15.474
65-69	5.095	6.357	11.452
70-74	3.514	4.652	8.166
75+	3.677	5.265	8.942
Jumlah	240.860	243.060	483.920

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022.



Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Polewali Mandar mencapai 233,24 jiwa/km² pada tahun 2021. Kecamatan Polewali mencatat tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 2.189,82 jiwa/km², disusul Kecamatan Tinambung yaitu 1.136,88 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Matangnga yaitu 24,83 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk / Population		Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
		(km ²)	%	Jumlah Total (jiwa)	%	
1	Tinambung	22,02	1,06	25.034	5,17	1.136,88
2	Balanipa	33,03	1,85	29.451	6,09	891,64
3	Limboro	65,06	2,35	19.462	4,02	299,14
4	Tubbi Taramanu	430,56	17,65	23.424	4,84	54,40
5	Allu	173,63	11,29	14.869	3,07	85,64
6	Campalagian	116,01	4,34	64.709	13,37	557,79
7	Luyo	123,71	7,74	33.171	6,85	268,14
8	Wonomulyo	75,56	3,60	51.616	10,67	683,11
9	Mapilli	102,53	4,54	33.975	7,02	331,37
10	Tapango	127,50	6,22	25.961	5,36	203,62
11	Matakali	72,70	2,85	27.994	5,78	385,06
12	Polewali	30,36	11,33	66.483	13,74	2.189,82
13	Binuang	145,82	1,30	40.011	8,27	274,39
14	Anreapi	91,09	6,10	11.306	2,34	124,12
15	Matangnga	236,8	6,16	5.879	1,21	24,83
16	Bulo	228,38	11,62	10.575	2,19	46,30
Polewali Mandar		2.074,76	100	483.920	100	233,24

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Masing-masing camat merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Tingkatan di bawah kecamatan adalah Kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa. Berikut daftar kecamatan, kelurahan dan desa :

Tabel 1.8.
Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
1	BINUANG	1	Kel. Amassangan	6	Mirring
		2	Kaleok	7	Tonyaman
		3	Kuajang	8	Paku
		4	Amola	9	Mammi
		5	Battetangnga	10	Rea



2	POLEWALI	1	Kel. Polewali	6	Kel. Pekkabata
		2	Kel. Wattang	7	Kel. Madatte
		3	Kel. Lantora	8	Kel. Manding
		4	Kel. Sulewatang	9	Kel. Darma
		5	Kel. Takatidung		
3	ANREAPI	1	Kel. Anreapi		
		2	Kelapa Dua		
		3	Pappandangan		
		4	Kunyi		
		5	Duampanua		
4	MATAKALI	1	Kel. Matakali	5	Bunga-Bunga
		2	Tonrolima	6	Patampanua
		3	Pasiang	7	Indu Makkombong
		4	Barumbung		
5	WONOMULYO	1	Kel. Sidodadi	8	Kebunsari
		2	Sugihwaras	9	Banua Baru
		3	Sidorejo	10	Campurjo
		4	Arjosari	11	Bakka-Bakka
		5	Bumimulyo	12	Nepo
		6	Bumiayu	13	Galeso
		7	Tumpiling	14	Sumberjo
6	TAPANGO	1	Kel. Pelitakan	8	Dakka
		2	Rappang	9	Banatorejo
		3	Jambu Malea	10	Palatta
		4	Kalimbua	11	Tapango
		5	Batu	12	Riso
		6	Tuttula	13	Kurrak
		7	Tapango Barat	14	Bussu
7	BULO	1	Bulo	6	Sabura
		2	Karombang	7	Patambanua
		3	Daala Timur	8	Sepporakki
		4	Pulliwa	9	Ihing
		5	Lenggo		
8	MATANGNGA	1	Kel. Matangnga	5	Katimbang
		2	Rangoan	6	Tapua
		3	Ba'ba Tapua	7	Mambu Tapua
		4	Lilli		
9	MAPILLI	1	Kel. Mapilli	7	Buku
		2	Beroangin	8	Kurma
		3	Landi Kanusuang	9	Bonra
		4	Ugi Baru	10	Bonne-Bonne
		5	Segerang	11	Sattoko
		6	Rappang Barat	12	Rumpa
10	LUYO	1	Kel. Batupanga	7	Mapilli Barat
		2	Batupanga Daala	8	Baru
		3	Pussui	9	Puccadi
		4	Tenggelang	10	Pussui Barat



		5	Sambali Wali	11	Mambu
		6	Luyo		
11	TUBBI TARAMANU	1	Kel. Taramanu	8	Arabua
		2	Ambopadang	9	Peburru
		3	Tubbi	10	Besoangin Utara
		4	Ratte	11	Pollewani
		5	Besoangin	12	Poda-Poda
		6	Piriang Tapiko	13	Taramanu Tua
		7	Taloba		
12	CAMPALAGIAN	1	Kel. Pappang	10	Laliko
		2	Ongko	11	Bonde
		3	Kenje	12	Katumbangan Lemo
		4	Sumarrang	13	Panyampa
		5	Botto	14	Suruang
		6	Gattungang	15	Lampoko
		7	Padang Timur	16	Katumbangan
		8	Lagi Agi	17	Lapeo
		9	Padang	18	Parappe
13	BALANIPA	1	Kel. Balanipa	7	Galung Tuluk
		2	Tammejarra	8	Pallis
		3	Lego	9	Tamangalle
		4	Pambusuang	10	Bala
		5	Mosso	11	Lambanan
		6	Sabang Subik		
14	TINAMBUNG	1	Kel. Tinambung	5	Galung Lombok
		2	Karama	6	Tandung
		3	Tangnga Tangnga	7	Batulaya
		4	Lekopaddis	8	Sepabatu
15	LIMBORO	1	Kel. Limboro	7	Pandulangan
		2	Lembang-Lembang	8	Renggeang
		3	Tandasura	9	Salarri
		4	Samasundu	10	Tangan Baru
		5	Napo	11	Palece
		6	Todang Todang		
16	ALU	1	Kel. Petoosang	5	Puppuring
		2	Mombi	6	Saragiang
		3	Kalumammang	7	Sayoang
		4	Pao Pao	8	Alu

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2020

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah Daerah

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana kegiatan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebanyak 6.059 pegawai yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya, jumlah PNS Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan unit kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9.
Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		L	P	
1	Sekretariat Daerah	80	58	138
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21	15	36
3	Inspektorat Daerah	31	26	57
4	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	24	15	39
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31	14	45
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	15	23
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	3	19
8	Badan Keuangan	15	28	43
9	Badan Pendapatan	23	15	38
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14	20
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11	14	25
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31	20	51
13	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	16	11	27
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	13	28
15	Dinas Kesehatan	162	663	825
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.145	1.913	3.058
17	Dinas Pertanian dan Pangan	154	100	254
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	22	20	42
19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	20	11	31
20	Dinas Sosial	13	11	24
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22	18	40
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	22	36
23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	20	15	35
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97	29	126
25	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	12	16	28
26	Dinas Perhubungan	21	9	30
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	15	22
28	Satuan Polisi Pamong Praja	118	3	121
29	Rumah Sakit Umum Daerah	68	235	303
30	Kantor Kecamatan Binnuang	15	6	21
31	Kantor Kecamatan Polewali	46	43	89
32	Kantor Kecamatan Anreapi	16	6	22
33	Kantor Kecamatan Matakali	9	13	22



34	Kantor Kecamatan Tapango	16	6	22
35	Kantor Kecamatan Wonomulyo	25	12	37
36	Kantor Kecamatan Mapilli	17	10	27
37	Kantor Kecamatan Luyo	17	6	23
38	Kantor Kecamatan Campalagian	24	16	40
39	Kantor Kecamatan Balanipa	14	14	28
40	Kantor Kecamatan Tinambung	13	21	34
41	Kantor Kecamatan Limboro	18	8	26
42	Kantor Kecamatan Alu	13	5	18
43	Kantor Kecamatan Tubbi Taramanu	22	1	23
44	Kantor Kecamatan Matangnga	14	1	15
45	Kantor Kecamatan Bulu	14	1	15
46	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	14	19	33
	TOTAL	2.530	3.529	6.059

Sumber : BKPP Polewali Mandar, 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Struktur APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2021 terdiri dari komponen Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Secara terperinci jenis Pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer yang bersumber Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya dan (3) belanja tak terduga, yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Belanja Transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.10.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2020
1	PENDAPATAN	7.5.2.a	1.460.101.653.437,00	1.517.057.242.761,60	(56.955.589.324,60)	103,90	1.510.698.717.309,77
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.2.a. 1)	203.690.330.171,00	260.705.653.019,60	(57.015.322.848,60)	127,99	211.985.061.141,77
3	Pajak Daerah	7.5.2.a. 1). a)	26.449.586.090,00	25.645.071.245,90	804.514.844,10	96,96	24.377.042.874,46
4	Retribusi Daerah	7.5.2.a. 1). b)	16.783.188.100,00	19.298.257.431,00	(2.515.069.331,00)	114,99	11.716.796.739,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.2.a. 1). c)	4.297.813.372,00	3.488.099.115,00	809.714.257,00	81,16	3.542.887.063,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.2.a. 1). d)	156.159.742.609,00	212.274.225.227,70	(56.114.482.618,70)	135,93	172.348.334.465,31
7	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.2.a. 2)	1.194.736.823.266,00	1.195.396.616.944,00	(659.793.678,00)	100,06	1.226.152.350.182,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.161.437.091.000,00	1.154.508.317.303,00	6.928.773.697,00	99,40	1.181.858.427.907,00
9	<i>Dana Perimbangan</i>	7.5.2.a. 2). a)	<i>967.715.930.000,00</i>	<i>961.122.278.203,00</i>	<i>6.593.651.797,00</i>	<i>99,32</i>	<i>1.012.302.581.907,00</i>
10	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	7.5.2.a. 2). b)	<i>32.388.098.000,00</i>	<i>32.388.098.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8.222.783.000,00</i>
11	<i>Dana Desa</i>	7.5.2.a. 2). c)	<i>161.333.063.000,00</i>	<i>160.997.941.100,00</i>	<i>335.121.900,00</i>	<i>99,79</i>	<i>161.333.063.000,00</i>
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah		33.299.732.266,00	40.888.299.641,00	(7.588.567.375,00)	122,79	39.293.922.275,00
14	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	7.5.2.a. 2). e)	<i>33.299.732.266,00</i>	<i>40.888.299.641,00</i>	<i>(7.588.567.375,00)</i>	<i>122,79</i>	<i>39.293.922.275,00</i>
15	<i>Bantuan Keuangan</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000.000.000,00</i>
16	<i>Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Lainnya</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000.000.000,00</i>
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.2.a. 3)	61.674.500.000,00	60.954.972.798,00	719.527.202,00	98,83	72.561.305.986,00
18	Pendapatan Hibah	7.5.2.a. 3). a)	61.674.500.000,00	60.954.972.798,00	719.527.202,00	98,83	72.561.305.986,00
19	BELANJA	7.5.2.b	1.547.425.280.308,56	1.494.721.491.473,66	52.703.788.834,90	96,59	1.520.021.546.542,00
21	BELANJA OPERASI	7.5.2.b.1)	1.082.648.561.057,56	1.044.751.970.255,66	37.896.590.801,90	96,50	964.538.677.346,00



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

2021

22	Belanja Pegawai	7.5.2.b.1).a)	613.741.911.460,00	573.232.463.477,00	40.509.447.983,00	93,40	601.699.768.133,00
23	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.b.1).b)	426.837.439.485,56	431.240.129.328,00	(4.402.689.842,44)	101,03	340.807.449.146,00
24	Belanja Hibah	7.5.2.b.1).c)	40.526.462.400,00	38.916.629.738,66	1.609.832.661,34	96,03	20.131.250.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.b.1).d)	1.542.747.712,00	1.362.747.712,00	180.000.000,00	88,33	1.900.210.067,00
26	BELANJA MODAL	7.5.2.b.2)	227.844.768.402,00	214.738.626.462,00	13.106.141.940,00	94,25	302.905.186.325,00
27	Belanja Tanah	7.5.2.b.2). a)	1.367.295.803,00	1.366.737.628,00	558.175,00	99,96	1.426.822.223,00
28	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.2.b.2). b)	63.241.423.147,00	60.149.712.867,00	3.091.710.280,00	95,11	92.119.110.371,00
29	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.2.b.2). c)	86.567.547.616,00	81.767.134.480,00	4.800.413.136,00	94,45	120.929.203.159,00
30	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.b.2). d)	73.116.559.160,00	68.152.195.927,00	4.964.363.233,00	93,21	78.151.129.816,00
31	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.2.b.2). e)	3.551.942.676,00	3.302.845.560,00	249.097.116,00	92,99	10.278.920.756,00
32	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.b.3)	3.000.000.000,00	2.844.016.117,00	155.983.883,00	94,80	21.459.165.632,00
33	Belanja Tak Terduga	7.5.2.b.3)	3.000.000.000,00	2.844.016.117,00	155.983.883,00	94,80	21.459.165.632,00
35	BELANJA TRANSFER	7.5.2.c	233.931.950.849,00	232.386.878.639,00	1.545.072.210,00	99,34	231.118.517.239,00
36	Belanja Bagi Hasil	7.5.2.c.1)	3.089.630.643,00	2.254.773.433,00	834.857.210,00	72,98	0,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.2.c.2)	230.842.320.206,00	230.132.105.206,00	710.215.000,00	99,69	231.118.517.239,00
38	SURPLUS / DEFISIT	7.5.2.c	(87.323.626.871,56)	22.335.751.287,94	(109.659.378.159,50)	100	(9.322.829.232,23)
39	PEMBIAYAAN	7.5.2.d					
40	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.d. 1)	66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	76,86	60.064.907.559,83
41	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	76,86	60.064.907.559,83
42	PEMBIAYAAN NETTO		66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	0,00	60.064.907.559,83
43	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(21.303.132.460,56)	73.077.829.615,54		0,00	50.742.078.327,60

***Unaudited**

Sumber : BPKAD Polewali Mandar, 2022



1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi perekonomian lebih baik, berkembang dan maju, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan target peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah melaksanakan pembangunan bersama dengan stakeholder terkait dengan melalui beberapa tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP / RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM / RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah (RKP / RKPD). RPJP / RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM / RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP / RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun keempat atau sebagai tahapan terakhir didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Pada tahapan ini pembangunan daerah akan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas manusia dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sasaran utama peningkatan kualitas manusia adalah meningkatnya nilai dan posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sasaran utama perbaikan taraf hidup masyarakat adalah menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, meningkatnya pendapatan atau pengeluaran per kapita. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sama dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat; Persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sama dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat; dan Pendapatan atau pengeluaran per kapita Kabupaten Polewali Mandar berada di atas angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Dalam penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

❖ *Permasalahan Pembangunan*

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di masa



datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan utama/ pokok yang dihadapi di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

✓ **Tingginya Kemiskinan**

Sampai saat ini di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Hingga tahun 2018 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat masih dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar.

✓ **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kondisi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar yang masih rendah ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Meskipun IPM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Polewali Mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, bahkan daerah lainnya di Indonesia.

✓ **Rendahnya Daya Saing Investasi Usaha Ekonomi Daerah**

Perkembangan nilai Investasi Kabupaten Polewali Mandar kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend peningkatan, namun total nilai investasi daerah tersebut rasionya tergolong masih rendah (14 persen) jika dibandingkan dengan total investasi Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 10,52 Trilyun.

✓ **Belum Optimalnya Pemerataan Ketahanan Pangan Daerah**

Masalah ketahanan pangan sudah lama menjadi pokok perhatian dan menjadi isu strategis nasional dan daerah, masalah pangan ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dimana dua fenomena tersebut saling terkait dan mempunyai hubungan sebab akibat, bahkan angka kemiskinan dan angka kerawanan pangan sering kali di buat setara. Persoalan kerawanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar saat ini ditunjukkan dengan indikator masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang hingga tahun 2018 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat masih dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 16 persen.

✓ **Belum Optimalnya Kondisi Infrastruktur**

Kondisi infrastruktur (khususnya infrastruktur wilayah dan permukiman) di Kabupaten Polewali Mandar yang belum optimal ditandai oleh Indeks infrastruktur yang masih rendah. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah.



✓ **Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar tergambar dari indeks kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Masih rendahnya kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara dan air.

✓ **Belum Optimalnya Kualitas Reformasi Birokrasi**

Kondisi kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Polewali Mandar yang belum optimal ditandai oleh indeks reformasi birokrasi yang masih rendah. Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis.

❖ **Isu Strategis**

Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Polewali Mandar, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Polewali Mandar, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Hasil analisis terhadap isu-isu strategis, akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan isu-isu strategis global dan nasional, serta regional Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Barat yang diidentifikasi sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, antara lain :

- ✓ Kemiskinan
- ✓ Kualitas Sumber Daya Manusia
- ✓ Infrastruktur Wilayah dan Permukiman
- ✓ Pertumbuhan Ekonomi berkualitas
- ✓ Kerawanan Pangan
- ✓ Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
- ✓ Tata Kelola Pemerintahan



b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

❖ *Visi Kepala Daerah*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari naskah visi, misi dan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019-2024 yang disampaikan di hadapan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama lima tahun.

Selanjutnya dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “**Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera**”. Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

✓ **Polewali Mandar Maju**

Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

✓ **Rakyat Sejahtera**

Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

❖ *Misi Kepala Daerah*

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- ✓ Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius;
- ✓ Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
- ✓ Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- ✓ Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Keterkaitan antara empat rumusan misi dengan dua pokok visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada Tabel 1.11. di bawah ini :



Tabel 1.11.
Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019-2024

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Rakyat Sejahtera
2.	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Polewali Mandar Maju
3.	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Polewali Mandar Maju
4.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern	Polewali Mandar Maju

Sumber : RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

❖ Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta didasarkan pada isu-isu strategik. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran dan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mengacu pada visi dan misi di atas, dirumuskan tujuan, sasaran, Strategi dan Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2019-2024 selengkapnya disajikan pada matriks berikut ini :



Tabel 1.12.

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA		
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan sosial
	Berkurangnya pengangguran	Menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten berdasarkan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
	Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan usaha ekonomi desa
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan manajemen pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Peningkatan produksi usaha industri pengolahan dan pengelolaan usaha perdagangan
	Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah
	Meningkatnya investasi daerah	Pengembangan sentra -sentra pusat ekonomi baru dan berkembang
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pertanian terpadu
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-pusat kegiatan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup



MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah daerah

Sumber : RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

Tabel 1.13.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2019-2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL :	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,14	64,27	65,4	66,53	67,73	68,93	68,93	70,13
Sasaran 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	15,97%	14,00%	13,00%	12,00%	10,75%	9,50%	9,50%	8,00%
Sasaran 2 : Berkurangnya pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,63%	67,30%	67,98%	68,65%	69,33%	70,00%	70,00%	70,68%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92%	3,86%	3,81%	3,75%	3,70%	3,64%	3,64%	3,59%
Sasaran 3 : Meningkatkan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	79,02	81,22	83,41	85,61	87,8	90	90	92,2
	Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita (Rp)	699.721	769.693	788.935	808.659	828.875	849.597	849.597	870.597
Sasaran 4 : Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	4,86%	9,72%	14,58%	19,44%	25,00%	25,00%	30,56%
Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,19	7,30	7,40	7,51	7,62	7,72	7,72	7,83
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,31	13,61	13,90	14,20	14,50	14,80	14,80	15,10
Sasaran 6 : Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	61,97	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,00	63,21
Sasaran 7 : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,75	92,01	92,27	92,54	92,8	92,8	93,07
	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	KLA
Tujuan : Meningkatkan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Persentase pertumbuhan ekonomi	7,34%	7,36%	7,39%	7,41%	7,44%	7,46%	7,46%	7,49%
	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,42%	10,93%	14,45%	17,96%	21,48%	24,99%	24,99%	28,51%



Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	7,55%	9,89%	12,14%	14,44%	16,73%	19,03%	19,03%	21,33%
Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Jumlah wisatawan (orang)	488.299	800.000	1.100.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	7.100.000	2.400.000
Sasaran 3 : Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah:								
	- PMDN (Rp.000)	148.306.017	170.650.000	192.985.000	215.350.000	237.650.000	260.000.000	1.076.635.000	282.350.000
	- PMA (Rp.000)	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	2.000.000
Sasaran 4 : Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8,00%	9,40%	10,80%	12,20%	13,60%	15,00%	15,00%	16,40%
Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	63,92	65,08	65,47	67,97	70,68	73,77	73,77	77,27
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas (kejadian)	233	220	200	170	150	120	120	90
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	46,74%	48,77%	51,60%	55,40%	60,60%	65,61%	65,61%	71,11%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	78,00%	79,97%	80,87%	81,67%	83,22%	83,22%	84,82%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	66,44%	67,48%	70,12%	71,88%	73,59%	75,30%	75,30%	77,10%
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	64,00%	65,00%	67,00%	68,00%	70,00%	70,00%	73,00%
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	64,00%	65,00%	67,00%	68,00%	70,00%	70,00%	73,00%
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	58,01	62	66	71	75	81	81	86
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	A	A	A	A	A
	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP						
	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,076	3,114	3,152	3,19	3,228	3,228	3,268
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,01	3,17
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

Sumber : RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024



Tabel 1.14.
Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024

MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius	
No	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin
2	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja
3	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal
4	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat
5	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan
6	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal
7	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8	Penataan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar
9	Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan
10	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat
11	Peningkatan kualitas gizi masyarakat
12	Peningkatan kualitas keluarga berencana
13	Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular
14	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
15	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
16	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga
17	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah	
No	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah
2	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha
3	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung
4	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi
5	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha
6	Pengembangan destinasi wisata unggulan
7	Pemberian kemudahan berinvestasi
8	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertanian & perikanan
9	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi
10	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan	
No	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
2	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan
3	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten
4	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan
5	Penyehatan lingkungan permukiman
6	Pemenuhan perumahan yang layak huni



7	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
8	Pengendalian pencemaran udara dan air
9	Peningkatan fungsi Kawasan hijau
10	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern	
No	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur
2	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah
3	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah
4	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
6	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik
7	Peningkatan kinerja aparatur melalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah
8	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
9	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

Sumber : RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

❖ **Prioritas Daerah**

Memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- ✓ Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
- ✓ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- ✓ Peningkatan Daya Saing Investasi Usaha Ekonomi Daerah;
- ✓ Pemerataan Ketahanan Pangan Daerah;
- ✓ Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman;
- ✓ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- ✓ Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah selanjutnya akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode tahun 2019-2024. Penetapan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan misi adalah sebagai berikut :



➤ **Misi : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Religius**

a) **Tujuan : Meningkatkan Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat**

1) **Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

- ✓ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- ✓ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kelembagaan Sosial

2) **Sasaran : Berkurangnya Pengangguran**

- ✓ Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- ✓ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

3) **Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan**

- ✓ Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

4) **Sasaran : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal**

- ✓ Program Peningkatan Usaha Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- ✓ Program Penyiapan Kawasan Transmigrasi dan Pengawasan Pertambangan
- ✓ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5) **Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

- ✓ Program Pengembangan PAUD dan Dikmas
- ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- ✓ Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
- ✓ Program Pengembangan Mutu Pendidikan

6) **Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan**

- ✓ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- ✓ Program Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak, PUS dan Kesehatan Reproduksi
- ✓ Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- ✓ Program Peningkatan Surveilans dan Imunisasi
- ✓ Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Layanan Kefarmasian
- ✓ Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- ✓ Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- ✓ Program Pelayanan Kesehatan Badan Umum Daerah (BLUD)
- ✓ Program Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan
- ✓ Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Keolahragaan

7) **Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

- ✓ Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak

➤ **Misi : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah**

a) **Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas**

1) **Sasaran : Meningkatkan Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan**

- ✓ Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- ✓ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- ✓ Program Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah
- ✓ Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
- ✓ Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan

2) **Sasaran : Meningkatkan Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah**

- ✓ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



- ✓ Program Pengembangan Usaha Pariwisata
- ✓ Program Pengembangan Kebudayaan
- 3) Sasaran : Meningkatkan Investasi Daerah**
 - ✓ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 4) Sasaran : Meningkatkan Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan**
 - ✓ Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
 - ✓ Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - ✓ Program Peningkatan Produksi Peternakan
 - ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - ✓ Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - ✓ Program Pembinaan dan Pemberdayaan Petani
 - ✓ Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Perikanan
 - ✓ Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
 - ✓ Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pesisir
- **Misi : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan**
 - a) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur**
 - 1) Sasaran : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi**
 - ✓ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - ✓ Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut
 - ✓ Program Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas
 - ✓ Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
 - 2) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan**
 - ✓ Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
 - ✓ Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi**
 - ✓ Program Pengembangan+B193 Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
 - 4) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman**
 - ✓ Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah
 - ✓ Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
 - ✓ Program Pengembangan Perumahan
 - ✓ Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - b) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**
 - 1) Sasaran : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup**
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Program Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Limbah dan Pencemaran
 - Program Pengembangan dan Perlindungan Hutan Rakyat
 - Program Penataan Tata Ruang
- **Misi : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern**
 - a) Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern**
 - 1) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - Program Peningkatan Kualitas Sumbardaya Polisi Pamong Praja
 - Program Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Program Peningkatan Kualitas Data dan Statistik Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Pengembangan E-government Daerah
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Pelayanan Perpustakaan
- Program Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Program Peningkatan Kualitas Keprotokolan Pemerintah Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Kehumasan Pemerintah Daerah
- Program Penguatan Hukum, HAM dan Pengawasan
- Program Pembinaan dan Penguatan Pengawasan
- Program Penataan Ketatalaksanaan
- Program Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- Program Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Pembangunan
- Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Perekonomian dan SDA
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal
- Program Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan
- Program Peningkatan Kualitas Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Program Pengembangan Data
- Program Peningkatan Kualitas Pengkajian dan Penelitian Inovasi Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan
- Program Koordinasi dan Advokasi Perencanaan Sektor
- Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Aparatur
- Program Peningkatan Kualitas Pengangkatan dalam Jabatan
- Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah
- Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
- Program Tanggap Darurat Bencana
- Program Penanganan Pasca Bencana Alam
- Program Penataan Pemerintahan Desa
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan



- Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- Program Inventarisasi dan Penyediaan Tanah
- Program Pendidikan Politik Dalam Negeri
- Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
- Program Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
- Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- Program Penguatan Koordinasi Perekonomian Pembangunan Kecamatan
- Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Program Pengelolaan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
- Program Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah
- Program Pengelolaan Pajak Daerah
- Program Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan
- Program Pengelolaan Retribusi Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar selain memperhatikan permasalahan pembangunan yang dirumuskan ke dalam 6 isu strategis, juga mempertimbangkan keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pada Rancangan Akhir RKP tahun 2021 tema pembangunan nasional **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.”**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merumuskan tema pembangunan tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif untuk pembangunan berkelanjutan”** Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merumuskan Tema pembangunan RKPD tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang didukung oleh penguatan sumber daya manusia, daya saing usaha dan infrastruktur”**. Tema tersebut mengandung makna percepatan pemulihan ekonomi untuk membangkitkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk karena adanya pandemic covid- 19 dan angka kemiskinan yang masih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional dan provinsi. Keterpurukan ekonomi akibat wabah covid 19 menyebabkan sektor UMKM kolaps.

Dampak ekonomi ini membawa implikasi pula terhadap kehidupan sosial, yang jika tidak terkendali berpeluang menyebabkan krisis di bidang politik. Situasi tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan apabila pandemi ini berlangsung dalam durasi yang lama. Pemulihan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat dengan menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dengan fokus pada peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, bantuan sosial, pendidikan dan pemerataan ketahanan pangan. Makna daya saing usaha adalah peningkatan kemampuan pengusaha lokal melalui pemberdayaan UMKM yang inovatif sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan infrastruktur fokus pada pengembangan infrastruktur wilayah untuk memudahkan akses antar wilayah dan infrastruktur permukiman adalah perbaikan kualitas lingkungan



permukiman untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan isu strategis dan tema pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 maka Prioritas Pembangunan tahun 2021 adalah :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas pembangunan manusia
- c. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- d. Pengembangan infrastruktur wilayah dan permukiman
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- f. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.

Prioritas pembangunan nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas sehingga Prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten harus bersinergi dengan prioritas nasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 terdapat tujuh prioritas pembangunan nasional . selanjutnya di Provinsi Sulawesi Barat merumuskan 5 prioritas pembangunan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.15.

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI SULAWESI BARAT	PRIORITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pemulihan Sektor Ekonomi	1. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Penguatan Jaring Pengaman Sosial, Sistem Kesehatan Daerah, dan Kualitas SDM	3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia 4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Permukiman



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4. Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2021

Sasaran pembangunan nasional merumuskan 3 (tiga) sasaran pembangunan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sasaran tingkat kemiskinan dan sasaran pembangunan antar wilayah. Di Provinsi Sulawesi Barat prioritas pembangunan dijabarkan kedalam 25 (dua puluh lima) sasaran pembangunan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.16. sedangkan Program Prioritas Kabupaten Polewali Mandar yang Mendukung Prioritas Nasional, Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.16.
Program Prioritas Kabupaten Polewali Mandar yang
Mendukung Prioritas Nasional, Tahun 2021

No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS (PERMENDAGRI 90)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengolahan Perikanan Tangkap
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			



			<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Program Promosi Penanaman Modal</p>
		Percepatan pengurangan kemiskinan	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p>
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		<p>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p>
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman</p> <p>Program Pengendalian Penduduk</p> <p>Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p>
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p>



		Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan infrastruktur wilayah dan permukiman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Program Administrasi Umum Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi



		Program Aplikasi Informatika
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Program Penanggulangan Kebakaran
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika Serta Budaya Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Layanan dan Administrasi Keuangan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penatagunaan Tanah
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2021



Tabel 1.17.
Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar	Indikator	Target Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi nasional	Pertumbuhan ekonomi nasional	4,5-5,5%	Meningkatnya Nilai Tambah Industri	(Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB)		Meningkatnya daya saing usaha industry pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industry dan pengolahan	6
							Persentase laju pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dan eceran	15,5
			Meningkatnya Nilai Tambah Jasa Produktif	(Kontribusi Sektor Jasa Produktif terhadap PDRB)				
						Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	350
			Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian	(Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB)		Meningkatnya pemerataan sektor dan pertumbuhan pertanian perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,5
	tingkat inflasi	3,00%						
Sasaran kemiskinan tingkat	Angka kemiskinan	9,2-9,7%	Berkurangnya Kemiskinan	(Angka Kemiskinan)		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	15,40%
				(Indeks Gini Rasio)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5-8,2 %	Meningkatnya Kesempatan Kerja	(Tingkat Pengangguran Terbuka)			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%
	GINI RATIO	0,377–0,379	Meningkatnya Iklim Investasi	(Jumlah Nilai Investasi)				
	IPM	72,78-72,90	Meningkatnya Layanan Pendidikan Berkualitas	(Angka Rata-rata Lama Sekolah)		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,51



Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar	Indikator	Target Tahun 2021
				(Angka Harapan Lama Sekolah)			Harapan lama sekolah (HLS)	14,2
			Meningkatnya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	(Angka Harapan Hidup)		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	62,4
			Meningkatnya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	(Persentase Angka Kriminalitas)				
						Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	85,61
							Pengeluaran Konsumsi Rata-rata perkapita	8.598.000
			Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Pulau-pulau Kecil dan Desa Tertinggal	(Persentase Daerah Tertinggal)		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase desa maju mandiri	7,56%
						Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,7
							Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama
						Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	200
Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah	kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional	Sulawesi 5,4-7,0 persen	Meningkatnya Pembangunan dan Kualitas Infrastruktur Jalan Provinsi	(Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi)		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	68,3
						Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,67
			Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(Persentase Rumah Layak Huni)		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	86,68



Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	Indikator	Target Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar	Indikator	Target Tahun 2021
			Meningkatnya Elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	(Persentase Elektrifikasi)				
			Meningkatnya Kualitas Udara	(Indeks Kualitas Udara)		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	70.63
			Meningkatnya Kualitas Air	(Indeks Kualitas Air)				
			Optimalisasi Tutupan Lahan	(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)				
			Meningkatnya Ketahanan Bencana	(Indeks Resiko Bencana)				
			Penguatan Akuntabilitas Kinerja	(Nilai RB Program Penguatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A
							Opini Pengelola keuangan	WTP
			Penguatan Pengawasan	(Nilai RB Program Penguatan Pengawasan)			Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	3,076
			Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	(Nilai RB Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur)			Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,71
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(Nilai RB Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
			Penataan Tatalaksana	(Nilai RB Program Penataan Tatalaksana)				
			Penataan Peraturan Perundang-undangan	(Nilai RB Program Penataan Peraturan Perundang-undangan)				



			Manajemen Perubahan	(Nilai RB Program Manajemen Perubahan)				
			Penataan dan Penguatan Organisasi	(Nilai RB Program Penataan dan Penguatan Organisasi)				

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2021

Tabel 1.18.
Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran, dan Program Prioritas Tahun 2021

No.	Prioritas RKPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	PRGRAM PRIORITAS dalam RPJMD 2019-2024	Program Prioritas Hasil Pemetaan ke Permendagri 90/2019	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	OPD PELAKSANA
1	Percepatan pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	15,40%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	20,46 %	DINSOS
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	20,46 %	DINSOS
						Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Usaha Kesejahteraan Sosial	25%	DINSOS
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	71,43 %	DINSOS
		Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	68	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda wirausaha	22 orang	DPOP
							Jumlah pemuda pelopor	75 orang	DPOP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	980 orang	TRANSNAKER
							Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap



No.	Prioritas RKPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	PRGRAM PRIORITAS dalam RPJMD 2019-2024	Program Prioritas Hasil Pemetaan ke Permendagri 90/2019	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	OPD PELAKSANA
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	85,61	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka ketersediaan pangan perkapita	2889 Kkal / Kap/ Hari	DISTANPAN
			Pengeluaran Konsumsi Rata-rata perkapita	8.598.000		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	35 Desa / Kelurahan	DISTANPAN
		Berkembangnya a Usaha Ekonomi Lokal	Persentase desa maju mandiri	7,56%	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menerapkan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	90.28 %	DPMD
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	TRANSNAKER
2	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM SD/MI	100 %	DISDIKBUD
							Persentase APM SMP/MTs	96,15 %	DISDIKBUD
							Persentase APK SD/MI	100 %	DISDIKBUD
			Persentase APK SMP/MTs	100 %	DISDIKBUD				
			Harapan lama sekolah (HLS)	14,2	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,1 %	DISDIKBUD
					Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran		Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,5 %	DISDIKBUD
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	92,24 %	DISDIKBUD



						Persentase tenaga kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi	86,93%	DISDIKBUD
						Persentase tenaga pendidik yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	100,00%	DISDIKBUD
						Persentase sekolah yang terakreditasi	64,00%	DISDIKBUD
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	62,4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Pustu)	32%	DINKES
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas)	100%	DINKES
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas keliling)	100%	DINKES
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Poskesdes)	52%	DINKES
						Persentase puskesmas dengan status akreditasi :		DINKES
						- Dasar	0%	DINKES
						- Madya	70%	DINKES
						- Utama	25%	DINKES
						- Paripurna	5%	DINKES
						Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	95%	DINKES



						Angka kematian ibu	234 per 100.000 kelahiran hidup	DINKES	
						Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup		
						Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	306 per 1000 Lansia		
					Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	3%	DINKES	
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat			DINKES	
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			DINKES	
					Program Peningkatan Kapabilitas RSUD	Nilai Akreditasi RS	88	RSUD	
					Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat kesehatan)	100%	DINKES
					Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1.12 %	DP2KBP3A
					Program Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	78 %	DP2KBP3A
					Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62 %	DINKES
					Program Peningkatan Kualitas	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 %	DINKES



No.	Prioritas RKPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	PRGRAM PRIORITAS dalam RPJMD 2019-2024	Program Prioritas Hasil Pemetaan ke Permendagri 90/2019	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	OPD PELAKSANA
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak			Sumber Daya Kesehatan	Manusia Kesehatan	kompetensi (Tenaga Medis)		
					Program Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berperstasi	50 Atlet	DPOP
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,7	Program Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,27	DP2KBP3A
			Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Program Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	DP2KBP3A
3	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,5	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian terampil	33 orang	DISTANPAN
							Jumlah Penyuluh Pertanian ahli	87 Orang	DISTANPAN
					Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Perikanan	Program Pengolahan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap dan pesisir	36.019,98 Ton	DKP
							Jumlah Penyuluh perikanan Ahli	3 Orang	
Program Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan pesisir		Jumlah Penyuluh perikanan Terampil	2 Orang	DKP					
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	32 %	DISTANPAN
							Jumlah produksi padi	362766.71 Ton	DISTANPAN
						Jumlah produksi jagung	67601.5 Ton	DISTANPAN	
						Jumlah Produksi kedelai	6941.04 Ton	DISTANPAN	



					Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	jumlah produksi pisang	107531 Ton	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Bawang Merah	135.56 Ton	DISTANPAN
							jumlah produksi cabe	704.45 Ton	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Wortel	1 Ton	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Kentang	1 Ton	DISTANPAN
							jumlah produksi durian	41410.74 Ton	DISTANPAN
							Jumlah produksi rambutan	470.72 Ton	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Langsung	1223.67 Ton	DISTANPAN
					Program Peningkatan Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah produksi daging unggas	1820.96 Ton	DISTANPAN
							jumlah produksi telur unggas	3271,56	DISTANPAN
					Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	jumlah produksi daging sapi	430,64	DISTANPAN
							jumlah produksi daging kambing	17,18	DISTANPAN
							Jumlah produksi Kakao	1820.96 Ton	DISTANPAN
							Jumlah produksi Kelapa	3271,56	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Kopi	430,64	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Lada	17,18	DISTANPAN
							Jumlah Produksi Kemiri	34992.46 Ton	DISTANPAN
					Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi :		DKP
							- Perikanan budidaya laut	14.000,00 Ton	DKP
							- Tambak	16.000,00 Ton	DKP
							- Kolam	925,00 Ton	DKP



	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri dan pengolahan	6,00	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri mikro	1,02 %	DISPERINDAG		
		Persentase laju pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dan eceran	15,50	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase pertumbuhan industri kecil	0,02 %	DISPERINDAG		
				Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:		DISPERINDAG		
						- Usaha baru	11,20%			
						- Mikro - kecil	8,00%			
				Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Koperasi Aktif	18,22%	DISPERINDAG
								Persentase Pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	5,26%	DISPERINDAG
								Persentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Konsumen	100%	DISPERINDAG
				Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		DKP
								Jumlah Destinasi Wisata	Objek	DPOP
								Jumlah Kunjungan Domestik	600.000	DPOP
				Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	350.000	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Mancanegara	250	DPOP
Program Pelestarian Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	100 %					DISDIKBUD		



					Program Pengembangan Kemitraan Investasi Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Nilai realisasi Investasi daerah PMDN	215.350.000.000	PTSP
							- Nilai realisasi investasi daerah PMA	2.000.000.000	PTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	450 Investor	PTSP
4	Pengembangan infrastruktur wilayah dan permukiman	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	200	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	90,19%	DISHUB
					Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas		Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	62,00%	DISHUB
					Program Pelayanan Transportasi		Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	51,31%	DISHUB
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	68,30	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	50,59%	DPUPR
					Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan		Persentase Jalan dalam kondisi sedang	10,00%	DPUPR
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		Persentase jembatan dalam kondisi baik	66,67%	DPUPR
							Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	66,66%	DPUPR
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air	program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	62,62%	DPUPR
							Persentase pintu air irigasi dalam kondisi baik	80,00%	DPUPR
							Persentase bendung dalam kondisi baik	100,00%	DPUPR



		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	86,68	Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi yang layak	88%	DPUPR	
							Persentase akses sanitasi yang aman	5%	DPUPR	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Persentase pelayanan akses air minum	93%	DPUPR	
						Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	25.12 Ha	DISRUM KIMTAN
					Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik	55,87	DPUPR	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Kawasan Perkotaan dalam Kondisi Baik	50.00 %	DPUPR	
					Program Pengembangan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	32,35%	DISRUM KIMTAN	
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,63	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Terkelola	94 %	DLHK	
							Persentase Pengurangan Sampah	20 %	DLHK	
							Persentase Penanganan Persampahan	74 %	DLHK	
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran	Ringan (1,92)	DLHK	



					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH	10,50 %	DLHK
					Program Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase program pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	42.03 PERSEN	DPUPR
6	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	A	Program Peningkatan Akuntabilitas, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	Program Administrasi Umum	Persentase Perangkat Daerah dengan predikat Reformasi Birokrasi Baik	20%	SETDA
			Pemerintah (SAKIP)		Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah				SETDA
			Opini Pengelola keuangan	WTP	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar	100 %	BALITBANGREN
		Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD					100 %	BALITBANGREN	
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD					100 %	BALITBANGREN	
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah					70 %	BALITBANGREN	
			Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	3.076	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan Pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100 %	BALITBANGREN



							Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah antara : - RPJMD dengan RENSTRA - RKPd dengan RENJA	100 %	BALITBANGREN
							Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara RENJA dengan RKA	100 %	BALITBANGREN
							Persentase rata- rata capaian program perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	70 %	BALITBANGREN
			Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,71	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidany Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai standar	100 %	BALITBANGREN
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik			Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Ekonomi antara : - RPJMD dengan RENSTRA – RKPd dengan RENJA	100 %	BALITBANGREN
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang ekonomi antara RENJA dengan RKA					100 %	BALITBANGREN	
		Persentase rata- rata capaian program perencanaan sektoral Bidang Ekonomi					75 %	BALITBANGREN	



					Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditetapkan sesuai standar	100 %	BALITBANGREN
							Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Sosial dan Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA - RKPD dengan RENJA	100 %	BALITBANGREN
							Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang sosial budaya antara RENJA dengan RKA	100 %	BALITBANGREN
							Persentase rata- rata capaian program perencanaan sektoral bidang sosial budaya	75 %	BALITBANGREN
					Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	61.54%	BAKEU
				Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu		91.11 %	BAKEU	
				Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				BAKEU	
					Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	98,00%	BAKEU
							Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu	93,33%	BAKEU



				Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100 %	DISPENDA
						Jumlah penerimaan:		DISPENDA
						- Pajak daerah	24.062.178.816	DISPENDA
						- Retribusi Daerah	12.212.208.000	DISPENDA
				Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	SETDA
				Program Penataan Kehumasan dan Keprotokoleran				
				Program Harmonisasi Produk Hukum Perundang-undangan				SETDA
				Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	27,27 %	INSPEKTORAT
				Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	80,95%	INSPEKTORAT
				Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	Program Aplikasi Informatika	Persentase fungsi- fungsi utama pemerintahan yang berbasis Elektronik	58%	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Komunikatif dan Informatif	58%	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	55%	DISKOMINFO



No.	Prioritas RKPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	PRGRAM PRIORITAS dalam RPJMD 2019-2024	Program Prioritas Hasil Pemetaan ke Permendagri 90/2019	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	OPD PELAKSANA
					Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Predikat pengelolaan kearsipan		PERPUSTAKAAN
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	DPMPTSP
					Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	100%	DISDUKCAPIL
				Persentase kepemilikan kartu keluarga			100%	DISDUKCAPIL	
					Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	100%	DISDUKCAPIL
				Persentase kepemilikan akta kematian			80,52%	DISDUKCAPIL	
					Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	60	DISDUKCAPIL
					Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti	%	SATPOL PP
					Program Pembinaan Ketertiban Umum		Persentase Gangguan keamanan, Ketertiban dan ketenteraman yang ditindaklanjuti		SATPOL PP
					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja		Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi (Dasar)		SATPOL PP



						Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi (Teknis)		SATPOL PP
				Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat		Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai		SATPOL PP
				Program Penanganan Bencana Kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	%	SATPOL PP
				Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa siaga bencana	56,0%	BPBD
				Program Tanggap Darurat Bencana		Waktu tanggap darurat setelah kejadian	72 Jam	BPBD
				Program Penanganan Pasca Bencana Alam		Persentase pasca bencana yang tertangani	60,0%	BPBD
				Program Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Pemahaman Politik Masyarakat	Baik	KESBANGPOL
				Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Yang tertangani	100%	KESBANGPOL
				Program Pembinaan Bina Ideologi, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Baik	KESBANGPOL



				Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	34,08%	BKPP
			Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur					
			Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	BKPP	
					Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian daerah	Baik	BKPP	
			Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Sangat Baik	SETDA	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	DPRD	
			Program Pelayanan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan	7%	PERPUSTAKAAN	
					Persentase komunitas literasi yang aktif di tingkat desa	40%	PERPUSTAKAAN	
			Program Penataan Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Status Kurang Berkembang	34.03 %	DPMD	
					Persentase Desa dengan Status Berkembang	59.72 %	DPMD	
					Persentase Desa dengan Status Cepat Berkembang	6.25 %	DPMD	
					Persentase Bumdes Berkembang	57.64 %	DPMD	
					Persentase Bumdes Maju	34.03 %	DPMD	
					Persentase Bumdes Mandiri	8.33 %	DPMD	



				Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	60%	BALITBANGREN
				Program Peningkatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	83,20%	DPUPR
				Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah	Program Penatagunaan Tanah	persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	53,02%	DISRUMKIMTAN
				Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	DPUPR
				Program Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	AA/A/BB/B/CC/C	SEMUA PERANGKAT DAERAH
				Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah				
				Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Program Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	KECAMATAN

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2021



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

a. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejalan dengan prinsip oTonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi :

- ✓ pendidikan;
- ✓ kesehatan;
- ✓ pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✓ perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ✓ ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan dalam penerapan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Namun sampai dengan saat ini belum adanya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten



Polewali Mandar yang mengatur mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan dalam upaya pembentukan Tim Penerapan SPM, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Namun untuk mendorong pelaksanaan standar teknis pelayanan dasar dalam menjalankan jenis pelayanan dasar dan meningkatkan pencapaian target 100% (seratus persen) standar teknis pelayanan minimal pada masing-masing bidang SPM maka dipandang perlu adanya peraturan kepala daerah yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar saat ini tengah berupaya menyusun rancangan peraturan kepala daerah tersebut.

b. Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM dalam RPJMD

2) Pendidikan

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pendidikan yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar
- ✓ Program Pengembangan PAUD dan DIKMAS
- ✓ Program Pengembangan Pendidikan Dan Pengajaran
- ✓ Program Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

3) Kesehatan

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- ✓ Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kesehatan
- ✓ Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- ✓ Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- ✓ Program Peningkatan Promosi Kesehatan

4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Perumahan Rakyat yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Pengembangan Perumahan
- ✓ Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah

6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Penegakkan Peraturan Perundang – Undangan
- ✓ Program Pembinaan Ketertiban Umum
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Polisi Pamong Praja
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat
- ✓ Program Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran
- ✓ Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
- ✓ Program Tanggap Darurat Bencana



7) Sosial

Program yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Sosial yang tertuang di dalam RPJMD sebagai berikut :

- ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- ✓ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

c. Identifikasi Permasalahan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun Sebelumnya

1) Pendidikan

- ✓ Masih rendahnya rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- ✓ Masih Tingginya Angka Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTS;
- ✓ Belum optimalnya ketersediaan guru khususnya pada sekolah terpencil;
- ✓ Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik;
- ✓ Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya;
- ✓ Masih rendahnya Jumlah sekolah yang terakreditasi;
- ✓ Masih Rendahnya Kesejahteraan Guru Kontrak Daerah Terpencil.

2) Kesehatan

- ✓ Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- ✓ Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan;
- ✓ Masih tingginya kasus angka kematian bayi;
- ✓ Masih tingginya kasus angka kematian ibu
- ✓ Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- ✓ Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan utamanya rumah sakit
- ✓ Masih tingginya prevalensi stunting.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ✓ Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air minum layak;
- ✓ Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- ✓ Jenis pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan jenis pelayanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum diprogramkan di dalam DPA Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- ✓ Jenis pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan tim kewaspadaan dini daerah
- ✓ Belum optimalnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat
- ✓ Belum optimalnya penanganan terhadap bencana.

6) Sosial

- ✓ Belum akuratnya data DTKS sebagai acuan dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat ekonomi lemah (miskin).
- ✓ Masih terdapat *Inclusion* dan *Exclusion Error* dalam Data DTKS



- ✓ Belum optimalnya layanan yang meliputi jaminan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

d. Program dan Kegiatan Dalam Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021

Dalam mendukung kelancaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di tahun 2021, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perencanaan tahunan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 1.19.

Program Kegiatan yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM 2021

No	Bidang Urusan SPM / OPD	Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM	Alokasi Anggaran untuk SPM (Rp)	Keterangan
1	Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Program Pengelolaan Pendidikan		
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	89.533.144.963	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.936.751.000	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.848.343.100	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	5.152.899.600	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	99.999.600	
2	Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.681.024.870	
3	Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.447.985.400	



		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.297.257.600	
4	Perumahan Rakyat (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan)	Program Penanggulangan Bencana		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	34.000.000	Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh BPBD
5	Trantibumlinmas (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	217.990.000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
		Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.098.730.608	
		Program Penanggulangan Bencana		
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.602.649.500	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	34.000.000	
6	Sosial (Dinas Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	192.849.700	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	69.850.000	



**BAB
II**

**CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data-data capaian makro tersebut di atas maka perubahan capaian kinerja makro antara tahun sebelumnya dan tahun pelaporan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Polewali Mandar 2020-2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	63,84	64,23	0,611
2	Angka Kemiskinan	15,26	15,68	2,752
3	Angka Pengangguran	3,15	3,38	7,302
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,56	1,86	219,231
5	Pendapatan Per kapita	27,81	28,52	2,553
6	Ketimpangan Pendapatan	0,3453	0,352	1,940

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka (BPS), 2022

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.2.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

DATA MAKRO	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63,14	63,74	63,84	64,23
DATA PENUNJANG				
Angka Harapan Hidup (AHH) (%)	61,97	62,18	62,4	62,53
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (%)	7,24	7,40	7,41	7,44
Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	13,02	13,05	13,06	13,38
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita	8.355	8,598	8,580	8,548

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022



2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (BPS).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.3.

Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

DATA MAKRO	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan (%)	15,97	15,60	15,26	15,68
DATA PENUNJANG				
Penduduk Miskin (ribu orang)	69,68	68,86	68,18	69,32
Jumlah Penduduk (jiwa)	437,662	522.738	478.534	483.920
Garis Kemiskinan (rupiah)	366,355	376,827	401.057	416.443

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini kerap digunakan masyarakat sebagai standar untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan.

Tabel 2.4.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

DATA MAKRO	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,17	3,19	3,15	3,38
DATA PENUNJANG				
Bekerja (Jiwa)	204.701	213.946	224.388	218.765
Laki-Laki (Jiwa)	121.611	123.613	130.831	127.711
Perempuan (Jiwa)	82.499	84.272	93.557	91.054



Menganggur (Jiwa)	6.259	6.650	7.298	7.644
Laki-Laki (Jiwa)	2.994	3.289	4.440	5.037
Perempuan (Jiwa)	3.477	3.566	2.858	2.607

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan riil PDRB merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah :

- PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
- PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun;
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah;
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk;
- PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Pada tabel berikut memperlihatkan data mengenai persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018-2021.

Tabel 2.5.
Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

DATA MAKRO	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,19	6,22	-1,56	1,86
DATA PENUNJANG				
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) PDRB atas dasar harga berlaku	12,442.69	13.369,86	13,273.72	13.800,70
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) PDRB atas dasar harga konstan 2010	8,846,18	9,390.94	9,243.36	9.414,99
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (%)	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022



2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan setiap penduduk dalam penyediaan barang dan jasa rata-rata pada suatu periode tertentu atau diistilahkan dengan pendapatan per kapita. PDRB Per Kapita dapat diukur atas harga konstan dan atas harga berlaku. PDRB per kapita diperoleh dari penghitungan PDRB. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Indikator Pendapatan Per Kapita digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan yaitu PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga dan yang kedua adalah PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan 2021 adalah 28,52.

Tabel 2.6.
Statistik Kunci Bidang Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar 2019-2021

EKONOMI	SATUAN	2019	2020	2021
PDRB harga berlaku (Miliar Rupiah)	Triliun Rupiah	13.369,86	13,273.72	13.800,70
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,22	-1,56	1,86
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	30,61	27,81	28,52

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2022

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan *gini ratio*. *Gini ratio* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Adapun *gini ratio* per Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Gini Rasio Kabupaten di Sulawesi Barat 2019-2021

No	Kabupaten	Rasio Gini 2019	Rasio Gini 2020	Rasio Gini 2021
1	Majene	0,398	0,3608	0,390
2	Polewali Mandar	0,362	0,3453	0,352
3	Mamasa	0,383	0,4438	0,335
4	Mamuju	0,362	0,3725	0,365
5	Pasangkayu	0,323	0,3143	0,307
6	Mamuju Tengah	0,301	0,3138	0,286
7	Sulawesi Barat	0,365	0,3643	0,366

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Terdapat 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan indikator yang akan mengukur dan membandingkan secara obyektif atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Fungsi IKK adalah sebagai variabel penilai setiap hal yang diukur. IKK disusun berdasarkan usulan yang diterima dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi serta kepentingan umum, yang digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator ini terdiri dari 2 jenis yakni Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dan Keluaran (output).

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Merupakan indikator yang mengukur keberhasilan atas hasil kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang ditujukan untuk menopang pencapaian indikator kinerja kunci hasil (outcome). Data hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Keluaran) setiap urusan dapat dilihat pada **lampiran 1** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran dalam Laporan ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Merupakan indikator yang mengukur keberhasilan atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan manifestasi dari program yang dilaksanakan dan untuk mengetahui manfaat secara langsung bagi penerima manfaat (masyarakat). Data hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Hasil) setiap urusan dapat dilihat pada **lampiran 2** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam Laporan ini.

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Merupakan indikator yang mengukur atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat administrasi, sdm, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Data hasil capaian kinerja pada indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada **lampiran 3** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Laporan ini.



2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk



menilai apakah berhasil atau tidak berhasil. Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan penetapan kinerja ada 2 yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ditetapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel.

Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius					
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	12,00
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	Persen	68,65
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,75
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan harapan	Angka	85,61
			Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rupiah	808.659
		Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	14,58
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,51
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,20
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,59
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,27
Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat		Pratama		



MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	17,96
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	14,44
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	Orang	1.500.000
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah (PMDN)	Angka	215.350.000
		Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	Persen	12,20

MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan system transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	170	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	55,40
			Meningkatnya Infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80,87
			Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	71,88
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	67,00	

MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	A
			Opini Pengelolaan Keuangan daerah	Opini	WTP
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal SPIP)	Angka	3,152
			Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	2,75
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik

Sumber Data : Balitbangren Polewali Mandar, 2022



2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui capaian sasaran strategis tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mencakup penilaian pencapaian target sasaran yang tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024. Capaian kinerja sasaran diukur dan didekati dari capaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021.

Pengukuran kinerja sasaran yang termuat di dalam penetapan kinerja adalah capaian kinerja yang merupakan cerminan efektifitas proses penganggaran program kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan pada tiap-tiap OPD merupakan aksi nyata di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahap pertama pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga keberhasilan capaian kinerja pada setiap program maupun kegiatan akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada capaian kinerja tiap- tiap sasaran pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Dari 26 indikator kinerja yang mendukung 17 sasaran strategis, ada indikator kinerja sasaran telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target atau cukup berhasil, berhasil, sangat berhasil dan ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target atau tidak berhasil. Tujuan 1 yaitu Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius. Dimana pada tujuan ini terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya; Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dengan capaian 100,48 %, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 110,94 %, Skor Pola pangan harapan dengan capaian 102,63 %. Sedangkan indikator kinerja yang masih dianggap jauh dari target yang ditetapkan adalah Persentase desa maju dan mandiri dengan capaian 57,13 %.

Pada tujuan 2 Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja Indikator kinerja pada tujuan ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Indikator kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dengan capaian kinerja 30,84 %. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran dengan capaian kinerja 25,27 %. Jumlah wisatawan dengan capaian kinerja 14,89 %. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan dengan capaian kinerja 11,63 %.

Sedangkan pada tujuan 3 Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, dimana 2 (dua) indikator kinerja tersebut melebihi target, yaitu Persentase jalan dalam kondisi mantap dengan capaian kinerja 132,68 % dan indikator kinerja Indeks infrastruktur pemukiman dengan capaian kinerja 120,85 %. Untuk indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai capaian kinerja 90,31 % sehingga dinilai cukup berhasil. Sedangkan indikator kinerja Angka kecelakaan lalu lintas menurun menjadi 49,27 %, hal ini disebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi dibanding perkiraan atau target yang ditetapkan untuk tahun 2021. Adapun pada tujuan 4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup, cukup berhasil dengan capaian kinerja 97,55 %.

Tujuan 5 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja Predikat SAKIP yang ditargetkan mendapatkan predikat A, pada tahun 2021 memperoleh predikat BB. Indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan daerah sesuai target yaitu WTP begitupula dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target yaitu sangat baik. Untuk lebih jelasnya Indikator Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada **tabel 2.9. berikut.**



Tabel 2.9.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	12,00	15,68	76,53 %
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	Persen	68,65	68,98	100,48 %
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,75	3,38	110,94 %
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan harapan	Angka	85,61	87,87	102,63 %
			Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rupiah	808.659	804.358	99,46 %
		Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	14,58	8,33	57,13 %
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,51	7,44	99,06 %
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,20	13,38	94,22 %
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,59	62,53	99,90 %
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,27	91,56	99,23 %
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	100 %



MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	17,96	5,54	30,84 %
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	14,44	3,65	25,27 %
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	Orang	1.500.000	223.447	14,89 %
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah (PMDN)	Angka	215.350.000	79.507.530.000	36920,14
		Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	Persen	12,20	1,42	11,63 %
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan system transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	170	345	49,27 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	55,40	73,51	132,68 %
		Meningkatnya Infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80,87	73,04	90,31 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	71,88	86,87	120,85 %



4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	67,00	65,363	97,55 %
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	A	BB	75,00 %
			Opini Pengelolaan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100 %
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,152	3,114	98,79 %
			Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	2,75	2,71	98,55 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	100 %

Sumber Data : Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2022



Tabel 2.10.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	12,00	15,26	15,68	76,53 %
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	Persen	68,65	71,39	68,98	100,48 %
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,75	3,15	3,38	110,94 %
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan harapan	Angka	85,61	87	87,87	102,63 %
			Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rupiah	808.659	831.349	804.358	99,46 %
		Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	14,58	8,33	8,33	57,13 %
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,51	7,41	7,44	99,06 %
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,20	13,06	13,38	94,22 %
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,59	62,4	62,53	99,90 %
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,27	92,02	91,56	99,23 %
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	100 %



MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	17,96	0,04	5,54	30,84 %
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	14,44	-2,45	3,65	25,27 %
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	Orang	1.500.000	240.953	223.447	14,89 %
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah (PMDN)	Angka	517.650.000	78.975.486.	79.507.530.	15,35 %
		Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	Persen	12,20	0,84	1,42	11,63 %
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan system transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	170	168	345	49,27 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	55,40	72,87	73,51	132,68 %
		Meningkatnya Infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80,87	80,04	73,04	90,31 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	71,88	83,67	86,87	120,85 %



4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	67,00	68,55	65,363	97,55 %
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	A	BB	BB	75,00 %
			Opini Pengelolaan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100 %
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal SPIP)	Angka	3,152	3,038	3,114	98,79 %
			Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	2,75	3,30	2,71	98,55 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	100 %

Sumber Data : Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2022



2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis dan indikator kinerja mengalami peningkatan pada beberapa indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Secara umum rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2020.

Adapun indikator kinerja yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya yaitu Indikator kinerja Angka kemiskinan yang dimana pada tahun 2020 sebanyak 15,26 % dan pada tahun 2021 angka kemiskinan meningkat menjadi 15,68%. Indikator kinerja Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 71,39 % dan pada tahun 2021 menurun menjadi 68,98 %. Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tahun sebelumnya 3,15 % dan pada tahun 2021 tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,38 %.

Indikator kinerja jumlah wisatawan yang pada tahun 2020 kunjungan wisatawan sebanyak 240.953 namun pada tahun 2021 menurun menjadi 223.447. Penurunan ini tidak terlepas dampak dari pandemi Covid-19. Indikator kinerja lainnya yang mengalami penurunan yaitu Angka kecelakaan lalu lintas dimana pada tahun 2020 sebanyak 168 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 345 kasus. Indikator kinerja persentase jaringan irigasi kondisi baik juga sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 80,04 % dan pada tahun 2021 turun menjadi 73,04 %.

Indikator kinerja lainnya yang mengalami penurunan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang pada tahun 2020 sebanyak 68,55 % namun pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 65,363 %. Kemudian untuk indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2020 sebesar 3,30 turun menjadi 2,71 pada tahun 2021.

Sedangkan indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan yang sedikit mengalami peningkatan dari 87% pada tahun sebelumnya menjadi 87,87% pada tahun 2021. Indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibanding tahun sebelumnya, begitupula dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yang juga meningkat sebesar 0,32 dibanding tahun sebelumnya. Indikator kinerja Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 sebesar 62,4 % dan pada tahun 2021 sedikit naik menjadi 62,53 %.

Indikator kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, serta Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan mengalami peningkatan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya. Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap yang dimana pada tahun 2020 sebesar 72,87% meningkat menjadi 73,51% pada tahun 2021. Begitujuga dengan indikator kinerja Indeks infrastruktur pemukiman yang mengalami peningkatan di tahun sebelumnya dari 83,67% meningkat sebesar 86,87 %.

Indikator kinerja yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal SPIP) yang berada pada angka 3,114 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 berada di angka 3,038. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada **tabel 2.10** di atas.



a. Tujuan 1 : Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

1) Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

- Indikator : Angka Kemiskinan

Selama 9 (sembilan) tahun terakhir, kinerja pengentasan kemiskinan secara konsisten mengalami penurunan dengan tingkat rata-rata 0,3% per tahun. Penurunan kemiskinan di tahun 2020 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu dengan angka penurunan sebesar 0,34%, walaupun kinerja tersebut masih dibawah rata-rata selama kurun waktu 8 tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dimana pada tahun tersebut angka kemiskinan berada pada 15,68. Pada tahun 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 416.443 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 6,9 juta orang dengan persentase sebesar 15,68 %. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 2,52 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,59.

Chart 2.1.
Trend Angka Kemiskinan Tahun 2013-2021



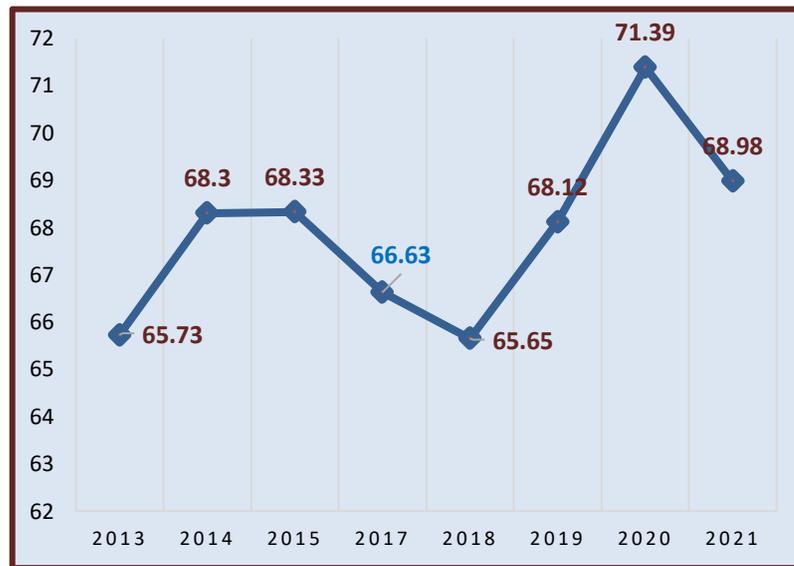
2) Sasaran : Berkurangnya Pengangguran

- Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yaitu menurun dari 71,39% di tahun 2020 menjadi 68,98% di Tahun 2021. Namun capaian 68,98% tersebut melampaui dari target 68,95% yang direncanakan, atau dengan tingkat keberhasilan capaian sebesar 100,48% dengan predikat Sangat Berhasil. Berdasarkan status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, Jumlah terbesar adalah buruh/karyawan/ pegawai sebesar 25,90 % atau 56.655 orang, kemudian pekerja yang berusaha sendiri sebesar 24,68 % atau 54.002 orang.



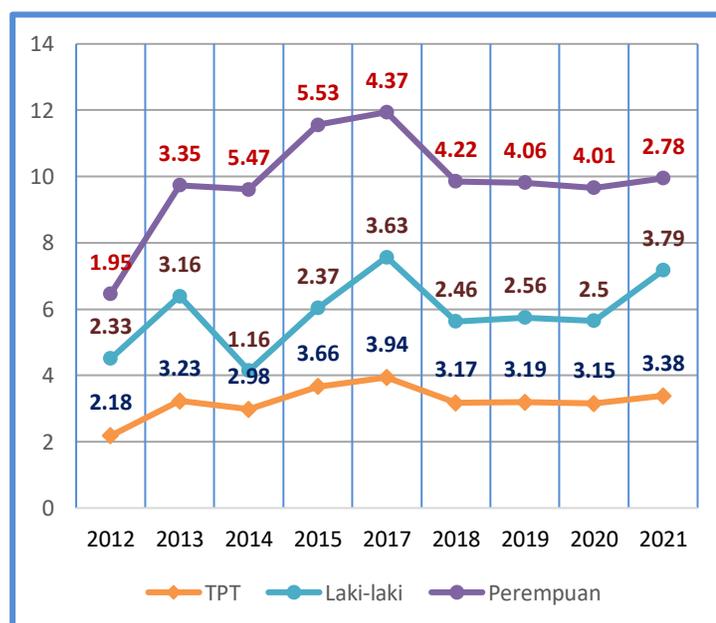
Chart. 2.2.
Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) Tahun 2013 - 2021



• Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar jumlah angkatan kerja sebesar 226.409, terdiri dari 132.748 laki-laki dan 93.661 orang perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 96,62 % atau 218.765 orang bekerja dan 3,38 % atau 7.644 orang pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan angkatan kerja baru dan hal tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja secara signifikan. TPT Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 adalah 3,38 % melampaui target dari yang ditetapkan yaitu 3,75 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 110,94%.

Chart. 2.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2021





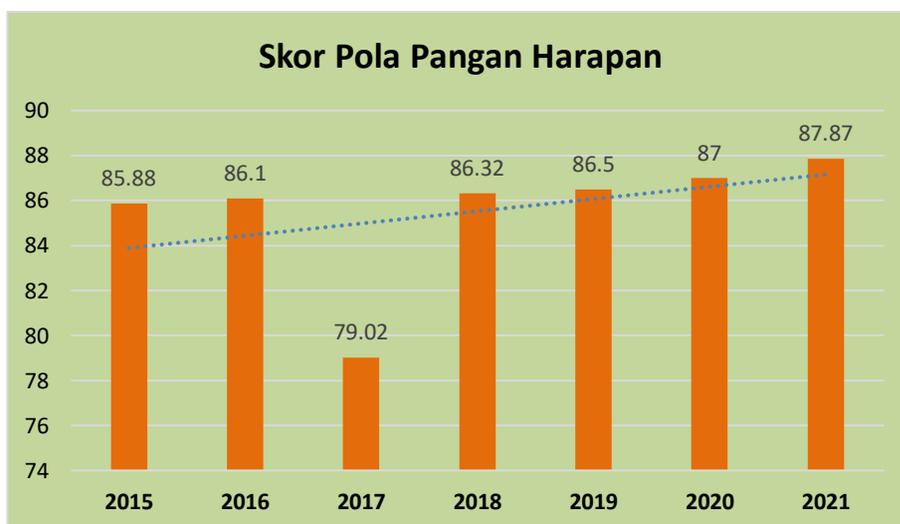
3) Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan

- Indikator : Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebesar 87,87. Jika dibandingkan dengan target 85,61 pada tahun 2020, maka kinerja peningkatan ketahanan pangan dari indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah sebesar 102,63% dengan capaian hasil Sangat Berhasil. Apabila dibandingkan dengan target nasional, skor PPH Kabupaten Polewali Mandar sudah melampaui skor PPN Nasional yang Skor PPHnya hanya sebesar 86,3. Secara umum, Skor PPH selama 6 (enam) tahun terakhir cukup stabil dan tidak terlalu berfluktuatif, walaupun sempat mengalami penurunan sekitar 5 poin di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Polewali Mandar berada pada level AKG yang cukup tinggi sehingga diharapkan tetap menjadi faktor determinan keunggulan sumber daya manusia. Namun demikian, terdapat beberapa daerah dalam Kecamatan Bulu dan Tubbi Taramnu yang tergolong kedalam daerah rawan pangan sehingga memungkinkan penduduknya kurang mendapatkan pasokan pangan yang mencukupi dalam waktu-waktu tertentu.

Chart. 2.4.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2021

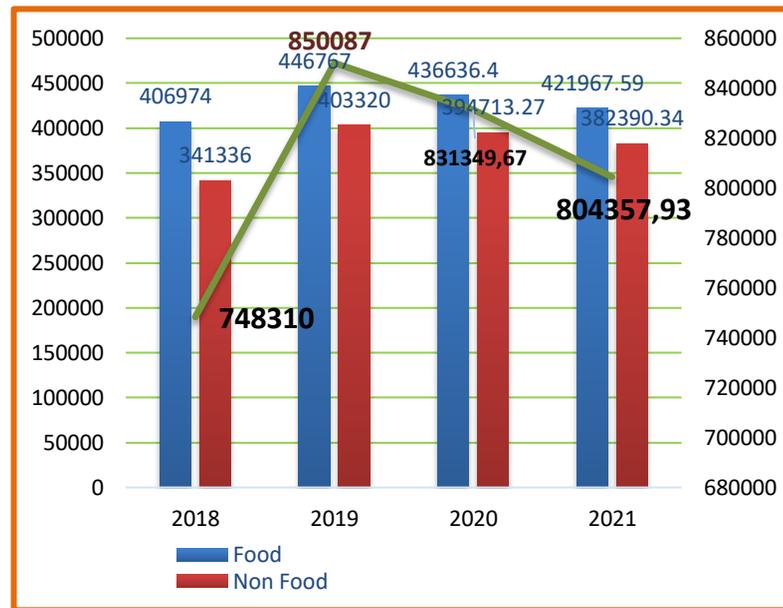


- Indikator : Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata per kapita

Capaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan berdasarkan indikator pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebesar Rp 804.358 dari target Rp. 808.659 atau dengan capaian kinerja sebesar 99,46% dengan kategori Berhasil. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 804.357,93. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp. 421.967,59. Pengeluaran terbesar adalah untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 113.825,12, kemudian padi-padian sebesar Rp. 79.101,46, berikutnya pengeluaran untuk rokok sebesar Rp. 58.870,27. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran bukan makanan sebesar Rp. 382.390,34. Pada kelompok ini pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga menduduki urutan terbesar, sebesar Rp. 194.744,60, kemudian pengeluaran untuk aneka komoditas dan jasa sebesar Rp. 68.699,75. Jika dirinci menurut golongan pengeluaran, dari total seluruh penduduk Polewali Mandar, paling banyak berada pada golongan pengeluaran Rp. 500.000 – 749.999, yaitu sebanyak 27,23 persen, kemudian golongan pengeluaran antara Rp. 300.000-499.999, yaitu sebesar 25,82 persen.



Chart. 2.5.
Capaian Kinerja Pengeluaran konsumsi Rata-rata Perkapita
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021

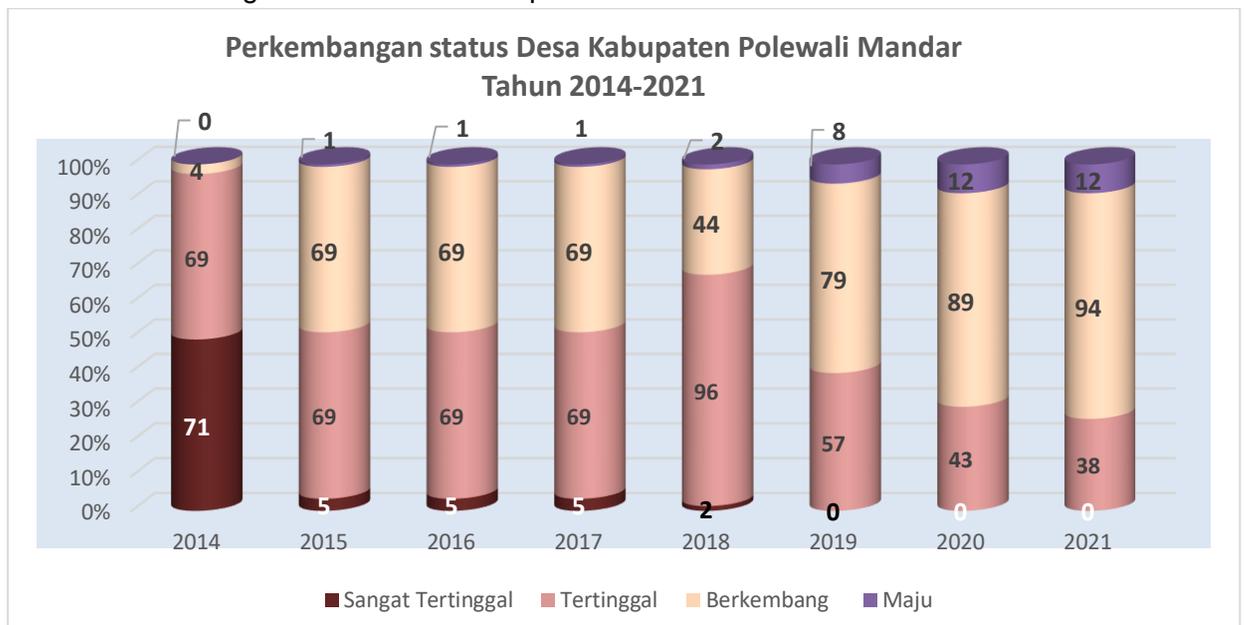


4) Sasaran : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

- Indikator : Persentase Desa Maju dan Mandiri

Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs Kementerian Desa, pada tahun 2021, tercatat jumlah desa yang telah masuk dalam kategori desa Maju adalah 12 desa dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar, atau 8,33%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun yang sama, yaitu 14,58%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 57,13% dengan kategori Cukup Berhasil. Apabila mencermati trend perkembangan status desa selama kurun waktu Tahun 2014-2021, terlihat bahwa pada tahun 2014, sebanyak 71 Desa dengan status Sangat Tertinggal telah dientaskan di tahun 2019. Pada Tahun 2021 ini, terjadi peningkatan pada kategori status desa berkembang, yaitu tambahan 5 Desa Berkembang. Sedangkan kategori desa maju tidak berbeda dengan tahun 2020 yaitu 12 desa. Secara rinci status desa dapat dicermati pada Chart 2.6. dibawah :

Chart. 2.6.
Perkembangan status Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2021



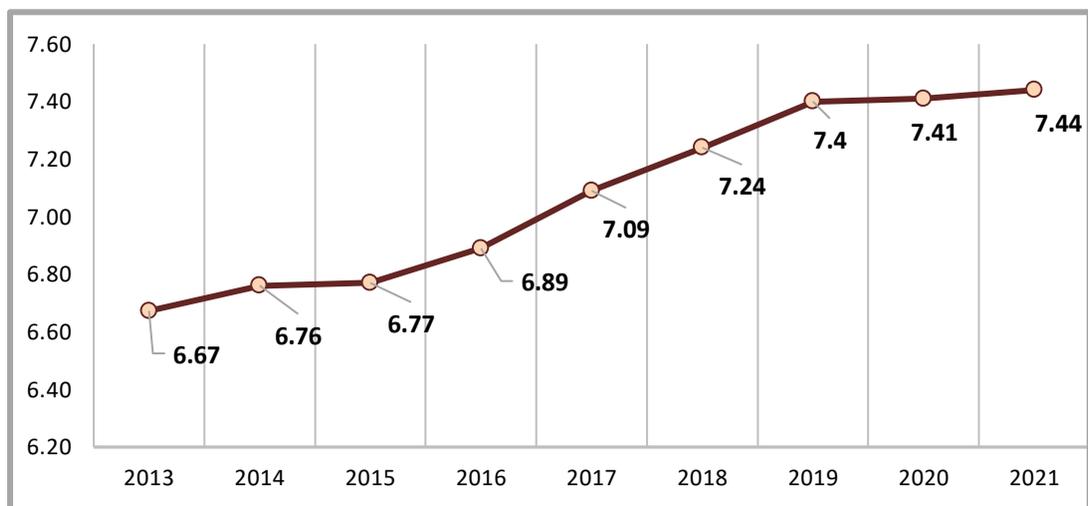


5) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

- Indikator : Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Realisasi Capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2021 adalah 7,44 tahun. Angka tersebut sedikit hampir mencapai target yang telah ditetapkan di tahun sama, yaitu sebesar 7,51 tahun sehingga capaian realisasi indikator tersebut adalah sebesar 99,06% sehingga dapat dikategorikan Berhasil. Dari trend selama 9 (sembilan) tahun terakhir juga menunjukkan bahwa secara konsisten, indikator kinerja rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,12 tahun setiap tahunnya sehingga diharapkan dalam waktu-waktu mendatang akan terus meningkat seiring keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS pada Polewali Mandar Dalam Angka 2022, trend RLS Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Chart. 2.7.
Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021

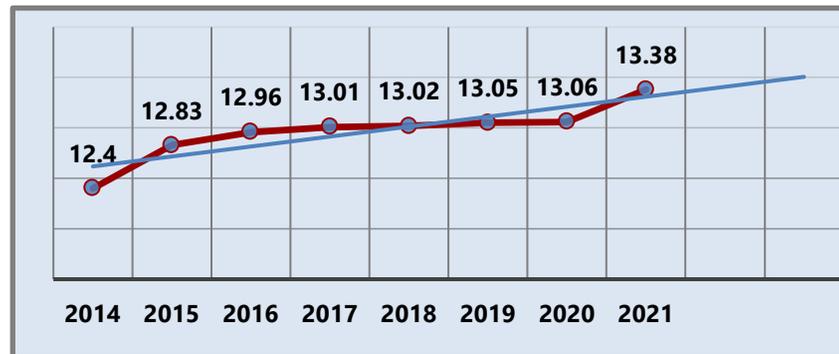


- Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Trend Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak tahun 2013 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,82 tahun 2013 menjadi 13,38 di tahun 2021. Walaupun peningkatan tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 14,20 tahun, namun kinerja capaian indikator sasaran tetap pada kategori berhasil, yaitu dengan capaian 94,22%. Adapun, kondisi HLS Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data BPS Tahun 2020, sebagai berikut:



Chart. 2.8.
Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2021



6) Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan

- Indikator : Angka Harapan Hidup (AHH)

Capaian AHH Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah 62,53 tahun. AHH tersebut hampir mencapai target AHH yang telah ditetapkan yaitu 62,59 tahun sehingga capaian kinerja AHH Polewali Mandar Tahun 2021 adalah 99,90 % dengan kategori Berhasil. Angka Harapan Hidup Kabupaten Polewali Mandar juga secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 7(tujuh) tahun yaitu Tahun 2013-2021, meningkat sebesar 1,28 tahun.

Chart. 2.9.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 - 2021



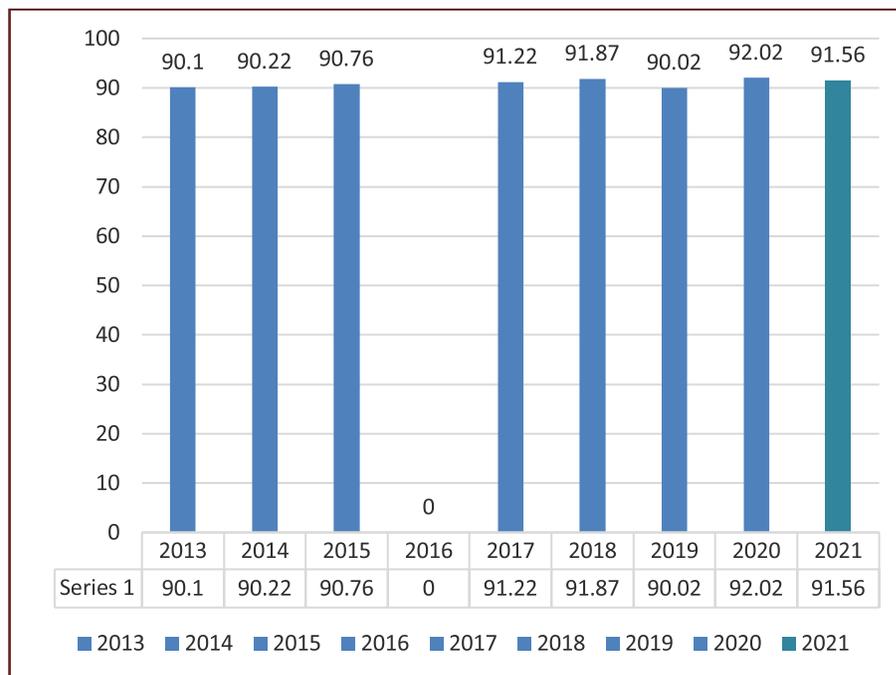
7) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak

- Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Polewali Mandar di Tahun 2021 adalah sebesar 91,56 dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 92,27 pada tahun yang sama sehingga capaian kinerja sebesar 99,23% dengan predikat Berhasil. Data di bawah ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan Indeks IPG di tahun 2019 dan di tahun 2021 kembali meningkat sebesar 2,2 poin, yaitu dari dengan IPG sebesar 92,27, sehingga penurunan tersebut telah dinaikkan melebihi IPG di tahun 2018.



Chart. 2.10.
Trend Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021



• Indikator : Predikat Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak. Dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan, telah mendapatkan akumulasi penilaian dengan nilai 600 poin, di atas target KLA Pratama yang menetapkan batas minimal sebesar 500 poin. Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut, selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah korban kekerasan terhadap anak telah mengalami penurunan jumlah kasus dari 90 kasus di tahun 2018 menjadi 54 Kasus di Tahun 2019, kemudian 37 kasus di tahun 2020 dan pada tahun 2021 terdapat 42 kasus.

Chart. 2.11.
Trend Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
Tahun 2018-2021





b. Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tumbuh negatif sebesar 1,86 %. Tercatat 3 sektor mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan positif. Sektor Pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,42%. Pertumbuhan positif terbesar terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh positif sebesar 8,32 %; kemudian sektor Industri Pengolahan yang tumbuh positif sebesar 5,54 %; lalu Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh positif sebesar 4,89 %. Sedangkan pertumbuhan negatif terbesar terdapat pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,24 %. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dalam 9 (sembilan) tahun terakhir dapat terlihat pada chart 2.12. berikut:

Chart. 2.12.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2021

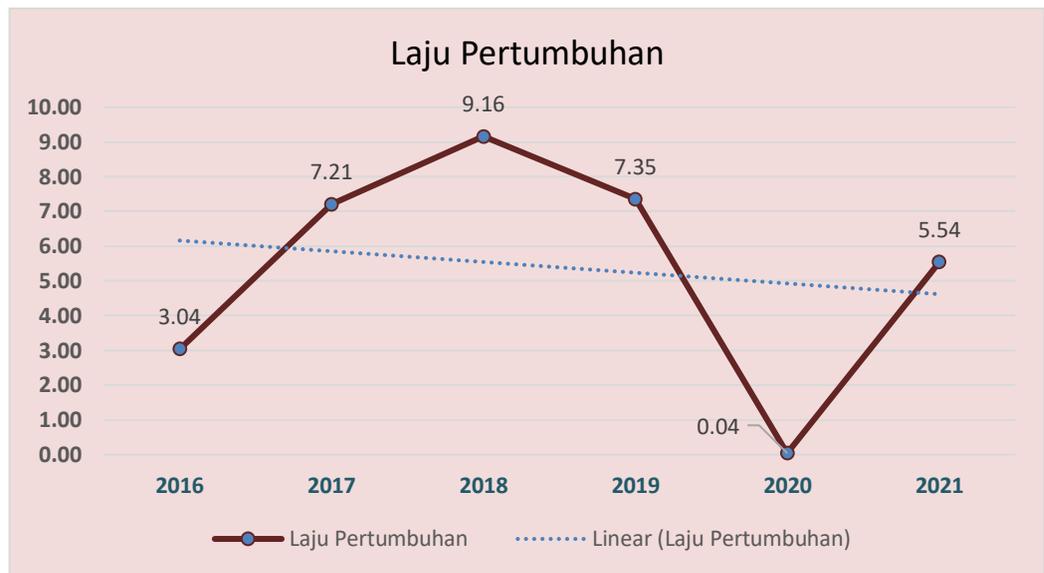


1) Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan dan Perdagangan

- Indikator : Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Laju pertumbuhan PDRB sector Industri Pengolahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah 5,54%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 17,96% sehingga capaian kinerjanya adalah 30,84%. Di Tahun 2019 yang lalu Pertumbuhan PDRB dari sektor ini walaupun terjadi penurunan tetapi tetap berada dalam angka yang optimis. Namun di tahun 2021 ini, pandemi covid-19 yang telah memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat juga sangat berdampak pada sektor ini.



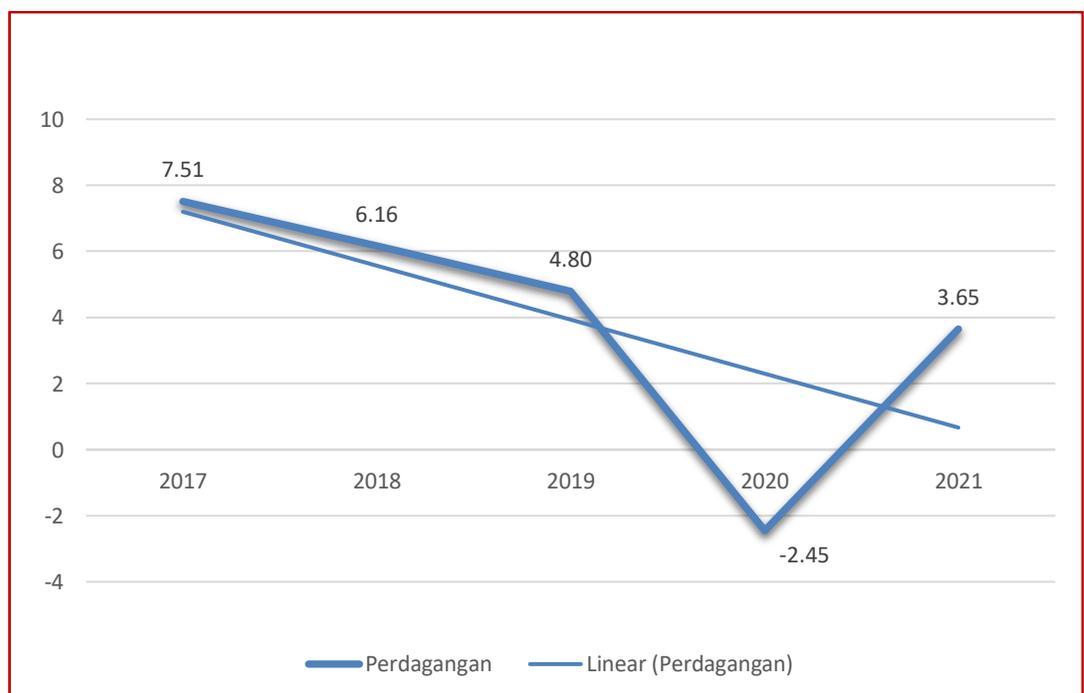
Chart. 2.13.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2021



- Indikator : Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Sektor Perdagangan Besar dan Eceran kabupaten Polewali Mandar tumbuh sebesar 3,65% yang jika dibandingkan dengan target pada tahun yang sama sebesar 14,44%, dengan capaian kinerja indikator 25,27%. Capaian tersebut mengalami perubahan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 dengan capaian -20,18%. Dari data di bawah menunjukkan bahwa trend kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB cukup stabil walaupun berfluktuasi tetapi Kembali ke titik equilibrium.

Chart. 2.14.
Trend Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021



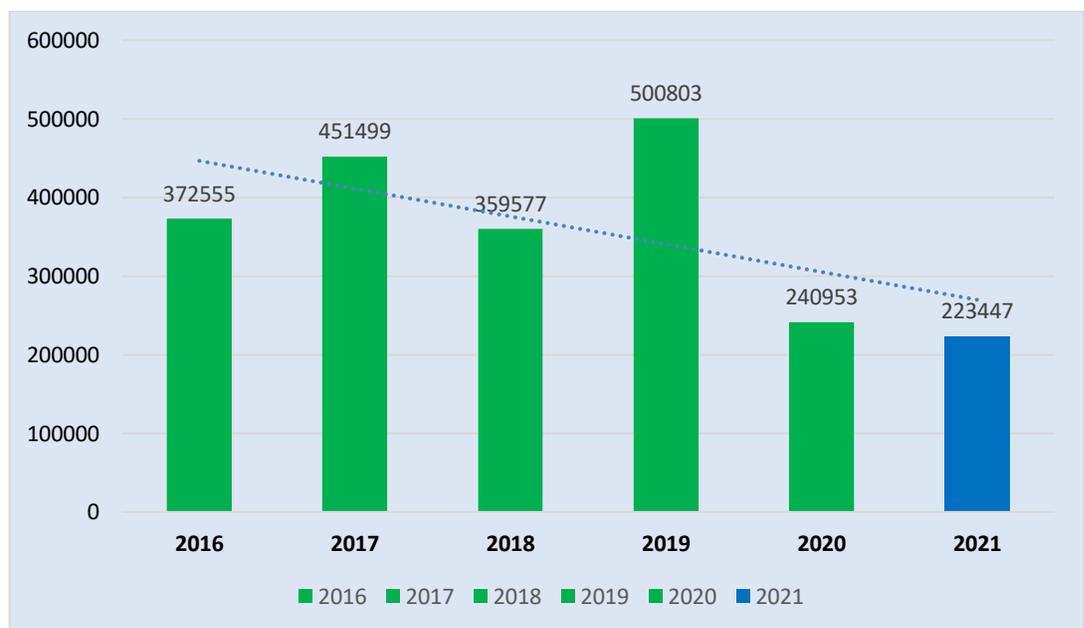


2) Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah

- Indikator : Jumlah Wisatawan

Dengan Tagline “Ayo ke Polewali Mandar”, Kabupaten Polewali Mandar berupaya secara serius mendorong adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan asing, domestik maupun lokal. Sepanjang tahun 2021, tercatat Kabupaten Polewali Mandar telah menerima kunjungan wisatawan lokal/domestik sebanyak 223.447 wisatawan dari target kunjungan sebesar 1.500.000 wisatawan atau dengan capaian hanya sebesar 14,89%. Pada tahun ini 2021, Industri Kepariwisata mengalami dampak yang sangat besar akibat Pandemi Covid-19. Pembatasan bepergian dan berlibur menyebabkan angka kunjungan wisatawan menurun secara drastis. Wisatawan yang ada hanya sebatas pada wisatawan lokal yang berkunjung dengan tetap memanfaatkan protokol kesehatan. Sebagai langkah antisipasi pasca berakhirnya pandemi Covid-19 tersebut, Kabupaten Polewali Mandar akan bekerja kembali secara aktif mempromosikan sejumlah potensi yang cukup menjanjikan sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Chart. 2.15.
Trend Perkembangan Kunjungan Wisatawan di
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2021



3) Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah

- Indikator : Indikator Nilai Investasi Daerah

capaian realisasi Nilai investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 79.507.530. , jauh lebih rendah dari target yang telah ditentukan pada tahun yang sama, yaitu Rp. 517.650.000, atau dengan persentase realisasi sebesar 15,35% sehingga diklasifikasikan dalam kategori Tidak Berhasil. Keseluruhan Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) tidak ada pada tahun 2021 ini. Nilai Investasi tersebut telah membuka lapangan kerja baru yang tersebar pada 559 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.573 orang. Jika melihat trend nilai investasi selama 6 (enam) tahun terakhir, terlihat bahwa terjadi peningkatan secara konsisten dengan nilai yang juga terus bertambah.



Chart. 2.16.
Trend Pertumbuhan Investasi
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2021

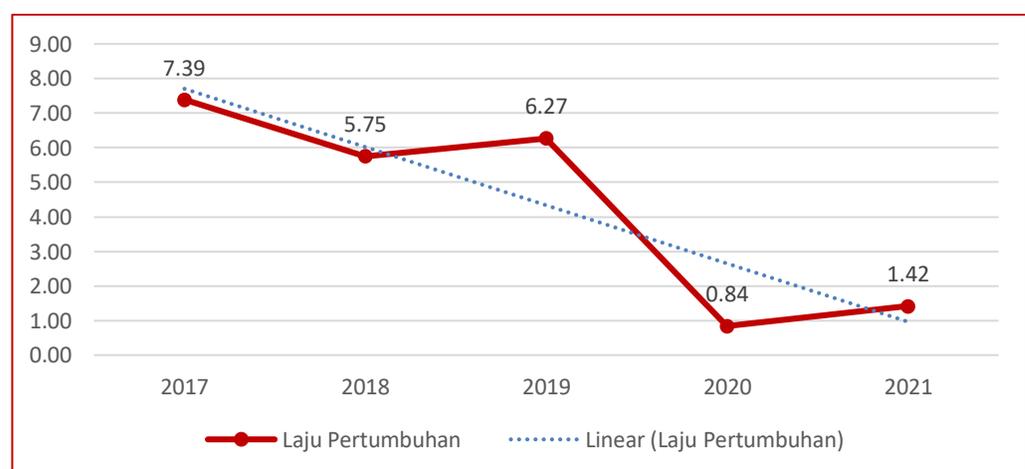


4) Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

- Indikator : Indikator Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sektor unggulan Kabupaten Polewali Mandar yang memberikan kontribusi sebesar 41,37% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Pada Tahun 2021, sektor ini telah menyumbangkan 5.710,08 triliun rupiah dari 13.800,70 triliun rupiah sehingga menjadikannya sebagai barometer perekonomian. Meningkat atau menurunnya sector ini akan mempengaruhi turun tidaknya perekonomian kabupaten secara menyeluruh. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 hanya mencapai 1,42% dari target 12,20%, sehingga capaian kinerjanya hanya 11,63% dengan kategori tidak berhasil. Perlambatan ini adalah merupakan dampak dari resesi global yang dikarenakan pandemi covid-19, dimana negara-negara dunia mengalami penurunan pertumbuhan minus dari target pertumbuhannya sehingga Kabupaten Polewali Mandar juga terdampak dengan resesi global tersebut. Namun angka di tahun 2021 tersebut lebih baik dibanding tahun 2020.

Chart. 2.17.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021





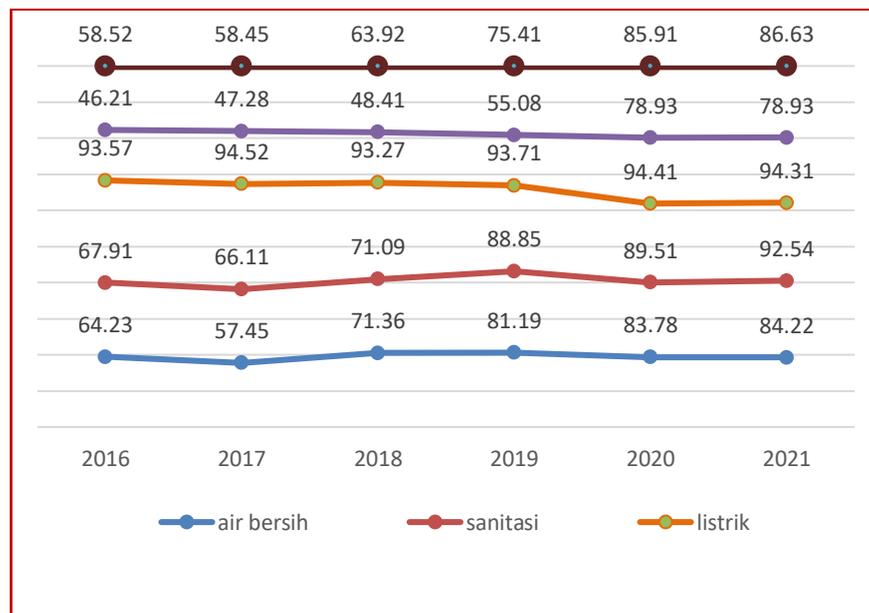
c. Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Indeks infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari data statistik menunjukkan bahwa capaian realisasi indeks infrastruktur adalah sebesar 86,63, jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu 67,97 atau dengan capaian kinerja sebesar 120,74% dengan kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini disebabkan adanya kegiatan evaluasi program dan kegiatan dengan melakukan cascading dan crosscutting kegiatan, kemudian melakukan refocusing kegiatan yang sebagiannya diarahkan Sebagian pada penambahan anggaran pada program infrastruktur. Hal ini berpengaruh pada penambahan volume kegiatan yang pada akhirnya berpengaruh pada perbaikan indeks infrastruktur.

Begitupula, selama kurun waktu 5 (lima) terakhir, indeks infrastruktur inisenantiasa mengalami peningkatan dan perbaikan secara terus menerus. Dari tahun 2016-2021, Indeks infrastruktur secara berturut-turut meningkat dari 58,52, menjadi 58,45 di tahun 2017, kemudian meningkat lagi menjadi 63,29 ditahun 2018, 75,41 di tahun 2019 dan 85,91 di tahun 2020 serta 86,63 di tahun 2021. Secara detail, peningkatan indeks Infrastruktur beserta peningkatan persentase fasilitas yang berpengaruh pada indeks infrastruktur dapat terlihat pada chart 2.18 berikut :

Chart. 2.18.

Trend Perkembangan Indeks Infrastruktur dan Persentase Fasilitas Layanan RT di Kabupaten Polewali Mandar 2016-2021



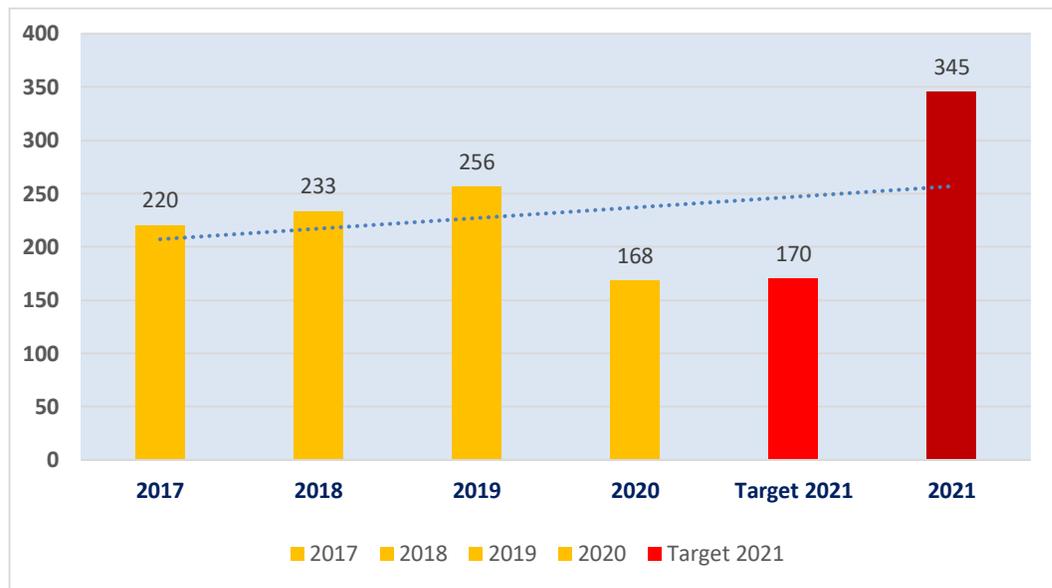
1) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi

- Indikator : Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Target Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebanyak 170 kejadian. Sepanjang tahun 2021, telah terjadi 345 kejadian, sehingga kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dari yang telah diprediksi, yaitu sebanyak 170 kejadian sehingga capaian kinerja indikatornya adalah sebesar 49,27%. Pada tahun 2020 lalu, jumlah kejadian mencapai 168 kejadian, dengan demikian ada kecenderungan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2021 meningkat drastis dibanding tahun 2020. Bahkan jumlah kecelakaan tahun 2021 adalah jumlah terbanyak dalam 5 tahun terakhir.



Chart. 2.19.
Trend Angka Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021

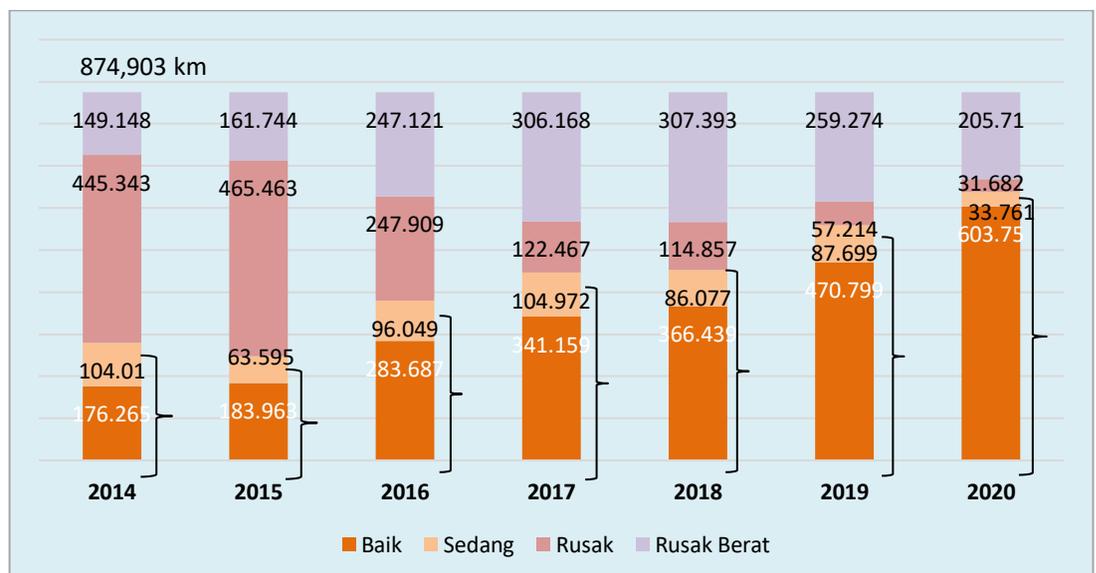


2) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

• Indikator : Persentase Kondisi Jalan Dalam Keadaan Mantap

Realisasi capaian indikator Jalan dalam kondisi Mantap Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2021 adalah 73,51%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 55,40% sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 132,68% atau dengan kategori Sangat Berhasil. Selama terdapat peningkatan kualitas jalan secara konsisten Panjang Jalan dalam kondisi mantap meningkat secara kualitas. Secara kuantitas, selama kurun waktu 8 (delapan) tahun terdapat penambahan panjang jalan, dimana pada tahun 2014 adalah 280,275 km dan pada tahun 2021 mencapai 874.766 km. Dimana kondisi jalan pada tahun 2021 yaitu jalan dengan kondisi Baik sepanjang 580.098 Km, kondisi sedang sepanjang 62.937 Km, kondisi rusak ringan sepanjang 40.375 Km, dan rusak berat sepanjang 191.356 Km.

Chart. 2.20.
Trend Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2014-2020



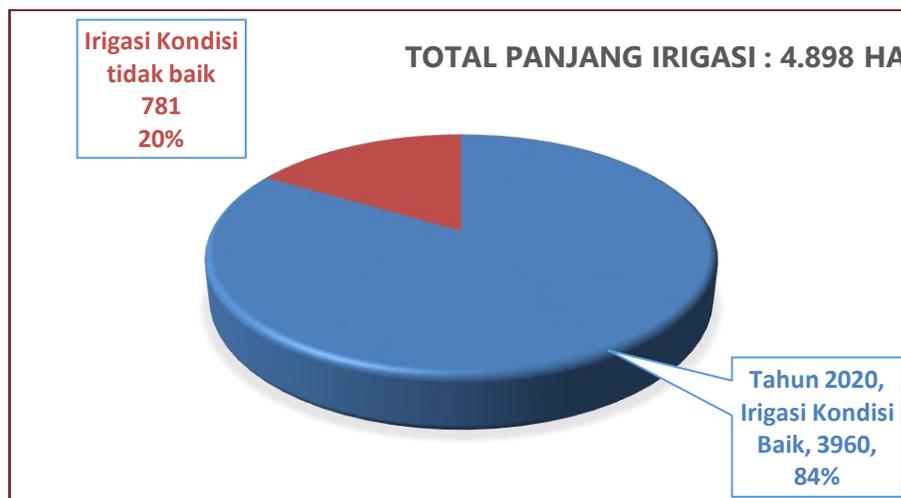
3) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

- Indikator : Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Realisasi persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di tahun 2021 adalah sebesar 73,04%. Sedangkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80,87% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 90,31% dengan kategori Berhasil.

Chart. 2.21.

Rasio Irigasi dalam kondisi baik terhadap Total Jaringan Irigasi 2021



4) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

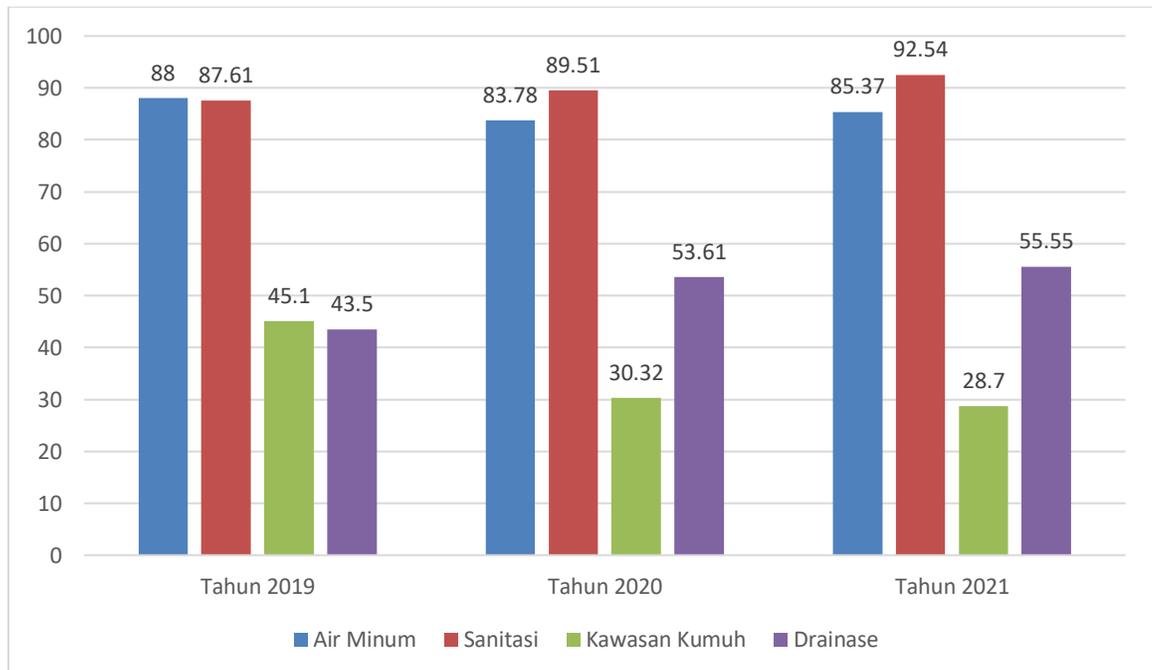
- Indikator : Indeks Infrastruktur Permukiman

Indeks Infrastruktur Permukiman adalah pendekatan untuk mengukur tingkat kualitas infrastruktur permukiman. Nilai indeks ini didapatkan dari rata-rata persentase Rumah Tangga yang telah terlayani dari 4 komponen utama, yaitu layanan air minum, layanan sanitasi, layanan listrik (PLN dan non PLN) dan layanan telepon. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Capaian Indeks Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah 86,87% dari target indikator sebesar 71,88% atau dengan capaian kinerja sebesar 120,85%. Upaya penanganan Permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah dengan memenuhi standar sarana prasarana permukiman. Prasarana dimaksud adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk memenuhi tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan sarana dimaksudkan berupa fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan bantuan berupa jamban, sanitasi, air bersih dan lampu jalan pada lokasi perumahan kumuh. Data di bawah ini menunjukkan bahwa dari 4 jenis layanan, terlihat bahwa secara umum, Indeks infrastruktur Pemukiman pada tahun 2021 mengalami peningkatan.



Chart. 2.22.

Trend Perkembangan Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2019-2021



d. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

- Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

capaian realisasi pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah 65,363 dari target 67,00 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 97,55 % atau dengan kategori berhasil. Dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2020 ada sedikit penurunan dari tahun 2021, Dimana pada tahun 2020 yaitu 68,55%. Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan tersebut dan menciptakan kondisi perkotaan yang nyaman, sejuk dan segar, pemanfaatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus pembangunan. RTH dimaksudkan agar tersedia ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis dan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan dan berbagai kegunaan lainnya untuk kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.11.

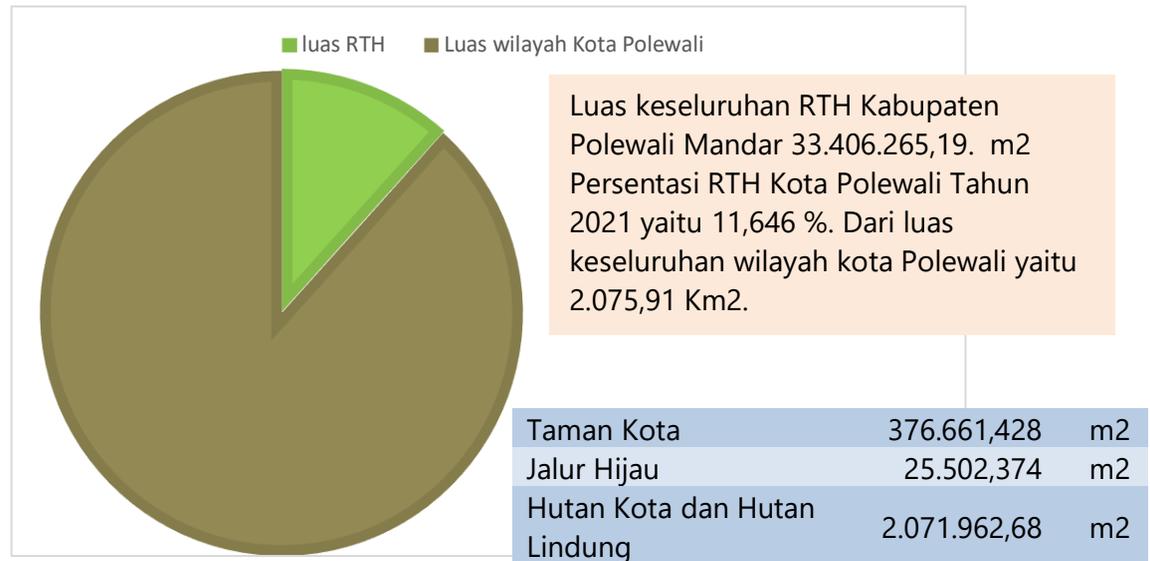
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Jenis Komponen	Nilai Indeks
1	Indeks Kualitas Air	52,58
2	Indeks Kualitas Udara	88,56
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,41
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		65,363

Adapun Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Polewali tahun 2021, dapat digambarkan pada chart 2.23 sebagai berikut :



Chart. 2.23.
RTH Tahun 2021



e. Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

1) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

- Indikator : Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Capaian Kinerja SAKIP Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor : B/572/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dengan nilai sebesar 70,76 dengan predikat BB, yaitu predikat dengan interpretasi baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan hasil yang sangat baik. Sampai pada saat laporan dibuat, hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 belum dipublikasikan.

Chart. 2.24.
Capaian Kinerja SAKIP Tahun 2015-2020

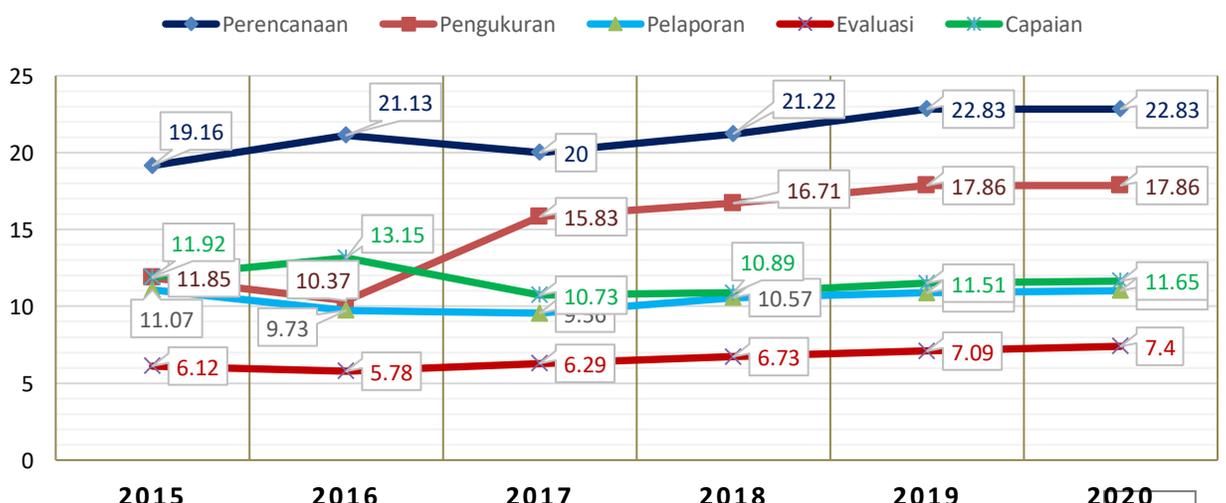
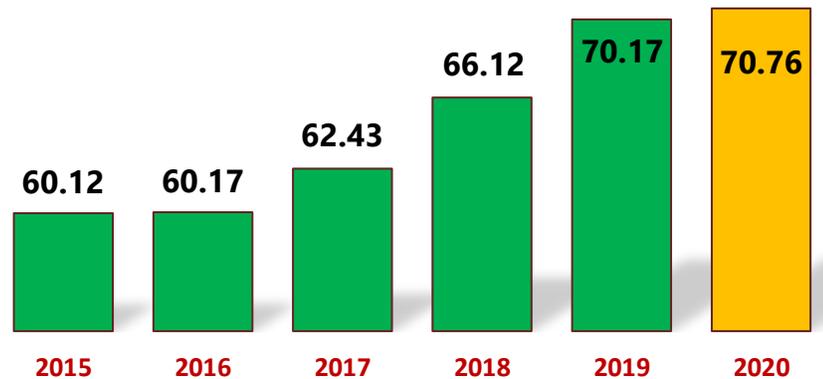




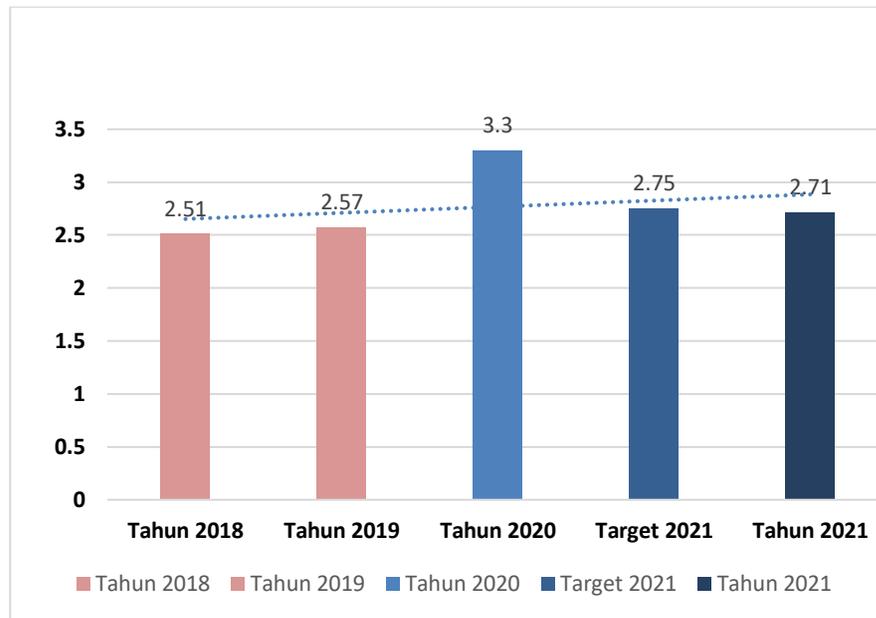
Chart. 2.25.
Trend Capaian Predikat Kinerja SAKIP Tahun 2015-2020



- Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut opini BPK, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Indikator : Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Kriteria Tujuan Penyelenggaraan Penerapan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Laporan hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-172.a/ltkab/700/09/2018 Tanggal 7 september 2018 Hal Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP dengan nilai maturitas sebesar 3,427. Dan pada tahun 2021, setelah mendapatkan Quality Assurance (QA) dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat (sebelum QA BPKP Pusat), nilai maturitas SPIP adalah 3.114. Nilai maturitas dengan Nilai 3.114 tersebut berlaku sampai adanya penilaian dari BPKP Pusat, maka capaian kinerja tingkat maturitas SPIP pada tahun 2021 hampir mencapai target 3.152 yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu sebesar 98,79% atau dengan kategori Berhasil.
- Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE, seperti yang tertuang di dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2021, capaian realisasi indeks SPBE Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar 2,71 dari target 2,75 sehingga kinerja capaian indikator indeks SPBE adalah 98,55% dengan kategori Berhasil.



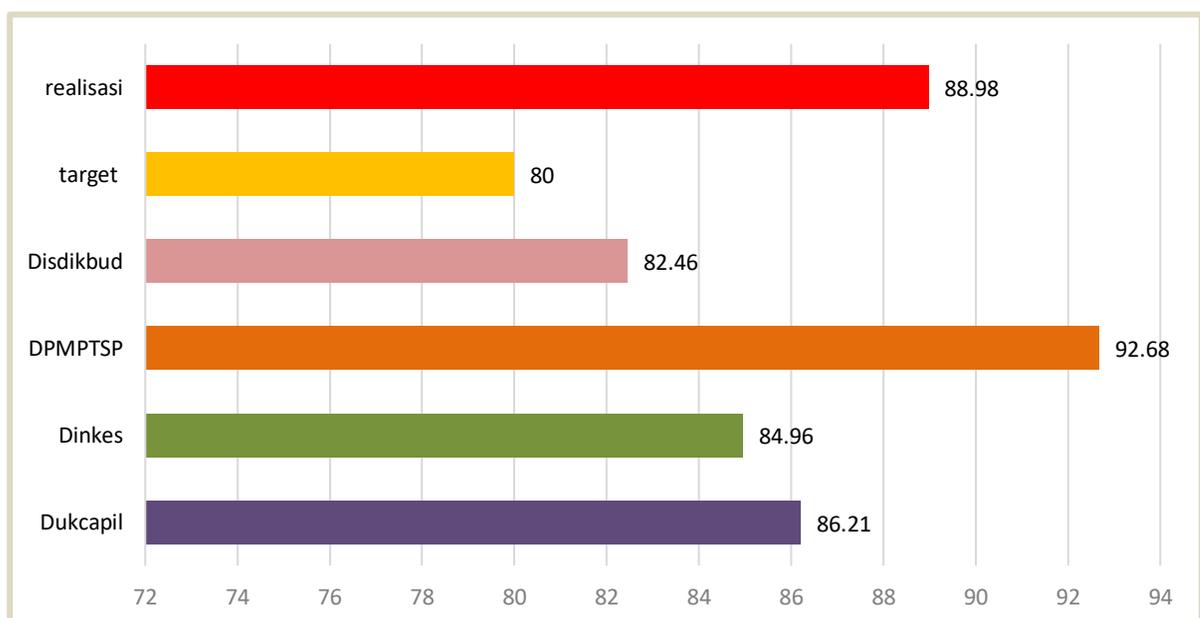
Chart. 2.26.
Indeks SPBE 2021



• Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman : B/200/px-02/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 Hal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Nilai Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebesar 88,98 meningkat 5,61 poin dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori “tingkat kepatuhan tinggi” atau berada pada zona hijau.

Chart. 2.27.
Hasil Survey Kepatuhan Atas Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Sulbar

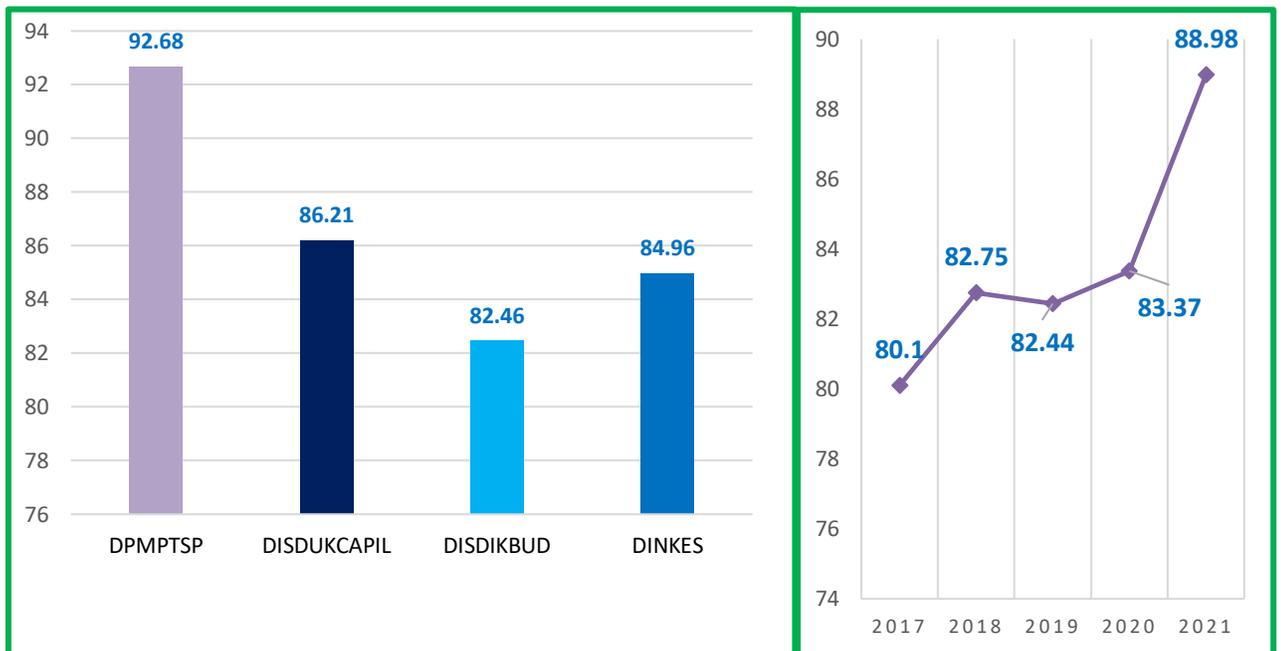


Secara umum, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:



Chart. 2.28.

Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021



2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Dimana dalam pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target di dalam RPJMD masih mengukur di 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 2.12.



Tabel 2.12.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD 2019-2024)

MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius												
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	14,00	13,00	12,00	10,75	9,50	8,00	15,68	76,53 %
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	Angka	67,30	67,98	68,65	69,33	70,00	70,68	68,98	100,48 %
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,86	3,81	3,75	3,70	3,64	3,59	3,38	110,94 %
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan harapan	Angka	81,22	83,41	85,61	87,80	90,00	92,20	87,87	102,63 %
			Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rupiah	769.693	788.935	808.659	828.875	849.597	870.597	804.358	99,46 %
		Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	4,86	9,72	14,58	19,44	25,00	30,56	8,33	57,13 %
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,30	7,40	7,51	7,62	7,72	7,83	7,44	99,06 %
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,61	13,90	14,20	14,50	14,80	15,10	13,38	94,22 %
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,21	62,53	99,90 %
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	91,75	92,01	92,27	92,54	92,80	93,07	91,56	99,23 %
Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	predikat		Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	Pratama	100 %		



MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah												
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	10,93	14,45	17,96	21,48	24,99	28,51	5,54	30,84 %
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	9,85	12,14	14,44	16,73	19,03	21,33	3,65	25,27 %
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	Orang	800.000	1.100.000	1.500.000	1.700.000	2.200.000	2.400.000	223.447	14,89 %
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah	Milyar	172.650.	192.985.	215.350.	239.650.	262.000.	284.350.	79.507.530.000	36920,14
		Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	Persen	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	16,40	1,42	11,63 %
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan												
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan system transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	220	200	170	150	120	90	345	49,27 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	48,77	51,60	55,40	60,60	65,61	71,11	73,51	132,68 %
		Meningkatnya Infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	78,00	79,97	80,87	81,67	83,82	84,82	73,04	90,31 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	67,48	70,12	71,88	73,59	75,30	77,10	86,87	120,85 %



4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	persen	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	73,00	65,363	97,55 %	
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern													
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA	
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	BB	75,00 %	
			Opini Pengelolaan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100 %						
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal SPIP)	Angka	3.076	3,114	3,152	3,190	3,228	3,268	3,114	98,79 %	
			Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,17	2,71	98,55 %	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100 %

Sumber Data : Balitbangren Kab. Polewali Mandar 2022



2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana. Berikut diuraikan analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian setiap tujuan visi misi Kabupaten Polewali Mandar.

a. Tujuan 1. Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Ada 7 (tujuh) Sasaran strategis pada tujuan ini yaitu :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Indikator kinerja Angka kemiskinan. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.028.109.088,- dengan realisasi Rp. 1.024.093.493,- atau 99,61%. Adapun persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,39%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing program dan kegiatan yang kurang mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Perbaikan data kemiskinan agar bantuan kemiskinan tepat sasaran.
- ✓ Sasaran strategis berkurangnya pengangguran dengan Indikator kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.183.512.900,- dengan realisasi Rp. 1.170.006.056,- atau 98,86%. Adapun persentase efisiensi serapan anggaran adalah 1,14%.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan, dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan dan Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000.200,- dengan realisasi Rp. 1.199.900.200,- atau 99,99%. Sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,01%. Memaksimalkan peran penyuluh pertanian dengan terus meningkatkan pendampingan warga rawan pangan serta monitoring, evaluasi dan analisa kondisi konsumsi pangan pada masyarakat di wilayah kerjanya merupakan upaya yang dilakukan dalam efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat serangan hama babi pada tanaman khususnya pada tanaman jagung dan kedelai, pemerintah memberikan kepada kelompok tani sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (perangkap babi).
- ✓ Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal, dengan Indikator Kinerja Persentase desa maju dan mandiri. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 313.948.300,- dengan realisasi Rp. 313.001.129,- atau 99,70%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,30%. Untuk efisiensi sumber daya manusia dan untuk meningkatkan SDM Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa telah dilakukan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimtek, dan workshop berkenaan dengan sasaran tersebut.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 120.273.135.949,- dengan realisasi Rp. 115.636.123.608,- atau 96,14%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 3,86%. Sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada yaitu masih adanya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung khususnya di daerah terpencil adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan desa, sarana prasarana pendidikan serta rasio guru-murid dan rasio kelas-murid.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan, dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH). Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 146.784.682.638,- dengan realisasi Rp. 131.514.544.578,- atau 89,60% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 10,40%. Untuk memudahkan pelayanan kesehatan dan perawatan khususnya terhadap ibu hamil



maka dilakukan pemanfaatan aplikasi Kawal Ibu Hamil sehingga kerjasama dan komunikasi dalam penyelesaian masalah-masalah Ibu Hamil beresiko tinggi dapat segera diatasi. Stakeholder selain dari jajaran Dinas Kesehatan, juga dapat mengakses Data hasil Aplikasi Kawal Ibu Hamil, seperti oleh Kepala Desa, Camat, Polsek, dan Rumah Sakit. Selain itu, perlunya juga peningkatan standarisasi Puskesmas dan Rumah Sakit melalui Akreditasi.

- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak anak (KLA). Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 659.491.000,- dengan realisasi Rp. 363.483.400,- atau 55,12%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 44,88%. Sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok dan kader.

b. Tujuan 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas

Ada 4 (empat) Sasaran strategis pada tujuan ini yaitu :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan, dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan Indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 5.174.201.350,- dengan realisasi Rp. 5.150.950.950,- atau 99,55% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,45%. Fasilitasi peningkatan SDM pelaku industri melalui pelatihan dan pendampingan terus ditingkatkan, disertai pula pendampingan untuk pembuatan kemasan hasil industri sehingga tampilan kemasan produk tidak kalah dengan produk kemasan yang sudah akrab di konsumen. Bantuan teknologi secara berkelanjutan pada kelompok-kelompok industri binaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah, dengan Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.209.997.500,- dengan realisasi Rp. 1.199.760.700,- atau 99,15% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,85%. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten memanfaatkan SDM lokal dan terus mendorong pembinaan komunitas-komunitas pariwisata di sejumlah desa yang menjadi tujuan obyek wisata.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Investasi Daerah, dengan Indikator Kinerja Nilai realisasi investasi daerah. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 664.521.000,- dengan realisasi Rp. 638.474.785,- atau 96,08% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 3,92%. Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang oleh kegiatan promosi investasi yang efektif yaitu dengan mengikuti event pameran promosi investasi secara terpadu. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif. Ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 14.628.429.300,- dengan realisasi Rp. 14.223.317.619,- atau 97,23% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 2,77%. Pemberian kegiatan-kegiatan pelatihan, penyuluhan dan peningkatan Kerjasama dengan Agro Techno Park yang telah melakukan penerapan teknologi BATAN merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM yang bekerja dibidang Pertanian, kehutanan dan perikanan, khususnya nelayan tangkap. Selain



itu, diperkenalkan juga teknologi tepat guna dan teknologi modern yang dapat mereka gunakan.

c. Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Ada 4 (empat) Sasaran strategis pada tujuan ini yaitu :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi, dengan Indikator Kinerja Angka kecelakaan lalu lintas. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.902.243.924,- dengan realisasi Rp. 1.902.061.250,- atau 99,99%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 0,01%. Melihat Pemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan masih minim maka dilakukan upaya peningkatan pemanfaatan terminal dan pengujian kendaraan serta Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sapsras perhubungan.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, dengan Indikator Kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 43.993.304.780,- dengan realisasi Rp. 39.409.503.929,- atau 89,58% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 10,42%. Untuk mengefisienkan anggaran maka penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/ penggantian jalan disesuaikan dengan prioritas dan anggaran yang tersedia.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi, dengan Indikator Kinerja Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 6.122.542.948,- dengan realisasi Rp. 4.922.161.567,- atau 80,39% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 19,61%.
- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman, dengan Indikator Kinerja Indeks infrastruktur pemukiman. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 31.393.630.100,- dengan realisasi Rp. 30.012.131.881,- atau 95,60% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 4,40%.

d. Tujuan 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ini memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 17.070.865.700,- dengan realisasi Rp. 15.346.811.208,- atau 89,90% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 10,10%. Berbagai solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan dan kendala diantaranya, Sosialisasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup kepada para pengusaha dan investor industri yang berpotensi mengancam kualitas lingkungan hidup, meningkatkan intensitas pemantauan kualitas air, tanah dan udara serta memperketat penerapan kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan hidup, misalnya dalam hal rencana tata ruang, alih fungsi lahan pertanian, ijin mendirikan bangunan, kebijakan limbah usaha dan sebagainya.

e. Tujuan 5. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Tujuan ini memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Predikat SAKIP, Opini Pengelolaan Keuangan daerah, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah anggaran dialokasikan pada sasaran tersebut yang terdiri dari berbagai program dan kegiatan yaitu sebesar Rp. 1.006.414.515.675,- dengan realisasi Rp. 954.856.891.893,- atau 94,88% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 5,12%. Dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dilakukan



meningkatkan pelaksanaan pendampingan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi manajemen aset dan manajemen keuangan, menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis akrual, dan melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap SKPD dan Pendampingan intensif dari BPKP dalam proses pengintegrasian SIMDa Keu dan Simda Perencanaan tersebut. Dalam pengelolaan Aset Daerah, dilakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk mengoptimalkan membangun SAKIP di perangkat daerah dilakukan pendampingan secara berkelanjutan pada Perangkat Daerah untuk membangun SAKIP di lingkungan kerja perangkat daerah. Selain itu dilakukan juga pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan survey kepuasan serta pendampingan pengembangan sistem informasi pelayanan publik agar sistem informasi pelayanan publik memadai di seluruh unit pelayanan publik.

2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian implementasi visi dan misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan, sasaran dan indikator. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada isu-isu strategis. Terdapat beberapa program dan kegiatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 89 program dan 161 Kegiatan. Adapun analisis dari program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

a. Tujuan 1. Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Tujuan ini memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 21 program dan 42 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Angka Kemiskinan telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan. Serangkaian program dan kegiatan tersebut adalah Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Program Rehabilitasi Sosial Dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dengan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dengan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota. Dari keseluruhan program dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 99,61%. Adapun kendala yang dihadapi adalah upaya jangka pendek pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan keluarga harapan, bantuan Rastra dan semacamnya tidak serta merta dapat mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

2.13.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	110.000.000	106.833.700	97,12



1.1.	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	10.000.000	9.770.000	97,70
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	10.000.000	9.770.000	97,70
1.2.	Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / kota	100.000.000	97.063.700	97,06
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	97.063.700	97,06
2	Program Rehabilitasi Sosial	192.849.700	192.753.320	99,95
2.1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	192.849.700	192.753.320	99,95
-	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	172.850.000	172.753.620	99,94
-	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	19.999.700	19.999.700	100,00
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	710.259.788	709.907.473	99,95
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	710.259.788	709.907.473	99,95
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	710.259.788	709.907.473	99,95
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.999.600	14.599.000	97,33
4.1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	14.999.600	14.599.000	97,33
-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.999.600	14.599.000	97,33
TOTAL		1.028.109.088	1.024.093.493	99,61

- ✓ Sasaran strategis berkurangnya pengangguran dengan Indikator kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian realisasi anggaran 99,90% dengan salah satu kegiatan Penyadaran Pemberdayaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran mencapai 99,25%. Salah satu kegiatannya adalah Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan capaian realisasi anggaran 97,46%. Adapun salah satu kegiatannya adalah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



2.14.

Program Kegiatan Sasaran Strategis Berkurangnya Pengangguran

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	314.999.900	314.680.044	99,90
1.1.	Penyadaran Pemberdayaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	190.000.000	189.936.044	99,97
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	190.000.000	189.936.044	99,97
1.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.999.900	124.744.000	99,80
-	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	124.999.900	124.744.000	99,80
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	494.327.000	490.631.700	99,25
2.1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	494.327.000	490.631.700	99,25
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	103.027.000	99.588.900	96,66
-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	391.300.000	391.042.800	99,93
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	374.186.000	364.694.312	97,46
3.1.	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	330.511.312	97,21
-	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	315.000.000	305.556.312	97,00
-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.000.000	24.955.000	99,82
3.2.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	34.186.000	34.183.000	99,99
-	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	34.186.000	34.183.000	99,99
TOTAL		1.183.512.900	1.170.006.056	98,86

- ✓ Sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan dan Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran mencapai 99,99%. Kegiatan dari program ini adalah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target



Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2.15.

Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.164.000.000	1.163.900.000	99,99
1.1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.000.000	8.000.000	100,00
-	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8.000.000	8.000.000	100,00
1.2.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.156.000.000	1.155.900.000	99,99
-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.140.000.000	1.139.900.000	99,99
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	36.000.200	36.000.200	100,00
2.1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.776.100	21.776.100	100,00
-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.776.100	21.776.100	100,00
2.2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.224.100	14.224.100	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	14.224.100	14.224.100	100,00
TOTAL		1.200.000.200	1.199.900.200	99,99

- ✓ Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal, dengan Indikator Kinerja Persentase desa maju dan mandiri telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 1 (satu) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi anggaran mencapai 99,98% serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi anggaran mencapai 99,51%. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Kegiatan Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program dan Kegiatan serta masing-masing Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



2.16.

Program Kegiatan Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	123.948.300	123.926.500	99,98
-	Fasilitasi pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83.079.000	83.078.500	100,00
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.869.300	40.848.000	99,95
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	190.000.000	189.074.629	99,51
2.1	Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	189.074.629	99,51
-	Koordinasi dan Singkronisasi Kerja Sama Pembagunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) daerah Kabupaten Kota	90.000.000	89.884.800	99,87
-	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	45.000.000	44.620.800	99,16
-	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	12.000.000	11.637.129	96,98
-	Penyuluhan Transmigrasi	35.000.000	34.931.900	99,81
-	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	8.000.000	8.000.000	100,00
TOTAL		313.948.300	313.001.129	99,70

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 96,20%, dengan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan realisasi anggaran sebesar 30,06%, dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Adapun kendala yang dihadapi adalah cukup banyak sekolah yang berada di desa terpencil, dengan sarana dan prasarana jalan yang belum baik dan kondisi sarana prasarana pendidikan yang juga kurang memadai. Kondisi ini berpotensi turut memicu angka putus sekolah, dalam artian masih cukup banyak usia di atas 25 tahun yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah dasar.



2.17.

Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	120.173.136.349	115.606.067.608	96,20
1.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90.235.142.649	87.613.785.053	97,09
-	Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru	3.652.470.000	3.430.467.290	93,92
-	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.581.756.000	3.397.963.952	94,87
-	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	831.038.000	787.258.668	94,73
-	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.201.494.000	1.949.759.855	88,57
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.499.510.000	7.108.541.660	94,79
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	325.149.000	308.484.380	94,87
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	2.105.862.000	2.018.332.051	95,84
-	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	111.271.000	110.071.000	98,92
-	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.680.000.000	1.638.900.000	97,55
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	338.999.600	296.031.200	87,32
-	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	595.998.100	499.468.500	83,80
-	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	362.998.086	334.822.980	92,24
-	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	66.948.596.863	65.733.683.517	98,19
1.2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.936.751.000	10.178.252.855	93,06
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.508.827.000	6.946.300.626	92,51
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah	828.094.000	777.105.311	93,84
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.017.548.000	951.425.008	93,50
-	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	988.692.000	930.021.910	94,07
-	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	593.590.000	573.400.000	96,60
1.3.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.848.343.100	13.565.680.100	97,96
-	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	520.000.000	448.384.600	86,23



-	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.572.143.500	1.511.720.500	96,16
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.756.199.600	11.605.575.000	98,72
1.4.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.152.899.600	4.248.349.600	82,45
-	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	5.152.899.600	4.248.349.600	82,45
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	99.999.600	30.056.000	30,06
2.1.	Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.999.600	30.056.000	30,06
-	Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.999.600	30.056.000	30,06
TOTAL		120.273.135.949	115.636.123.608	96,14

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan, dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 89,18% terdiri dari 4 kegiatan. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar 90,69% terdiri dari 3 kegiatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 73,05% terdiri dari 3 kegiatan. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,84% terdiri dari 3 kegiatan. Program Pengendalian Penduduk dengan realisasi anggaran sebesar 99,89% terdiri dari 2 kegiatan. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan realisasi anggaran sebesar 98,19% terdiri dari 4 kegiatan. Diantara kendala yang dihadapi adalah Kondisi geografis masih menjadi kendala utama untuk mendukung pelayanan kesehatan pada daerah-daerah terpencil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2.18.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138.550.944.283	123.563.318.213	89,18
1.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	34.737.100.587	31.872.794.782	91,75
-	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.889.226.300	1.843.396.782	97,57
-	Pembangunan Puskesmas	8.558.645.150	8.206.446.187	95,88
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.396.527.281	2.396.527.281	100,00
-	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.443.615.700	594.024.509	41,15



-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.993.698.656	11.269.889.967	93,97
-	Pengadaan Obat, Vaksin	8.390.972.500	7.505.540.656	89,45
-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.415.000	56.969.400	88,44
1.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.586.628.796	91.465.884.331	88,30
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.091.233.140	702.219.300	64,35
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	38.545.100	38.520.100	99,94
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	68.887.907.230	65.916.104.253	95,69
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.833.619.823	18.056.010.041	75,76
-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000	979.633.834	97,96
-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.923.910	150.923.910	100,00
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.317.821.000	717.280.000	54,43
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.243.680	66.047.100	99,70
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.708.626.000	1.446.266.826	84,65
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.820.378	63.738.000	87,53
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.178.710	33.130.000	91,57
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.000.003	15.640.000	92,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.886.860	103.562.610	99,69
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.505.000	36.834.700	98,21
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.829.645	15.822.500	99,95
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	9.000.000	9.000.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	50.210.800	45.737.705	91,09
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	77.997.465	62.340.700	79,93
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	59.248.479	58.930.705	99,46
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	51.312.521	48.486.600	94,49
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	153.000.000	142.044.000	92,84
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.369.920	38.173.992	80,59



-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	212.686.822	192.898.700	90,70
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.696.451.165	2.259.783.855	61,13
-	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	851.211.145	266.754.900	31,34
1.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	138.760.000	138.119.800	99,54
-	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	108.760.000	108.134.800	99,43
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30.000.000	29.985.000	99,95
1.4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	88.454.900	86.519.300	97,81
-	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.332.900	38.899.300	96,45
-	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	48.122.000	47.620.000	98,96
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	513.558.600	465.742.050	90,69
2.1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000	14.920.000	99,47
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000	14.920.000	99,47
2.2.	Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	498.558.600	450.822.050	90,43
-	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	498.558.600	450.822.050	90,43
2.3.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, dan Depot Air Mimum (DAM)	0	0	0
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	468.752.955	342.426.960	73,05



3.1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
-	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
3.2.	Pelaksanaan dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	390.752.955	264.706.460	67,74
-	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	390.752.955	264.706.460	67,74
3.3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.000.000	77.720.500	99,64
-	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.000.000	77.720.500	99,64
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.274.999.800	1.272.914.391	99,84
4.1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	224.952.500	224.612.800	99,85
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	224.952.500	224.612.800	99,85
4.2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.047.300	749.523.539	99,93
-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event Tingkat Kabupaten/Kota	300.047.300	299.523.539	99,83
-	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	450.000.000	450.000.000	100,00
4.3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	300.000.000	298.778.052	99,59
-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	300.000.000	298.778.052	99,59
5.	Program Pengendalian Penduduk	101.000.000	100.888.500	99,89
5.1.	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	51.000.000	50.999.800	100,00
-	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	20.000.000	20.000.000	100,00
-	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	31.000.000	30.999.800	100,00
5.2.	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.888.700	99,78



-	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	30.000.000	30.000.000	100,00
-	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	20.000.000	19.888.700	99,44
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.875.427.000	5.769.254.464	98,19
6.1.	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	33.890.000	33.809.400	99,76
-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	33.890.000	33.809.400	99,76
6.2.	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.808.427.000	5.702.335.064	98,17
-	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.808.427.000	5.702.335.064	98,17
6.3.	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	11.110.000	11.110.000	100,00
-	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	11.110.000	11.110.000	100,00
6.4.	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	22.000.000	22.000.000	100,00
-	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	22.000.000	22.000.000	100,00
TOTAL		146.784.682.638	131.514.544.578	89,60

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak anak (KLA) telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi anggaran mencapai 95,69% dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi anggaran mencapai 31,25%. Sedangkan kegiatan yang mendukung program-program tersebut adalah Kegiatan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun kendala yang sering dihadapi adalah Kasus-kasus Kekerasan terhadap anak banyak yang diselesaikan secara musyawarah mufakat yang memungkinkan kurangnya intervensi Pemerintah untuk memberikan efek jera dan contoh keras atas setiap kekerasan terhadap anak.



2.19.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	244.240.000	233.715.700	95,69
1.1.	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	38.844.000	97,11
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20.000.000	19.421.700	97,11
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000	19.422.300	97,11
1.2.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204.240.000	194.871.700	95,41
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204.240.000	194.871.700	95,41
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	415.251.000	129.767.700	31,25
2.1.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	415.251.000	129.767.700	31,25
-	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	79.933.600	99,92
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.251.000	49.834.100	14,86
TOTAL		659.491.000	363.483.400	55,12

b. Tujuan 2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas

Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 19 program dan 34 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan, dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan Indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) program dan 8 (delapan) kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% yang terdiri dari 2 kegiatan. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan realisasi



anggaran sebesar 99,33% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 99,89% yang terdiri dari 2 kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah kualitas produksi dari industri kecil belum mampu bersaing secara kualitas, terutama dengan industri besar. Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.20.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha
Industri Pengolahan dan Perdagangan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	37.500.000	37.500.000	100,00
1.1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	37.500.000	37.500.000	100,00
-	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.500.000	37.500.000	100,00
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	37.500.000	37.500.000	100,00
2.1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	37.500.000	37.500.000	100,00
-	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	37.500.000	37.500.000	100,00
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.215.000.000	1.214.863.400	99,99
3.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.190.000.000	1.189.875.100	99,99
-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.190.000.000	1.189.875.100	99,99
3.2.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25.000.000	24.988.300	99,95
-	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	24.988.300	99,95
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	200.000.000	200.000.000	100,00
4.1.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	200.000.000	200.000.000	100,00
-	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	30.000.000	30.000.000	100,00
-	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	170.000.000	170.000.000	100,00
5.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.392.403.000	3.369.608.400	99,33
5.1.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.392.403.000	3.369.608.400	99,33



-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	30.000.000	30.000.000	100,00
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	95.116.000	94.097.400	98,93
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.000.292.000	2.978.566.000	99,28
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	191.995.000	191.945.000	99,97
-	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	75.000.000	75.000.000	100,00
6.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	291.798.350	291.479.150	99,89
6.1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	160.000.000	159.750.000	99,84
-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penetapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	160.000.000	159.750.000	99,84
6.2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	131.798.350	131.729.150	99,95
-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.799.900	101.730.700	99,93
-	Pemberian fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.998.450	29.998.450	100,00
TOTAL		5.174.201.350	5.150.950.950	99,55

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah, dengan Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan. Program tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian realisasi anggaran 97,76% dengan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian realisasi anggaran 99,00% dengan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30% dengan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik sangat berkurang, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga tidak mencapai target. Untuk lebih rincinya mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



2.21.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274.999.900	274.351.800	99,76
1.1.	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	125.000.000	124.428.000	99,54
-	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	125.000.000	124.428.000	99,54
1.2.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	149.999.900	149.923.800	99,95
-	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	149.999.900	149.923.800	99,95
2.	Program Pemasaran Pariwisata	904.999.900	895.921.000	99,00
2.1.	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	904.999.900	895.921.000	99,00
-	Fasilitasi kegiatan pemasran baik dalm dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota	850.000.000	841.337.900	98,98
-	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	54.999.900	54.583.100	99,24
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	29.997.700	29.487.900	98,30
3.1.	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	29.997.700	29.487.900	98,30
-	Sub Kegiatan : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	29.997.700	29.487.900	98,30
TOTAL		1.209.997.500	1.199.760.700	99,15

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah, dengan Indikator Kinerja Nilai realisasi investasi daerah telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran mencapai 92,17% dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran mencapai 99,77% dengan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kendala yang sering dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menyampaikan LKPM secara rutin.



2.22.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322.573.000	297.314.500	92,17
1.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	322.573.000	297.314.500	92,17
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	136.800.000	126.303.700	92,33
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	171.010.800	92,05
2.	Program Promosi Penanaman Modal	341.948.000	341.160.285	99,77
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	341.948.000	341.160.285	99,77
-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	159.474.000	158.840.675	99,60
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	182.474.000	182.319.610	99,92
TOTAL		664.521.000	638.474.785	96,08

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan telah melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Program tersebut adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Sedangkan Kegiatan yang mendukung diantaranya adalah kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.23.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan
Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	959.200.000	852.509.200	88,88
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	837.200.000	730.509.200	87,26
-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	37.800.000	37.800.000	100,00



-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	799.400.000	692.709.200	86,65
1.2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	106.000.000	106.000.000	100,00
-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	40.000.000	40.000.000	100,00
-	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	50.000.000	50.000.000	100,00
1.3.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16.000.000	16.000.000	100,00
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.464.230.980	6.444.389.200	99,69
2.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	79.993.800	79.993.800	100,00
-	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	48.000.000	48.000.000	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	31.993.800	31.993.800	100,00
2.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.384.237.180	6.364.395.400	99,69
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.140.000.000	1.140.000.000	100,00
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.182.359.680	2.180.707.400	99,92
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	770.000.000	770.000.000	100,00
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2.250.000.000	2.231.810.500	99,19
-	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	41.877.500	41.877.500	100,00
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.974.229.300	1.711.920.300	86,71
3.1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.000.000	46.000.000	100,00
-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00
3.2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	32.000.000	100,00



-	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	32.000.000	32.000.000	100,00
3.3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	28.000.000	100,00
-	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	28.000.000	28.000.000	100,00
3.4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.856.229.300	1.593.920.300	85,87
-	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	55.999.400	55.999.400	100,00
-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1.800.229.900	1.537.920.900	85,43
3.5.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	12.000.000	12.000.000	100,00
-	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12.000.000	12.000.000	100,00
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	503.698.000	503.512.640	99,96
4.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	503.698.000	503.512.640	99,96
-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	171.806.000	171.734.240	99,96
-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30.000.000	30.000.000	100,00
-	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	30.400.000	30.400.000	100,00
-	Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis	242.599.700	242.486.100	99,95
-	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.892.300	28.892.300	100,00
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	48.000.000	48.000.000	100,00
5.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	32.000.000	100,00
-	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16.000.000	16.000.000	100,00
5.2.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	16.000.000	16.000.000	100,00
-	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	16.000.000	16.000.000	100,00



6.	Program Penyuluhan Pertanian	1.541.264.220	1.541.264.220	100,00
6.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.541.264.220	1.541.264.220	100,00
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.205.505.620	1.205.505.620	100,00
-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	65.645.900	65.645.900	100,00
-	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	240.112.700	240.112.700	100,00
-	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	30.000.000	30.000.000	100,00
7.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.712.908.000	1.697.700.179	99,11
7.1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.216.196.900	1.213.489.079	99,78
-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	27.198.000	27.198.000	100,00
-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.173.999.600	1.171.291.779	99,77
-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	14.999.300	14.999.300	100,00
7.2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	466.000.000	453.500.000	97,32
-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	466.000.000	453.500.000	97,32
7.3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	30.711.100	30.711.100	100,00
-	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	30.711.100	30.711.100	100,00
8.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.424.898.800	1.424.021.880	99,94
8.1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	235.999.200	235.893.300	99,96
-	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	31.200.000	31.200.000	100,00
-	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	204.799.200	204.693.300	99,95
8.2.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	244.950.000	244.604.180	99,86
-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.400.000	30.400.000	100,00
-	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.550.000	214.204.180	99,84
8.3.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	943.949.600	943.524.400	99,95



-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	46.799.600	46.799.600	100,00
-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	476.000.000	475.805.000	99,96
-	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00
-	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	310.750.000	310.569.800	99,94
-	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di darat	80.400.000	80.350.000	99,94
TOTAL		14.628.429.300	14.223.317.619	97,23

c. Tujuan 3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 10 program dan 18 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi, dengan Indikator Kinerja Angka kecelakaan lalu lintas telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,99%. Sedangkan kegiatan yang mendukung diantaranya adalah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan beberapa kegiatan lainnya. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun kendala yang sering dihadapi yaitu masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan.

2.24.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.902.243.924	1.902.061.250	99,99
1.1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	915.718.800	915.718.400	100,00
-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	915.718.800	915.718.400	100,00
1.2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	465.216.624	465.059.350	99,97
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	261.139.924	260.982.650	99,94
-	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204.076.700	204.076.700	100,00



1.3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	87.100.000	87.100.000	100,00
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	87.100.000	87.100.000	100,00
1.3.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	102.800.000	102.800.000	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	102.800.000	102.800.000	100,00
1.4.	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	98.875.900	98.875.900	100,00
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66.875.900	66.875.900	100,00
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32.000.000	32.000.000	100,00
1.5.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	212.532.600	212.507.600	99,99
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
-	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	202.532.600	202.507.600	99,99
1.6.	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	10.000.000	10.000.000	100,00
-	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
1..7.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
TOTAL		1.902.243.924	1.902.061.250	99,99

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, dengan Indikator Kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Dimana Program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi anggaran 89,58%, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Permasalahan yang sering dihadapi adalah sejumlah ruas jalan berada pada kondisi topograsi dan konstruksi tanah yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingkat kerusakan jalan selalu lebih besar dibandingkan kemampuan perbaikan/ pemeliharaan jalan tingkat kerusakan jalan. Uraian mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat di bawah ini :



2.25.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	43.993.304.780	39.409.503.929	89,58
1.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	43.993.304.780	39.409.503.929	89,58
-	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	150.000.000	149.577.700	99,72
-	Pembangunan Jalan	6.719.682.400	6.179.381.006	91,96
-	Rehabilitasi Jalan	30.876.874.035	27.466.195.473	88,95
-	Pemeliharaan Rutin jalan	630.394.300	630.390.200	100,00
-	Pembangunan Jembatan	1.415.468.100	1.057.676.050	74,72
-	Rehabilitasi Jembatan	4.200.885.945	3.926.283.500	93,46
TOTAL		43.993.304.780	39.409.503.929	89,58

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi, dengan Indikator Kinerja Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Program dimaksud adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan realisasi anggaran mencapai 96,83%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2.26.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.122.542.948	4.922.161.567	96,83
1.1.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.746.032.638	1.516.146.370	86,83
-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	749.999.680	608.174.880	81,09
-	Normalisasi /Restorasi Sungai	505.752.958	420.844.250	83,21
-	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	277.200.000	277.200.000	100,00
-	Pembinaan dan Pembedayaan Kelembagaan dan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	213.080.000	209.927.240	98,52



1.2.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.376.510.310	3.406.015.197	77,82491
-	Peningkatan Bendung Irigasi	139.359.400	132.948.450	95,40
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.651.951.200	2.687.867.217	73,60
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	435.199.710	435.199.710	100,00
-	Operasi Unit Pengelolaan Irigasi	150.000.000	149.999.820	100,00
TOTAL		6.122.542.948	4.922.161.567	80,39

- ✓ Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman, dengan Indikator Kinerja Indeks infrastruktur pemukiman telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program dan 8 (delapan) kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Diantara kegiatannya adalah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

2.27.

Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
-	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.297.257.600	5.194.941.200	98,07
2.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.297.257.600	5.194.941.200	98,07
-	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	5.097.258.600	5.001.592.200	98,12
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	199.999.000	193.349.000	96,67
3.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	751.576.600	706.100.700	93,95



3.1.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	751.576.600	706.100.700	93,95
-	Penataan Bangunan dan Lingkungan	751.576.600	706.100.700	93,95
4.	Program Kawasan Permukiman	1.096.081.000	1.063.404.110	97,02
4.1.	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	446.081.000	419.919.110	94,14
-	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	446.081.000	419.919.110	94,14
4.2.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	650.000.000	643.485.000	99,00
-	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	650.000.000	643.485.000	99,00
5.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
5.1.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	4.205.095.900	4.200.753.711	99,90
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	232.558.900	232.494.100	99,97
6.1.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU	232.558.900	232.494.100	99,97
-	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	182.183.200	182.160.100	99,99
-	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	50.375.700	50.334.000	99,92
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.363.074.700	3.952.817.260	90,60
7.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.363.074.700	3.952.817.260	90,60
-	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	4.363.074.700	3.952.817.260	90,60
TOTAL		31.393.630.100	30.012.131.881	95,60

d. Tujuan 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ini memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan yang



telah dilaksanakan serta sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Adapun Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi anggaran 99,88% dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian realisasi anggaran 99,97% dengan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian realisasi anggaran 89,19% dengan Kegiatan Pengelolaan Persampahan. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian realisasi anggaran 71,09%, dengan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Permasalahan yang sering dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang bermukim di area sungai, membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai, melakukan aktivitas cuci dan mandi juga di sungai sehingga menimbulkan pencemaran air sungai. Selain itu akibat sampah yang mengendap di sungai akan berdampak pada pendangkalan air sungai akibat pengendapan sampah. Akibat aktivitas-aktivitas penduduk tersebut akan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat, sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan, dan umumnya penduduk yang bermukim di area bantaran sungai tersebut akan lebih mudah terserang penyakit.

2.28.

Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	940.339.600	939.178.938	99,88
1.1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	940.339.600	939.178.938	99,88
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	326.959.500	325.869.700	99,67
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	613.380.100	613.309.238	99,99
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.100.000.000	1.099.693.500	99,97
2.1.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.100.000.000	1.099.693.500	99,97
-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.100.000.000	1.099.693.500	99,97
3.	Program Pengelolaan Persampahan	14.490.526.100	12.924.037.170	89,19
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	14.490.526.100	12.924.037.170	89,19
-	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	39.503.400	39.503.400	100,00
-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.129.972.700	7.129.317.900	99,99



-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.321.050.000	5.755.215.870	78,61
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	540.000.000	383.901.600	71,09
4.1.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	440.000.000	283.901.600	64,52
-	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penerapan RRTR Kabupaten/Kota	300.000.000	143.950.300	47,98
-	Sosialisasi, Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	140.000.000	139.951.300	99,97
4.2.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000	100.000.000	100,00
TOTAL		17.070.865.700	15.346.811.208	89,90

e. Tujuan 5. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Tujuan ini memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Predikat SAKIP, Opini Pengelolaan Keuangan daerah, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 35 program dan 62 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Adapun diantara programnya adalah Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta beberapa program di bidang perencanaan, keuangan, pengawasan dan pelayanan. Ada beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah sarana dan prasarana pelayanan belum menyediakan tingkat kenyamanan ekstra, belum optimalnya sistem pengendalian internal oleh pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja, dan belum optimalnya pengelolaan data kinerja di tingkat Perangkat Daerah, sehingga data-data sektor belum dapat dimanfaatkan secara memadai untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran strategis.

2.29.

Program Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Administrasi Umum	53.524.276.759	44.035.804.527	82,00
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	671.275.000	660.905.271	98,46



2.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	473.635.700	465.199.571	98,22
2.2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.670.600	80.522.900	99,82
2.3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	116.968.700	115.182.800	98,47
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	937.323.100	930.560.686	99,28
3.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	354.200.000	350.765.045	99,03
3.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	238.048.100	234.930.000	98,69
3.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	345.075.000	344.865.641	99,94
4.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	235.783.314.318	234.220.399.742	99,34
4.1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	959.930.000	956.782.167	99,67
4.2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	234.237.143.018	232.678.631.075	99,33
4.3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	586.241.300	584.986.500	99,79
5.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	407.686.250	406.353.450	99,67
5.1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	407.686.250	406.353.450	99,67
6.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.014.912.700	1.980.542.190	98,29
6.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.014.912.700	1.980.542.190	98,29
7.	Program : Perekonomian Dan Pembangunan	950.000.000	566.309.202	99
7.1.	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	207.000.000	199.882.300	97
7.2.	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	250.000.000	249.254.179	100
7.3.	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	375.000.000	374.716.086	100
7.4.	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	118.000.000	117.172.723	99
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.496.215.400	1.460.060.400	97,58
8.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.496.215.400	1.460.060.400	97,58
8.2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
9.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	368.154.000	368.041.256	99,97
9.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			
9.2.	Pendampingan dan Asistensi	368.154.000	368.041.256	99,97



10.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.723.568.224	1.439.375.024	83,51
10.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.723.568.224	1.439.375.024	83,51
11.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.100.800	100.100.800	100,00
11.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	100.100.800	100.100.800	100,00
12.	Program Aplikasi Informatika	1.061.142.400	1.034.389.234	97,48
12.1.	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.061.142.400	1.034.389.234	97,48
13.	Program Pengelolaan Arsip	50.001.100	49.893.000	99,78
13.1.	Kegiatan Pengelolaan Arsip	50.001.100	49.893.000	99,78
14.	Program Pelayanan Penanaman Modal	260.052.000	259.380.000	99,74
14.1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	260.052.000	259.380.000	99,74
15.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.026.636.600	977.682.840	95,23
15.1.	Pelanan Pendaftaran Penduduk	1.026.636.600	977.682.840	95,23
16.	Program Pencatatan Sipil	681.193.320	671.347.000	98,55
16.1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	607.632.320	598.096.000	98,43
16.2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	73.561.000	73.251.000	99,58
17.	Program Pengelolaan Informasi dan Pemamfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	588.743.600	588.468.100	99,95
17.1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemamfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	140.536.700	140.522.000	99,99
17.2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	448.206.900	447.946.100	99,94
18.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	342.370.985	342.012.677	99,90
18.1.	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota	284.591.063	284.242.655	99,88
18.2.	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	57.779.922	57.770.022	99,98
19.	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43
19.1.	Kegiatan : Pencegahan Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43



20.	Program Penanggulangan Bencana	1.661.649.500	1.655.614.500	99,64
20.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00
20.2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.602.649.500	1.596.649.500	99,63
20.3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	34.000.000	33.965.000	99,90
21.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	398.691.600	398.691.600	100,00
21.1.	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	398.691.600	398.691.600	100,00
22.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	91.000.000	90.975.000	99,97
22.1.	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	91.000.000	90.975.000	99,97
23.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.056.000.000	959.096.200	90,82
23.1.	Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	1.056.000.000	959.096.200	90,82
24.	Program Kepegawaian Daerah	1.732.373.658	1.724.116.417	100
24.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	568.397.700	567.905.140	100
24.2.	Mutasi dan Promosi ASN	418.532.470	413.526.770	99
24.3.	Pengembangan Kompetensi ASN	598.436.088	596.014.100	100
24.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	147.007.400	146.670.407	100
25.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.405.667.900	1.054.423.100	41,87
25.1.	Pengembangan Kompetensi Tekhnis	23.299.700	23.166.000	99%
25.2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.382.368.200	1.031.257.100	75%
26.	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.622.896.831	12.338.990.610	98
26.1.	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	300.000.000	299.534.370	100
26.2.	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.472.869.520	11.189.468.612	98
26.3.	Kegiatan : Fasilitas dan Koordinasi Hukum	850.027.311	849.987.628	100
27.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.109.144.800	21.563.750.947	97,53



27.1.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.003.276.000	1.953.416.416	97,51
27.2.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan anggaran	704.487.800	704.305.092	99,97
27.3.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.438.070.000	2.335.495.311	95,79
27.4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.118.109.200	6.775.645.728	95,19
27.5.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.845.201.800	9.794.888.400	99,49
28.	Program Pembinaan Perpustakaan	295.000.000	292.862.650	99,28
28.1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	233.600.000	231.490.050	99,10
28.2.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.400.000	61.372.600	99,96
29.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.383.510.856	3.342.280.093	98,78
30.	Program Penelitian dan Pengembangan	162.901.900	161.958.500	99,42
30.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	23.675.000	23.010.000	97,19
30.2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.500.000	100.221.900	99,72
30.3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	38.726.900	38.726.600	100,00
31.	Program Penataan Bangunan Gedung	33.395.680.015	30.584.479.595	91,58
31.1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	33.395.680.015	30.584.479.595	91,58
32.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	649.996.700	644.656.448	99,18
32.1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000	200.000.000	100
32.2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	194.659.748	97,33
33.3.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	249.996.700	249.996.700	100,00
33.	Program Penatagunaan Tanah	1.724.127.957	1.722.028.535	99,88
33.1.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparaannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	1.724.127.957	1.722.028.535	99,88
34.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.111.717.638	576.285.056.393	94,77
35.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.528.459.156	7.870.982.498	68,27
TOTAL		1.006.414.515.675	954.856.891.893	94,88



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah. Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaskan pembantuannya adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalanya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat, namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

Pada pasal 23 Undang-Undang No.23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum terbit, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan saja, sedangkan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi menjadi kewajiban Gubernur dalam penyampaian pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaporan Tugas Pembantuan merupakan program / kegiatan kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat.



3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat dari beberapa kementerian/lembaga terdiri dari :

- a. Kementerian Pertanian
- b. Kementerian Perdagangan
- c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/lembaga kepada Kabupaten Polewali Mandar diimplementasikan pada 3 (tiga) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

a. Kementerian Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan tersebut adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Adapun Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah Program Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Program tersebut kemudian terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan.** Kegiatan ini berlokasi di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Campalagian, Mapilli, Polewali, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Tinambung, Anreapi dan Binuang dengan rincian kegiatan yaitu berupa bantuan benih padi dengan target 75.000 Kg. dan terealisasi 75.000 Kg. atau 100%. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran Rp. 787.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 787.500.000,- atau 100%.
- 2) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan.** Kegiatan ini berlokasi di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Campalagian, Mapilli, Tutar, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Tinambung, Anreapi, Binuang, Bulu, Limboro, Matangnga dan Alu dengan rincian kegiatan yaitu berupa bantuan benih jagung dengan target 12.750 Kg. dan terealisasi 12.750 Kg. atau 100%. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran Rp. 561.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 561.000.000,- atau 100%.



- Permasalahan dan Kendala : Tidak ada permasalahan.
- Saran dan Tindaklanjut : Tidak ada permasalahan

b. Kementerian Perdagangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Adapun Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah Program Perdagangan Dalam Negeri. Adapun kegiatannya ialah Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Kegiatan ini berlokasi di Desa Bulu Kecamatan dengan rincian kegiatan yaitu Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Bulu dengan target 1 (satu) prasarana bidang industri dan perdagangan dan terealisasi 1 (satu) unit atau 100%. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran Rp. 6.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.863.179.500,- atau 100%.

- Permasalahan dan Kendala : Tidak ada permasalahan.
- Saran dan Tindaklanjut : Tidak ada permasalahan

c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan tersebut adalah DIPA – No. 067.07.4.419109/2021 Tanggal 23 November 2021. Adapun Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah :

- 1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Drainase Piriang Tapiko, berlokasi di Piriang Tapiko Polewali Mandar dimana target pelaksanaan 100% dan terealisasi 99,46%. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran Rp. 854.932.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 850.324.061,- atau 99,50%.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar dimana target pelaksanaan 100% dan terealisasi 83,06%. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran Rp. 89.256.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.137.000,- atau 98,45%.



- Permasalahan dan Kendala : Tidak ada permasalahan.
- Saran dan Tindaklanjut : Tidak ada permasalahan



3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi yaitu **Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat**. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan tersebut adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Adapun Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah Program Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian. Kegiatan tersebut kemudian terbagi menjadi 4 (empat) rincian kegiatan dengan lokasi dan alokasi anggaran yang berbeda, yaitu :

- 1) **Rincian Kegiatan Irigasi Perpipa**an dengan target 2 unit dan terealisasi 2 unit atau 100%. Berlokasi di Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli dan Desa Tapua Kecamatan Matangnga. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Degara (APBD) Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 168.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.000.000,- atau 100%.
- 2) **Rincian Kegiatan Irigasi Perpomp**aan dengan target 4 lokasi dan terealisasi 4 lokasi atau 100%. Kegiatan ini berlokasi di Desa Rappang Kecamatan Mapilli, Desa Paku Kecamatan Binuang, Desa Gattungun Kecamatan Campalagian, Kelurahan Ammasangan Kecamatan Binuang. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Degara (APBD) Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 414.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 414.000.000,- atau 100%.
- 3) **Rincian Embung** dengan target 4 unit dan terealisasi 4 unit atau 100%. Kegiatan ini berlokasi di Desa Bulu Kecamatan Bulu, Desa Bala Kecamatan Balanipa, Desa Salarri Kecamatan Limboro dan Desa Pulliwa Kecamatan Bulu. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Degara (APBD) Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 480.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 480.000.000,- atau 100%.
- 4) **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier** dengan target 7 unit dan terealisasi 7 unit atau 100%. Kegiatan ini berlokasi di Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo, Desa Lampoko, Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali, Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango, Desa Bumimulyo Kecamatan



Wonomulyo dan Desa Kunyi Kecamatan Anreapi. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Degara (APBD) Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 525.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 525.000.000,- atau 100%.

- Permasalahan dan Kendala : Tidak ada permasalahan.
- Saran dan Tindaklanjut : Tidak ada permasalahan



Tabel 3.1.
Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2021

No	KEMENTERIAN / LPNK	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	TARGET		REALISASI			KET
						TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian	- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.	Program : Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Output : 75.000 Kg Rincian Kegiatan : Bantuan Benih Padi	Kecamatan : 1. Campalagian 2. Mapilli 3. Polewali 4. Wonomulyo 5. Tapango 6. Matakali 7. Tinambung 8. Anreapi 9. Binuang	Dinas Pertanian dan Pangan	75.000 Kg	787.500.000	75.000 Kg	787.500.000	100	
2	Kementerian Pertanian	- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup	Program : Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Output : 12.750 Kg Rincian Kegiatan : Bantuan Benih Jagung	Kecamatan : 1. Campalagian 2. Mapilli 3. Tutar 4. Wonomulyo 5. Tapango 6. Matakali 7. Tinambung 8. Anreapi 9. Binuang 10. Bulu	Dinas Pertanian dan Pangan	12.750 Kg	561.000.000	12.750 Kg	561.000.000	100	



		Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.		11.Limboro 12. Matangnga 13.Alu							
3	Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	Program : Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Output : Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan Rincian Kegiatan : TP Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Bulo	Desa Bulo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar	1	6.000.000.000	1	5.863.179.500	100	
4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)	DIPA NO 067.07.4.419109/2021, Tanggal 23 November 2021	Program : Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Drainase Pirian Tapiko	Polewali Mandar	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar	100 %	854.932.000	99,46 %	850.324.061	99,50	
			Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Polewali Mandar	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar	100%	89.256.000	83,06%	74.137.000	98,45	



Tabel 3.2.
Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2021

No	PERANGKAT DAERAH PROVINSI / INSTANSI VERTIKAL LAINNYA	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	TARGET		REALISASI			KET
						TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021. 	<p>Program : Ketersediaan akses dan konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>Output : 2 Unit</p> <p>Rincian Kegiatan : Irigasi perpipaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli 2. Desa Tapua Kecamatan Matangnga 	Dinas Pertanian dan Pangan	2	168.000.000	2	168.000.000	100	
2	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang 	<p>Program : Ketersediaan akses dan konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>Output : 4 Unit</p> <p>Rincian Kegiatan : Irigasi perpompaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Rappang Kec. Mapilli 2. Desa Paku Kec. Binuang 3. Desa Gattung Kecamatan Campalagian 	Dinas Pertanian dan Pangan	4	414.000.000	4	414.000.000	100	



		<i>Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.</i>		4. Desa Ammassangan Kecamatan Campalagian							
3	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian T.A. 2021. 	<p>Program : Ketersediaan akses dan konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>Output : 4 Unit</p> <p>Rincian Kegiatan : Embung</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Bulu, Kec. Bulu 2. Desa Bala Kec. Balanipa 3. Desa Salarri Kec. Limboro 4. Desa Pulliwa Kec. Bulu 	Dinas Pertanian dan Pangan	4	480.000.000	4	480.000.000	100	



4	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	<p>- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.</p> <p>- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>Program : Ketersediaan akses dan konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>Output : 7 Unit</p> <p>Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Batupanga Daala Kec. Luyo 2. Desa Botto Kecamatan Campalagian 3. Kelurahan Sulewatang Kec. Polewali 4. Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 5. Desa Jambu Malea Kec. Tapango 6. Desa Bumi Mulyo Kec. Wonomulyo 7. Desa Kunyi Kec. Anreapi 	Dinas Pertanian dan Pangan	7	525.000.000	7	525.000.000	100	
---	--	---	--	---	----------------------------	---	-------------	---	-------------	-----	--



**BAB
IV**

**PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL**



4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah :

- ✓ Pendidikan anak usia dini
- ✓ Pendidikan dasar
- ✓ Pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	26.987	100	13.848.343.100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	81.447	100	100.569.895.563
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	78.206	100	5.152.899.600

4.1.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi Peencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	26.987	100	12.766	47,30



2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	81.447	100	60.224	73.94
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	78.206	100	890	1,13

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.276.199.600	1.572.143.500	13.848.343.100	13.565.680.100	97.96	
2	Pendidikan Dasar	32.814.030.000	67.755.865.563	100.569.895.563	97.191.239.728	96,64	
3	Pendidikan Kesetaraan	5.152.899.600	-	5.152.899.600	4.248.349.600	82.45	
Total				119.571.138.263	115.005.269.428	96.18	

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Dukungan Personil atau Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	KETENAGAAN						JUMLAH
			Pegawai Dinas Pendidikan	Pengawas, Penilik	Kepala Sekolah TK	Kepala Sekolah SD	Kepala Sekolah SMP	GURU	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		66	54					120
2	BINUANG	2.266			26	23	3	297	2.615
3	POLEWALI	6.702			51	29	7	700	7.489



4	ANREAPI	1.006			20	11	1	148	1.186
5	WONOMULYO	4.445			47	31	5	537	5.065
6	TAPANGO	2.169			31	14	4	236	3.454
7	MAPILLI	2.542			28	17	4	259	2.850
8	MATANGNGA	426			16	7	2	106	557
9	LUYO	2.867			46	21	4	324	3.262
10	CAMPALAGIAN	5.956			71	43	8	672	6.750
11	BALANIPA	2.847			31	21	2	271	3.172
12	TINAMBUNG	2.283			26	20	4	293	2.626
13	LIMBORO	1.844			20	23	2	267	2.156
14	ALLU	1.756			18	22	3	271	2.070
15	TUBBI TARAMANU	2.751			26	24	6	359	3.166
16	MATAKALI	2.468			37	14	3	228	2.750
17	BULO	1.200			19	11	2	179	1.411
	TOTAL	43.528	66	54	513	331	60	5.147	49.699

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dengan adanya pandemi covid 19 sangat berpengaruh besar dalam penyediaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan SPM

b. Solusi

Memaksimalkan program dan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia.

4.1.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APM SD/MI			
	Persentase APM SMP/MTs			
	Persentase APK SD/MI			
	Persentase APK SMP/MTs			
	Persentase angka putus sekolah SD/MI			



Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD dalam kondisi baik	89.533.144.963	86.982.930.873	97,09
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik			
	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti diklat calon kepala sekolah			
	Persentase sekolah yang terakreditasi			
Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang di bangun (SD)	3.652.470.000	3.430.467.290	93,92
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	3.581.756.000	3.397.963.952	94,87
	Jumlah UKS yang dibangun			
Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD	831.038.000	787.258.668	94,73
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban/toilet yang dibangun	2.201.494.000	1.949.759.855	88,57
	Jumlah Jamban/toilet yang rehab			
	Jumlah laboratorium komputer yang dibangun			
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi (SD)	7.499.510.000	7.108.541.660	94,79
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	325.149.000	308.484.380	94,87
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	2.105.862.000	2.018.332.051	95,84
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah SD (Meubeler)	111.271.000	110.071.000	98,92
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah SD	1.680.000.000	1.638.900.000	97,55
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Subtansi Diklat Calon Kepala Sekolah	595.998.100	499.468.500	83,8
	Jumlah peserta DIKLAT Calon Kepala Sekolah dan pengawas sekolah			
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SD)	66.948.596.863	65.733.683.517	98,19
	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SMP)			



Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP dalam kondisi baik	10.936.751.000	10.178.252.855	93,06
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi SMP	7.508.827.000	6.946.300.626	92,51
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitas	828.094.000	777.105.311	93,84
	Jumlah Ruang Ibadah yang di Rehabilitas			
	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang di Rehabilitas			
	Jumlah Ruang tata Usaha yang di Rehabilitas			
Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	1.017.548.000	951.425.008	93,50
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban/ Toilet yang di Rehabilitas	988.692.000	930.021.910	94,07
	Jumlah ruang ibadah yang direhab			
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sarana media pendidikan	593.590.000	573.400.000	96,60
	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Alat Laboratoryum IPA FISIKA)			
	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Alat Laboratoryum IPA BIOLOGI)			
	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).			
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APK PAUD	13.848.343.100	13.565.680.100	97,96
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD			
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah sarana untuk Proses Belajar Mengajar di Sekolah PAUD (Alat bermain dan alat praktek siswa)	520.000.000	448.384.600	86,23
Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tendik dan pengelola PAUD	1.572.143.500	1.511.720.500	96,16
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang menerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Hibah PAUD	11.756.199.600	11.605.575.000	98,72
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase angka melek hurup	5.152.899.600	4.248.349.600	82,45
	Persentase Tenaga Pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi			



Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM dan SKB yang menerima BOP Kesetaraan dan Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta-Hibah Pendidikan Kesetaraan	5.152.899.600	4.248.349.600	82,45
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	99.999.600	30.056.000	30,06
	Persentase tenaga kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi			
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang berprestasi	99.999.600	30.056.000	30,06
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi			
Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi	99.999.600	30.056.000	30,06
	Jumlah guru dan tenaga Kependidikan yang berprestasi			



4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adalah :

- ✓ Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- ✓ Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir umur 0 - 28 hari
- ✓ Pelayanan Kesehatan Balita umur 0 - 59 bulan
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 dan Kelas 7)
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif umur 15 - 59 Tahun
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut umur 60 Tahun ke atas
- ✓ Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- ✓ Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV



4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9.274	100	843.958.680
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.851	100	2.775.693.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	8.323	100	367.690.378
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	56.277	100	1.308.588.710
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	60.294	100	504.041.653
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	301.074	100	298.104.860
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	35.176	100	246.915.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	24.964	100	198.892.645
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	6.664	100	172.044.000
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	957	100	318.610.800
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	8.176	100	417.716.665
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	11.546	100	228.768.479

4.2.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Kesehatan selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9.274	100	7.632	82.29
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.851	100	8.239	93.08
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	8.323	100	8.267	99.32
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	56.277	100	35.781	63.58
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	60.294	100	52.922	87.77
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	301.074	100	86.401	28.69
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	35.176	100	15.152	43.07
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	24.964	100	23.173	92.82
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	6.664	100	5.633	84.52
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	957	100	663	69.27
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	8.176	100	3.505	42.87
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	11.546	100	4.434	38,40

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.8.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	843.958.680	0	843.958.680	728.301.100	86,30	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.775.693.000	0	2.775.693.000	2.513.333.826	90,55	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	367.690.378	0	367.690.378	342.172.000	93,06	
4	Pelayanan kesehatan balita	1.308.588.710	0	1.308.588.710	1.149.600.000	87,85	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	504.041.653	0	504.041.653	434.520.000	86,21	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	298.104.860	0	298.104.860	274.525.610	92,09	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	246.915.000	0	246.915.000	230.385.700	93,31	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	198.892.645	0	198.892.645	172.933.500	86,95	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	172.044.000	0	172.044.000	142.480.000	82,82	
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	318.610.800	0	318.610.800	265.919.705	83,46	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	417.716.665	0	417.716.665	329.370.700	78,85	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	228.768.479	0	228.768.479	206.950.705	90,46	
Total		7.681.024.870	0	7.681.024.870	6.790.492.846	88,41	

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.9.
Jumlah Personil / Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan,
Instansi/Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2021

C. N	INSTANSI	KETENAGAAN																												JML												
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Penyakit Bedah	dr. spesialis gigi tiruan (prostodontis)	dr. spesialis konservasi gigi	Dokter Ahli Penyakit Anak	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Dokter spesialis Gizi Klinik	Dokter Ahli Penyakit Mata	dr. spesialis Jantung dan pembuluh darah	Dokter Spesialis KFR	Dokter Spesialis Neurologi	Dokter Spesialis THT	Dokter Spesialis Penyakit Kulit	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi	Dokter Spesialis Anestesiologi	Dokter Spesialis Paru	Dokter Spesialis Patologi klinik	Dokter Spesialis Jiwa	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Umum	Dokter Umum insternsip	Dokter Gigi	SKM / Kesmas	Farmasi / Apoteker	Gizi/Nutrisionis	Perawat	Fisioterapi	Perawat Gigi/Teknisi gigi		Hiperkes / Kesehatan Kerja	Sanitarian	Bidan	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Radiografer	Rekam Medis	Teknisi Elektro medik	Pekarya Kesehatan	Lainnya (Struktural / JFU)			
1	DINKES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	93
2	Binuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	2	21	1	2	-	2	27	1	-	-	-	-	-	1	4	70	
3	Polewali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	10	3	2	20	-	1	-	2	41	1	-	-	-	-	-	-	1	15	100	
4	Massenga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	8	4	3	32	-	-	-	1	38	2	-	-	-	-	-	-	2	12	106	
5	Pekkabata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19	4	3	32	-	1	-	3	60	2	-	-	-	-	-	1	2	133		
6	Anreapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	3	2	28	-	-	-	1	19	2	-	-	-	-	-	2	8	74		
7	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	6	3	2	50	-	2	-	2	53	1	-	-	-	-	-	-	10	136		
8	Kebunsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	2	2	28	-	1	-	1	28	1	-	-	-	-	-	-	4	77		
9	Pelitakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	3	4	36	-	-	-	2	40	1	-	-	-	-	-	-	6	102		
10	Mapilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	10	2	2	31	-	-	-	2	57	1	-	-	-	-	-	-	6	114		
11	Matangnga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	-	21	-	-	-	1	29	1	-	-	-	-	-	-	13	74		
12	Batupanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	9	3	2	28	-	-	-	2	43	1	-	-	-	-	-	-	10	102		
13	Campalagian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	12	3	2	55	-	2	-	1	74	1	-	-	-	-	-	2	8	164		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

2021

14	Pambusuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	2	28	-	1	-	2	51	1	-	-	-	-	8	103		
15	Tinambung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	9	2	2	37	-	1	-	2	69	1	-	-	-	-	13	139		
16	Limboro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	3	26	-	-	-	1	37	1	-	-	-	-	10	88		
17	Tutallu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	2	14	-	-	-	1	12	1	-	-	-	-	31	72		
18	Tutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	2	1	33	-	-	-	2	40	1	-	-	-	-	15	104		
19	Matakali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	3	2	31	-	-	-	2	45	2	-	-	-	-	5	102		
20	Bulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	3	1	22	-	-	-	2	21	1	-	-	-	-	7	66		
21	Katumbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	29	-	-	-	2	34	-	-	-	-	-	12	89		
22	RSUD Wonomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	5	1	39	-	1	-	1	33	2	2	1	-	1	17	110		
23	RSUD Polewali	5	4	1	2	3	3	1	3	1	1	2	2	2	1	5	1	2	1	2	11	7	1	9	24	15	349	7	5	-	3	103	20	14	9	3	1	188	811	
24	RS Khusus Ibu dan Anak Miifa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	4	1	7	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	1	23	53	
25	Unit Transfusi Darah (UTD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	18	35
26	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	9	
27	Klinik Engsar Medical (Pratama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	
28	Klinik Rumkitban TNI-AD (Pratama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	19	
29	Klinik Manding (Pratama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	2	22	
30	Klinik Bhayangkara Urdokkes Polres (Pratama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	10	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	21	
31	Praktik Mandiri Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
32	Apotik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
	Total																				89	7	28	183	142	62	1030	8	18		45	974	61	16	10	3	14	511	3.238	



4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Tenaga (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang
- Keterbatasan dana dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- Masih Kurangnya pemahaman tentang operasional SPM

b. Solusi

- Pengajuan tenaga tambahan PNS atau kontrak
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
- Mengadakan pelatihan dan workshop

4.2.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten			
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	66.243.680	66.047.100	99,70
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	1.708.626.000	1.446.266.826	84,65
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	72.820.378	63.738.000	87,53
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	36.178.710	33.130.000	91,57



Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	17.000.003	15.640.000	92,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59 Th)	103.886.860	103.562.610	99,69
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	37.505.000	36.834.700	98,21
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15.829.645	15.822.500	99,95
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Penduduk dengan Diabetes mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000.000	9.000.000	100,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar	50.210.800	45.737.705	91,09
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	77.997.465	62.340.700	79,93
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	59.248.479	58.930.705	99,46



4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, adalah :

- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- ✓ Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik



4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	480.541	96	15.447.985.400
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	104.084	86	5.297.257.600

4.3.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Pekerjaan Umum selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	480.541	96	410.242	85,37
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	104.084	86	96.318	92,54

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.13.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	13.779.556.000,-	1.668.429.400,-	15.447.985.400,-	14.661.620.800	94,90	



2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	4.737.507.000,-	559.750.600,-	5.297.257.600,-	5.194.941.200	98,06	
Total				20.745.243.000	19.856.562.000	95,72	

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 1 orang
- Kepala Seksi : 1 orang
- Kepala UPTD : 1 orang
- Kasubag UPTD : 1 orang
- Staf : 3 orang
- PTT : 4 orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
- Kurangnya pengawasan/monitoring terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.

b. Solusi

- Penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
- Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan / monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilingkup interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bias mencapai hasil yang maksimal.
- Menyiapkan master plan sumber air baku jaringan pipa untuk kawasan perkotaan, wilayah perdesaan dan pesisir.
- Mengendalikan penebangan pohon atau meningkatkan penghijauan di sekitar sumber air baku.

4.3.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pelayanan akses air minum	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan akses air minum	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Jiwa pemanfaat air minum	15.447.985.400	14.661.620.800	94,91
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi yang layak	5.297.257.600	5.194.941.200	98,07
	Persentase akses sanitasi yang Aman			
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akses sanitasi yang Aman	5.297.257.600	5.194.941.200	98,07
Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak	5.097.258.600	5.001.592.200	98,12
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah lumpur tinja yang terangkut jumlah sarana dan prasarana air limbah domestik dalam kondisi baik	199.999.000	193.349.000	96,67



4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

- ✓ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan;
- ✓ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	134	100	34.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0

4.4.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Perumahan Rakyat selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	134	100	134	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.17.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	0	34.000.000	34.000.000	33.965.000	99,90	Anggaran pelaksanaan kegiatan di BPBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	Tidak ada Relokasi Tahun 2021
Total				34.000.000	33.965.000	99,90	

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV : 2 (dua) orang
- Golongan III : 6 (enam) orang
- Golongan II : -
- Golongan I : -

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Sulit melakukan pendataan terkait bencana
- Belum ada skema lokasi aman untuk rumah layak huni
- Alokasi anggaran minim dan terdampak refocusing anggaran pandemi covid-19
- Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana
- Identifikasi dan verifikasi terhadap kerusakan rumah akibat bencana alam dilakukan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun jumlah nilai bantuan yang diberikan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang berasal dari Dana BTT yang melekat di Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Perbup Nomor 3 Tahun 2021.
- Indikator Jenis Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / kota pada tahun 2021 masih dilaksanakan oleh BPBD, belum di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

b. Solusi

- Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah.
- Penguatan Tim Penerapan SPM se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
- Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas untuk menekan kesenjangan Capaian SPM yang terjadi di Kabupaten / Kota sehingga pemerataan



capaian bidang-bidang SPM dapat tercapai sesuai target dan merata.

- Penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050/3708/2020.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.

4.4.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat khususnya Jenis Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / kota sebagai berikut :

Tabel 4.18.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Siaga Bencana			
	Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian			
	Persentase Pascabencana Yang Tertangani			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana	34.000.000	33.965.000	99,90
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana Yang Ditangani	34.000.000	33.965.000	99,90



4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah :

- ✓ Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- ✓ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- ✓ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana
- ✓ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran



4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19.
Target Capaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	320 orang	100	217.990.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 orang	100	25.000.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16 Kecamatan	100	1.602.649.500
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	134 KK	100	34.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	14 Kecamatan (22 kejadian)	100	4.098.730.608

4.5.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	320 orang	100	209 orang	65,31
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 orang	100	30 orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16 Kecamatan	100	16 Kecamatan	100



4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	134 KK	100	134 KK	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	14 Kecamatan (22 kejadian)	100	14 Kecamatan (22 kejadian)	100

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.21.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)		217.990.000	217.990.000	217.990.000	100	
2	Pelayanan informasi rawan bencana (BPBD)	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana(BPBD)	-	1.602.649.500	1.602.649.500	1.596.649.500	99,63	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana(BPBD)	-	34.000.000	34.000.000	33.965.000	99,90	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Satpol PP)		4.098.730.608	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43	
Total				5.978.370.108	5.948.907.908	99,50	

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :



➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

Rincian Jumlah Tenaga Satpol PP dan Damkar

- PNS : 119 orang
- Non PNS : 201 orang

Rincian Penugasan Satpol PP dan Damkar

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Staff : 25 orang
- Petugas Tindak Internal : 25 orang
- Tim Lidik : 2 orang
- Tim Pengendali Massa : 33 orang
- Penjagaan : 140 orang
- UPTD Damkar : 83 orang
- Kec. Binuang : 1 orang
- Kec. Anreapi : 1 orang
- Kec. Matakali : 2 orang
- Kec. Wonomulyo : 3 orang
- Kec. Mapilli : 1 orang
- Kec. Bulu : 1 orang
- Kec. Tapango : 1 orang
- Kec. Matangnga : 1 orang
- Kec. Tutar : 1 orang
- Kec. Balanipa : 2 orang
- Kec. Tapango : 1 orang

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Jumlah personil atau pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terurai sebagai berikut :

- 17 SATGAS (Satuan Tugas) atau TRC (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana)
- 4 orang tenaga administrasi
- 1 orang tenaga operator Komputer
- 1 orang tenaga pembersih

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

a. Permasalahan

Indikator SPM Bidang Ketertiban Umum mendapatkan dukungan dana yang sangat minim untuk pelaksanaan kegiatan/ program mencakup SPM Satpol PP.

b. Solusi

Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat pelatihan-pelatihan dasar dan tekhnis terkait tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Untuk Meningkatkan SDM, Patroli Wilayah dan Penindakan atas Pelanggaran Perda.



➤ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

- Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana disekitarnya, terutama dilereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam.
- Masih terbatasnya anggaran tersedia dalam penanganan kawasan rawan bencana.
- Masih kurangnya penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan kebencanaan.
- Perlunya pengarusutamaan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dalam perencanaan pembangunan.
- Masih perlunya pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana.
- Masih kurangnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
- Penyusunan rencana kontijensi untuk seluruh ancaman bencana (sesuai IRBI) masih sangat minim.
- Kurangnya budaya sadar bencana di lingkungan sekolah serta kurangnya penerapan aman bencana dirumah sakit dan puskesmas.
- Sistem peringatan dini per jenis bencana masih minim.
- Belum adanya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana.
- Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim.
- Perlunya pelatihan-pelatihan terkait dengan kebencanaan.

b. Solusi

- Perlunya pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bencana misalnya tidak mendirikan bangunan di tebing, tidak menebang pohon di lereng dan tidak mendirikan bangunan di tepi sungai.
- Mendorong program-program yang berkaitan tentang penanganan bencana baik ditingkat daerah maupun pusat.
- Penambahan anggaran dalam penanganan bencana baik sebelum, sesudah, setelah, dan sesudah bencana baik anggaran pusat maupun daerah.
- Perlunya meningkatkan pemantauan di daerah-daerah terjadinya bencana sehingga data penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersedia serta diperlukannya pelatihan / bimtek secara berkala.
- Perlunya penambahan dan pemeliharaan peralatan yang terkait dengan kebencanaan.
- Mengusulkan penetapan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai peraturan daerah.
- Mengalokasikan anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana dalam Belanja Tidak Terduga sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.
- Menyusun peraturan dan pedoman terkait pembentukan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai PP 21 Tahun 2008.
- Penambahan anggaran untuk membuat jalur dan rambu evakuasi, tempat kumpul (shelter) untuk evakuasi, sosialisasi (gladi) tentang Rencana Kontinjensi dan rencana evakuasi kepada masyarakat.
- Menetapkan SK tentang Pembentukan TRC yang melibatkan instansi terkait (Dinas Sosial, BPBD, Kodim, Polres, Satpol PP, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, dan Instansi terkait lainnya).
- Melakukan pemetaan dan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Polewali Mandar untuk seluruh jenis bencana.
- Mengusulkan pembuatan peraturan tentang rencana kontinjensi dan rencana evaluasi.



- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar untuk membuat perencanaan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan sekolah aman bencana dan membentuk tim gabungan dengan OPD/Instansi terkait.
- Makin meningkatkan penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Bencana dan penyebaran informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- Melakukan pembentukan/penyusunan personil Pusdalops (Manajer, Supervisor, Operator, Koordinator Administrasi dan Keuangan), serta mengusulkan anggaran dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi Pusdalops sesuai dengan Peraturan KepalaBNPB No.15 Tahun 2012.
- Meningkatkan koordinasi antar OPD dan instansi terkait mengenai strategi dan operasi penyelamatan dan pertolongankorban bencana serta perbaikan darurat saat tanggap darurat bencana.

4.5.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.22.

Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (Satpol PP) Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklajuti Persentase Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklajuti, Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar / Tehnis Persentase Kecamatan yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai			
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penaganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah			
Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penindakan atas gangguan keamanan dan ketertiban umum	217.990.000	217.990.000	100,00



PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43
Kegiatan : Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tindakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43
Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	4.098.730.608	4.075.303.408	99,43

Tabel 4.23.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (BPBD) Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Siaga Bencana	1.661.649.500	1.655.614.500	99,64
	Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian			
	Persentase Pascabencana Yang Tertangani			
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi	25.000.000	25.000.000	100,00
Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.000.000	25.000.000	100,00
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Layanan Siaga Bencana	1.602.649.500	1.596.649.500	99,63
Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	38.274.600	38.274.600	100,00



Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah Pascabencana Yang Tertangani	1.278.175.000	1.278.175.000	100,00
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Yang Diberdayakan	236.199.900	230.199.900	97,46
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Berdasarkan Jenis Ancaman	50.000.000	50.000.000	100,00
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana	34.000.000	33.965.000	99,90
Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana Yang Ditangani	34.000.000	33.965.000	99,90



4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, adalah:

- ✓ rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- ✓ rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- ✓ rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- ✓ rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- ✓ perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Sosial Tahun Anggaran 2021 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24.
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			SASARAN	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	55 orang	100	19.999.700
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40 orang	100	172.850.000



3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50 orang	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	-	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	130 KK	100	69.850.000

4.6.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Sosial selama Tahun Anggaran 2021 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
			SASARAN	%	ABSOLUT	%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	55 orang	100	55 orang	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40 orang	100	40 orang	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50 orang	100	50 orang	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	-	-	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	130 KK	100	514 KK	395,38



4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Sosial Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.26.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		19.999.700	19.999.700	19.999.700	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		172.850.000	172.850.000	172.753.620	99,94	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial						
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		-	-	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten / Kota		69.850.000	69.850.000	69.850.000	100	
Total				262.699.700	262.603.320	99,66	

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

- a. Personil ASN yang ada di Dinas Sosial berjumlah 25 orang
- b. Personil Non ASN / PTT berjumlah 24 orang
- c. Personil pekerja sosial yang terdiri atas :
 - TAGANA : 46 orang
 - TKSK : 16 orang
 - PKSAI : 4 orang



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Keterbatasan anggaran untuk memenuhi beban tanggungjawab pemenuhan SPM.
- Tidak tersedianya pusat layanan Rehabilitasi Sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada kelompok rentan seperti disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta lainnya.
- Belum adanya kesepahaman / kurangnya informasi serta sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan SPM.
- Untuk jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial belum ada dialokasikan anggaran pada tahun Anggaran 2021.

b. Solusi

- Pengajuan anggaran selain melalui APBD DAU seperti APBN Dekon maupun Tugas Pembantuan.
- Upaya Pengajuan Proposal kepada Kementerian Sosial RI untuk pembangunan Pusat Layanan Sosial.
- Sosialisasi yang terlaksana.

4.6.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Sosial sebagai berikut :

Tabel 4.27.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial Tahun 2021

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Rp.
PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	192.849.700	192.753.320,00	99,95
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS diLUAR PANTI yang ditangani dalam Pelayanan Sosial	192.849.700	192.753.320	99,95
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang mendapatkan Penyediaan Permakanan	172.850.000	172.753.620	99,94



Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	Jumlah PMKS luar panti yang diberi keterampilan	19.999.700	19.999.700	100,00
PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial			
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RUTA dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah yang diverifikasi			
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima bantuan sosial	69.850.000	69.850.000	100



**BAB
V**

PENUTUP



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mampu mengakomodir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar. LPPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Uraian yang disampaikan secara sistematis mulai dari bab pendahuluan yang memuat penjelasan umum seperti dasar hukum pembentukan daerah, kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan desa, jumlah pegawai pemerintah berdasarkan perangkat daerah dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu pada bab ini juga memuat mengenai perencanaan pembangunan daerah (permasalahan strategis pemerintah daerah, visi misi kepala daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan) serta penerapan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya pada bab capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat informasi mengenai capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada bab capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kemudian pada bab penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal menjelaskan mengenai target, realisasi, alokasi anggaran, dukungan personil, permasalahan dan solusi serta program kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.
2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun Anggaran 2020 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memuat :
 - a. Capaian kinerja makro, yaitu capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,23%, angka kemiskinan 15,68%, angka pengangguran 3,38%, pertumbuhan ekonomi -1,86%, pendapatan per kapita 28,52%, dan ketimpangan pendapatan 0,352.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian ini merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Terdapat 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dimana data indikator kinerja kunci yang disampaikan oleh OPD sesuai dengan urusan masing-masing telah menampilkan capaian kinerja yang cukup baik. Namun ada beberapa indikator urusan pemerintahan yang perlu mendapatkan perbaikan dan evaluasi bagi kami pemerintah daerah.
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah



- daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Beberapa indikator kinerja sasaran telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target atau cukup berhasil, berhasil, sangat berhasil dan ada indikator kinerja yang belum mencapai target atau tidak berhasil.
- d. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berasal dari dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berasal dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar baik dari pusat maupun dari Pemerintah Provinsi telah menunjukkan hasil yang optimal, dimana baik capaian fisik maupun capaian realisasi anggaran keseluruhannya mencapai 100%.
 - e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan sangat baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal yang memerlukan pembenahan, perhatian dan penanganan untuk diselesaikan. Permasalahan tersebut tidak lain disebabkan oleh berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sumber daya dan dana. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja diantaranya melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;

Akhirnya pemerintah dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Polewali Mandar berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai wujud penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi demi pengembangan daerah khususnya Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Sehingga LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

Semoga ALLAH Subhanahuwata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya serta menjaga agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali Mandar, Maret 2022





LAMPIRAN I

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA KUNCI

KELUARAN / OUTPUT

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (IKK HASIL / OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (IKK HASIL / OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	252	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	12.766	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.766	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	851	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			5	Jumlah pendidik pada PAUD	851	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	493	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	177	Seksi Paud Bidang Dikmas	Data Terlampir

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan,	8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	418	Bidang Dikjar	Data Terlampir
	9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Suket Terlampir.
	10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Suket Terlampir.
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16.696	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.266	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	860	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.978	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.318	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	332	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir

- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	86	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	332	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	86	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	952	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	542	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	315	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	347	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	367	Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Data Terlampir

		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	35	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	890	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	890	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	506	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	506	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	98	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	268	Bidang Dikmas	Data Terlampir
			34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17	Bidang Dikmas	Data Terlampir
2	KESEHATAN	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan	RSUD Polewali Mandar
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan	RSUD Polewali Mandar
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan ibu hamil	40.500	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.661	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	27.247	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.661	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.889	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.661	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan balita sesuai standar	154.109	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	336	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111.764	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	296	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	139	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	276	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	21.934	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	356	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	276	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	343.477	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	276	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	60	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

			22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	276	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	47.729	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
			24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	92	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	9.847	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
			26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten dan	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	70,59 Ha	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	6.700 meter	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	5,38 Ha	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	3.964 meter	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
		- Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh					

infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	68 %	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
	9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	78 %	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
	10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	54 %	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Terlampir
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	11	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada, 1 Dokumen	Balitbangren	Perbup No.40 Tahun 2013
	12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada, 1 Dokumen	Balitbangren	Perbup No.28 Tahun 2018
	13	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1	PDAM Wai Tupalayo	Data Terlampir
	14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	1. PDAM Wai Tupalayo 2. DPMPTSP	
	15	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	1. Dinas PUPR 2. Bag. Tapem Setda	Data Terlampir
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	IPAL Komunal (TangkiSpatik) 5-10KK (42SR)	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Septictank

17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<ul style="list-style-type: none"> • IPAL Skala Permukiman 25KK = 14 Desa Sasaran (350 SR) • IPAL Kombinasi MCK Skala Permukiman 25KK = 4 Desa Sasaran (100SR) • IPAL Skala Permukiman 50KK = 4 Desa Sasaran (200SR) 	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	IPAL KOMUNAL
18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	692 SR	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Saptic Tank dan IPAL Komunal (Dokumen Terlampir)
19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	IPLT Belum Berfungsi
20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	IPLT Belum Berfungsi
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	557 SR		Data Terlampir
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	80%		Data Terlampir
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	-	-	-
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	-	-	-
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	80%	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Berfungsi dengan baik

		26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	-	-
		27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-	-	-
		28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Berfungsi dengan baik
		29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	-	-
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	267 Bangunan	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Terlampir
		31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	279 Rekomendasi	Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR	Data Terlampir
		32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada (Perda Kab. Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2011)	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Terlampir
		33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak ada	-	Karena Belum adanya Regulasi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
		34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Kantor Lurah : 23 Kantor Camat : 16 OPD : 28	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Dokumen Pendukung (Aset Pemda) Terlampir
		35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Belum ada		Belum di bahas
		36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	9 Bangunan Gedung terbangun	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
		37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	9 Bangunan Gedung dipelihara/dirawat	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	874,766 Km	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir

39	Panjang jalan yang dibangun	-		Tidak ada jalan yang terbangun
40	Panjang jembatan yang dibangun	19 m	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	19,82 Km	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
42	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35 m	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
43	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	-		Tidak ada jalan yang rekonstruksi
44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	12 m	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
45	Panjang jalan yang dipelihara	25,030 Km	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Dokumen pendukung terlampir
46	Panjang jembatan yang dipelihara	-		Tidak ada jembatan yang dipelihara
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Belum pernah melakukan pelatihan tersebut
	48	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	442 orang	Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar - Tahun 2019 sebanyak 314 orang - Tahun 2021 sebanyak 128 orang
	49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Yang tersertifikasi ahli belum ada karena Cuma pada grade C pelatihan sertifikasi, belum pada tahap ahli

50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Belum ada		Masih pada pendahuluan pelatihan SIPJAKI, belum ada operator langsung SIPJAKI yang di SK-kan
51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Belum ada		Karena SIPJAKI belum berjalan
52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Belum ada		Karena SIPJAKI belum berjalan
53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Belum ada		Karena SIPJAKI belum berjalan
54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Belum ada		
55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Belum ada		Masih tahap pembenahan terutama profil yang di SIPJAKI

56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Belum ada		Karena yang dilakukan 3 tahun terakhir adalah tenaga terampil konstruksi di sebabkan kurangnya dana pagu anggaran yang dibarikan ke jasa konstruksi
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Belum ada		Pelatihan masih pada tahap tenaga terampi lkonstruksi
58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Belum ada		Pelatihan masih pada tahap tenaga terampil konstruksi
59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	182 perusahaan	Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 sebanyak 40 perusahaan - Tahun 2018 sebanyak 34 perusahaan - Tahun 2019 sebanyak 58 perusahaan - Tahun 2020 sebanyak 48 perusahaan - Tahun 2021 sebanyak 2 perusahaan
60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Belum ada		

61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada		Semuanya sesuai setelah diverifikasi berkas masuk untuk pembuatan rekomendasi
62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada		Belum pernah diadakan karena dana anggaran yang minim lebih di alokasikan kepelatihan tenaga terampil
63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada		Belum pernah dilakukan
64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	182 perusahaan	Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR dan DPMPTSP	
65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			
66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Belum ada data		Belum pernah dilakukan
67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	182 Perusahaan		Data Terlampir
68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	182 Perusahaan		Data Terlampir

			69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada data		Masih pada tahap pengenalan aplikasi dan penggunaan data SIPJAKI
			70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada data		Masih pada tahap pengenalan aplikasi dan penggunaan data SIPJAKI
			71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada data		Masih pada tahap pengenalan aplikasi dan penggunaan data SIPJAKI
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	134 Rumah	BPBD dan Disrumkimtan	Data Terlampir
			3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	134 KK	BPBD dan Disrumkimtan	Data Terlampir
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	134 Rumah	BPBD dan Disrumkimtan	Data Terlampir
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir

		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	134 KK	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir	
		15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	5,784 Ha	Bidang Pertanahan	Data Terlampir	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10	16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	28,8 Ha	Bidang Permukiman	Data Terlampir

ha di kabupaten/kota yang ditangani	17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	399	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
	18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14,1 Ha	Bidang Permukiman Disrumkimtan	Data Terlampir
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	19	Jumlah rumah di kab/kota	101.058	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
	20	Jumlah unit PK RTLH	399	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
	21	Jumlah rumah tidak layak huni	18.680	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
	22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
	23	Rasio rumah dan KK	97,8 %	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
	24	Jumlah rumah pembangunan baru	0	Bidang Perumahan Disrumkimtan	
	25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	975	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
	27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
	28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
	29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak Tersedia	Bidang Perumahan	Seluruh Perumahan terfasilitasi RTH
	30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir

			31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
			32	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
			33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Tersedia	Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	32	Bidang Trantibum	Data Terlampir
			2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	30	Bidang Linmas Satpol PP	Data Terlampir
			3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 Perda	Bidang Penegakan Peraturan PerUUan Satpol PP	Data Terlampir
			4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 Orang	Bidang Sumber Daya Aparatur	Data Terlampir
			5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Bidang Sumber Daya Aparatur	Data Terlampir
			6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Bidang Trantibum	Data Terlampir
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % / 1 Dokumen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan / dilaksanakan oleh BNPB Pusat	Data terlampir
			8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	83.944	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Berupa Papan Informasi Rawan Bencana di 17 Kelurahan / Desa dan Kegiatan KIE
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100% / 1 Dokumen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data terlampir

	terhadap bencana	10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100% / 1 Dokumen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data terlampir	
		11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	30 orang	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data terlampir	
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	30 orang	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data terlampir	
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	Peralatan untuk pelayanan pusdalops sudah ada, tinggal menunggu tim teknis dari BNPB melakukan pemasangan, sehingga dapat beroperasi tahun 2022. Suket Terlampir.	
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak ada. Suket Terlampir.	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Data terlampir
			16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Data terlampir
			17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Data terlampir

		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Data terlampir
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	50 Kegiatan	UPTD Damkar	Data terlampir
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3 Pos Damkar	UPTD Damkar	Data terlampir
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia	Satpol PP	Data terlampir
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak Ada	Satpol PP dan UPTD Damkar	Data terlampir
		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Armada Mobil Kebakaran 6 Unit 2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 11 Unit 3. Alcon Pengisapan Air 3 Unit 4. Alat Pemadam Portable 6 Unit 5. Selang Air 9 Unit 6. Nozzel 8 Unit 7. Baju Anti Panas 6 Unit 8. Sepatu Anti Panas 6 Unit 9. Helm Anti Panas 6 Unit 10. Baju Anti Api 8 set 	UPTD Damkar	Data terlampir

				11. Handy Tolky 9 Unit 12. Set Tabung Oksigen 2 Set 13. Masker O2 / Asap 4 buah			
			24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	83	UPTD Damkar	Data terlampir
			25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak Ada	Satpol PP dan UPTD Damkar	Surat Keterangan Terlampir
			26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada	Satpol PP dan UPTD Damkar	Tidak ada pelatihan terhadap aparatur pemadam pada tahun 2020 akibat dari refofusing anggaran dikarenakan pandemi covid19. Suket terlampir.
6	SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 unit	Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial/Pemberdayaan Sosial	Data terlampir
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	371 orang	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Anak dan Lansia	Data terlampir

3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	26 orang	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Data terlampir
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2 orang Lansia Terlantar	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Data terlampir
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 unit	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Data terlampir
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	40 anak	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Data terlampir
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Di tahun 2020 belum dianggarkan rumah singgah sheelter. Surat Keterangan terlampir.
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Pagu anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas pelayanan bagi PMKS dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19. Surat Keterangan Terlampir

9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	27 orang	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Data terlampir
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	-	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Belum ada rumah singgah/ shelter. Surat Keterangan Terlampir
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Belum ada rumah singgah/ shelter. Surat Keterangan Terlampir
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Belum ada rumah singgah/ shelter. Surat Keterangan Terlampir
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Belum ada rumah singgah/ shelter. Surat Keterangan Terlampir
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	231 personil	Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial / Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Data terlampir

15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	55 orang	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Data terlampir
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Tidak ada kegiatan, dikarenakan akan menimbulkan kerumunan (melanggar protokol kesehatan). Surat Keterangan Terlampir
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Belum ada kegiatan fasilitasi layanan kependudukan. Surat Keterangan Terlampir
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Tidak terlaksana. Surat Keterangan Terlampir
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Tidak terlaksana. Surat Keterangan Terlampir

	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	Tidak terlaksana. Surat Keterangan Terlampir
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	1 orang	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial / Rehabilitasi Tuna Sosial Disabilitas dan Panti	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	22	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	130 paket	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	
	23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	130 paket	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	
	24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	di tahun 2020 tidak ada bencana skala besar yang terjadi. Surat Keterangan Terlampir
	25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	90 paket	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	
	26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Perlindungan Sosial	Surat Keterangan Terlampir

			27	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	231 personil	Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial / Kelembagaan Sosial / Kelembagaan	Data terlampir
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Tidak ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Tidak ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Tidak ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Tidak ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	5		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	7 orang	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
	6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$7 / 317 = 0,022$	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
	7		Persentase LPK yang terakreditasi	$1 / 7 \times 100\% = 14,28$	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
	8		Persentase LPK yang memiliki perizinan	7 LPK	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
	9		Jumlah penganggur yang dilatih	317 orang	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
	10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	200 lulusan	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
	11		Persentase penyerapan lulusan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
	12		Lulusan bersertifikat kompetensi	40 lulusan	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
	13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	

		14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
		16	Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
18		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
19		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
20		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
21		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	161 perusahaan	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir	
22		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
23		Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
24		Jumlah penutupan perusahaan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
25		Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	
26		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir	

	27	Jumlah perselisihan PHK	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		Bidang Tenaga Kerja	
	33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	684	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir
	34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	1 BKK	Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir
	35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
	40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir

			41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			42	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			43	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
			45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak Ada	Bidang Tenaga Kerja	Suket Terlampir
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	29 OPD	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	13 OPD	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Media Massa	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$42 / 142.840 \times 100\% = 0,029 \%$	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir

			7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	6 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	5 Kader Lentera dan 2 Kader P2TP2A	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	11 kebijakan	Seksi PP Bidang PPPA	Karena ada beberapa permasalahan di lapangan yang belum terselesaikan. Suket Terlampir
			13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
			14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$32 / 183.879 = 0,00017\%$	Seksi PP Bidang PPPA	Data terlampir
9	PANGAN		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada, 7 unit	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan
		2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data terlampir

			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Masih terdapat beberapa permasalahan harga di lapangan yang belum terselesaikan. Surat Keterangan Terlampir
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada, 10 Kelompok	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data terlampir
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data terlampir
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	6 Desa	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data terlampir
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Alokasi anggaran untuk cadangan pangan tahun 2021 tidak ada. Surat Keterangan Terlampir.
			8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	6 kegiatan pengawasan	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data terlampir
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1 Izin Lokasi	Bidang Pertanahan dan DPMPTSP	Data terlampir
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak Ada	Bidang Pertanahan	Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> diterbitkan oleh BPN. Surat Keterangan Terlampir

			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Tidak Ada	Bidang Pertanahan	Surat Keterangan Terlampir
			4	Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada	Bidang Pertanahan	Tidak ada program kegiatan tahun 2021. Surat Keterangan Terlampir
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Bidang Pertanahan	Tidak ada program kegiatan tahun 2021. Surat Keterangan Terlampir
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap :			
				a. Indeks kualitas air (IKA)	52,58	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK	IKLH Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 = 65,36
				b. Indeks Kualitas Udara (IKD)	88,56		
				c. Indeks tutupan hutan (ITH)	44,41		
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia, - Total volume sampah yang dapat ditangani = 14.140 Ton. - Total volume timbulan sampah Ibukota Kabupaten Polewali Mandar = 64.616 Ton - Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten = 21,88%	Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	13 izin / rekomendasi	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	dari 29 usulan permohonan, 29 izin rekomendasi yang telah diterbitkan (100%)
4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Surat Keterangan Terlampir
5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tidak Ada	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Surat Keterangan Terlampir
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak Ada	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Surat Keterangan Terlampir
7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak ada	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Surat Keterangan Terlampir

			8	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Ada, 13 usaha kegiatan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Data Terlampir
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP elektronik	1	Penerbitan akta perkawinan	39	Bidang PIAK Disdukcapil	Data Terlampir
			2	Penerbitan akta perceraian	3	Bidang PIAK Disdukcapil	Data Terlampir
			3	Penerbitan akta kematian	1.442	Bidang PIAK Disdukcapil	Data Terlampir
			4	Penyajian data kependudukan	12 Laporan	Bidang PIAK Disdukcapil	Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Persentase pengentasan desa tertinggal dan - Persentase peningkatan status desa mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		Surat Keterangan Terlampir
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		Surat Keterangan Terlampir
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 posyandu 1 PKK	Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	Data Terlampir

			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		Surat Keterangan Terlampir	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perda-kan	Tidak Ada	Bidang Pengendalian Penduduk	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran tidak mencukupi. Suket Terlampir	
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	16,14	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir	
			3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	69,07 % (39.934 jiwa)	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir	
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	66,93 %	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir	
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	12	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 % (25 fasilitas kesehatan)	Bidang Pengendalian Penduduk	Seluruh Faskes yang ada di Polewali Mandar
		7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,08 %	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir		
		8	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 (pokja kampung KB)	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir		

			9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	12,90 %	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,30%	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir
			11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	78,75%	Bidang Pengendalian Penduduk	Data Terlampir
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	53%	Data Fasilitas Terminal Tipe C Wonomulyo Tahun 2020	Data Terlampir
			2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	78,40%	Data Wajib Uji dan data kendaraan uji tahun 2020	Data Terlampir
			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0%	Data jumlah lintas penyeberangan dan penetapan tarif	Ada 11 jumlah lintas penyeberangan, namun belum ada jumlah penetapan tarif lintas
			Kinerja lalu lintas Kabupaten	4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	41,05%	Data Perlengkapan jalan Kabupaten tahun 2021
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah / jumlah OPD x 100 % 39 / 44 x 100 = 88,63 %	Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir

		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah / jumlah OPD x 100 % 39 / 44 x 100 = 88,63 %	Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	9	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP	Data Terlampir
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Event PD via daring / Event PD via daring dan luring x 100% 4 / 4 x 100% = 100 %	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP	Data Terlampir
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah OPD yg memiliki portal dan situs web sesuai standar / jumlah total OPD x 100% 44 / 44 x 100% = 100 %	Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik Diskominfo-SP	Data Terlampir
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah PD yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan khusus / jumlah total PD x 100% 25 / 44 x 100% = 56,81 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir

7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE yang telah diimplementasikan secara elektronik / jumlah layanan x 100% 120 / 120 x 100% = 100%	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik / jumlah layanan x 100% 4 / 120 x 100% = 3,33 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan / jumlah total sistem elektronik x 100% 69 / 69 x 100% = 100 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi secara elektronik / jumlah layanan x 100% 8 / 120 x 100% = 6,66 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data / jumlah OPD x 100% 25 / 44 x 100% = 56,81 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menyimpan data di pusat data pemerintah / jumlah OPD x 100% 25 / 44 x 100% = 56,81 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir

		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah OPD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya / jumlah OPD x 100% 28 / 44 x 100% = 63,63 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah aplikasi berbagai pakai / jumlah data yang dimiliki pemerintah x 100% 0 %	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah OPD yang mendukung Smart City / jumlah OPD x 100% 10 / 44 x 100% = 22,72 %	Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi / jumlah ASN pengelola TIK x 100% 9 / 12 x 100% = 75 %	Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia, 9 Keputusan Bupati	Seksi e-government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
		18	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah komunitas masyarakat yang menyebarluaskan informasi kebijakan pemkab / jumlah total komunitas masyarakat x 100% 16 / 55 x 100% = 29,09 %	Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir

			19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait prokeg pemkab / jumlah total konten informasi terkait prokeg pemkab x 100% 43 / 43 x 100% = 100 %	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP	Data Terlampir
			20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah layanan informasi publik / jumlah total layanan informasi publik x 100% 43 / 43 x 100% = 100 %	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP	Data Terlampir
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100 % (3 izin koperasi simpan pinjam)	DPMPTSP	Data Terlampir
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1 / 242 X 100% = 0,41 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	41 / 242 x 100% = 16,94 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36 / 242 x 100% = 14,88 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$12 / 242 \times 100\% =$ 4,96 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,96 % (12 orang)	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Belum pernah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Surat Keterangan Terlampir.
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Surat Keterangan Terlampir
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$4 / 242 \times 100\%$ = 1,65 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Surat Keterangan Terlampir
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$1 / 242 \times 100\%$ = 0,41 %	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$5 / 242 \times 100\% = 2,07\%$	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM	Surat Keterangan Terlampir
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,78 %	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)	0	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Aplikasi ODS UKM baru akan diterapkan tahun 2023. Suket Terlampir
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$10 / 75.268 \times 100\% = 0,01\%$	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$70 / 75.268 \times 100\% = 0,09\%$	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$75 / 75.268 \times 100\% = 0,099\%$	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$12 / 75.268 \times 100\% = 0,015\%$	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$10 / 75.268 \times 100\% = 0,01\%$	Bidang UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	-	Kegiatan pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota tidak ada di DPA DPMPTSP Tahun Anggaran 2021.
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tidak Ada	-	
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	-	
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3 Kegiatan sosialisasi	Bidang penanaman modal dan bidang peninjauan dan penetapan sektor B	Data Terlampir
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	Bidang Penanaman Modal	Rencana tahun 2021 sesuai target mengikuti kegiatan pameran sebanyak 1 kali, namun karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan pameran tidak terlaksana dan tidak diikuti.
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	-	-

			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Tersedia 3 Aplikasi	Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non perizinan	1. Aplikasi Masiga, 2. Aplikasi OSS, 3. Aplikasi Si Cantik Cloud
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40	Bidang Pemuda Dispop	Data Terlampir
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Bidang Pemuda Dispop dan Disperindagkop	Data Terlampir
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	175	Bidang Pemuda Dispop	40 orang pelatihan kader, 40 orang pengembangan kepemimpinan, 45 orang kepedulian kesukarelawan, 50 orang kepeloporan pemuda
			4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	65	Bidang Pemuda Dispop	KNPI sebagai mitra yang melaksanakan kegiatan
			Peningkatan prestasi olahraga	5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	378	Polman Satu Data (polmankab.go.id)
		6		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 cabor	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Bidang Olahraga Dispop	Cabang Olahraga Volly, Takraw dan Sepakbola
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Seksi Kemitraan dan Penyajian Data Statistik Diskominfo-SP	Data Terlampir
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	66 Elemen Data	Seksi Pengolahan Data Sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir

			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	38 Elemen Data	Seksi Pengolahan Data Sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	Surat Keterangan Terlampir
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	Surat Keterangan Terlampir
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Tidak Ada	Masih proses pembahasan	Surat Keterangan Terlampir
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Tidak Ada	Masih proses pembahasan	Surat Keterangan Terlampir
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	Surat Keterangan Terlampir
			2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Tidak Ada	Belum dilaksanakan	

22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	100 %	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Data Terlampir
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	100 %	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Data Terlampir
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	100 %	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Data Terlampir
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	100 %	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Data Terlampir
			5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	27 %	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Data Terlampir
			6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
			7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.

8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Suket Terlampir.
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.

14	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.

			19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak Ada	Bidang Kebudayaan Disidikbud	Belum dilaksanakan karena alokasi anggaran belum tersedia. Surat Keterangan Terlampir.
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,049	Bidang Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Rekap Jumlah Koleksi Buku s/d 2021
			2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,003	Bidang Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Rekap Kunjungan Perpustakaan Tahun 2021
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan / jumlah penduduk $307 / 483.920 =$ 0,00063	Bidang Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Data Terlampir
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	Bidang Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Belum adanya sertipikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI yang memenuhi standar Nasional. Surat Keterangan Terlampir
			5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1.885	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Data Rekap Perpustakaan Keliling Tahun 2020 s/d 2021

		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Bidang Kebudayaan Gemar MembacaTingkat Daerah Kab/Kota	Surat Keterangan Terlampir	
			7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Bidang Kebudayaan Gemar MembacaTingkat Daerah Kab/Kota	Surat Keterangan Terlampir	
			8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	389	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Perhitungan Manual jumlah koleksi budaya etnis	
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Data Arsip aktif s/d tahun 2021	
			2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Data Arsip In-aktif s/d tahun 2021	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum ada temu balik arsip statis yang mengacu pada pasal 97 PP 28 tahun 2012	
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100 %	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum ada aplikasi SIKN / JIKN	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum pernah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai NSPK
		6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum ada NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana	

			7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	1	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Fotocopy sejarah pembentukan Kabupaten Polewali Mandar
			8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik
			9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum mempunyai pedoman pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)
			10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Bidang Pengelola Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Belum ada NSPK perizinan tertutup tentang pedoman akses dan layanan arsip statis
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0		Kegiatan Belum Terlaksana. Surat Keterangan Terlampir
			2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	1 Unit	Bidang Perikanan Tangkap DKP	Foto UPTD TPI terlampir
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0		Kegiatan Belum Terlaksana. Surat Keterangan Terlampir

			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	30 Orang	Bagian Kelembagaan dan Penyuluhan	
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ikan Nila = 268.700 Ekor Ikan Mas = 9.550 Ekor	UPTD BBI	
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	16	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Data Terlampir
			2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Pembangunan Ruang ganti/Toilet
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	88	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Data Terlampir
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Pandemi Covid-19
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	12	Bidang Promosi Wisata Dispop	Data Terlampir
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	0	Bidang Promosi Wisata Dispop	
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	11 pelaku event	Bidang Promosi Wisata Dispop	Data dukung terlampir
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	22 orang	Bidang Promosi Wisata Dispop	Data dukung terlampir
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	30 orang	Bidang Promosi Wisata Dispop	Kegiatan Famtrip

			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Data dukung terlampir
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Sarana pertanian yang diberikan	146 unit	Bidang PSP dan Tanaman Pangan Distanpan	Data Terlampir
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	48 unit	Bidang PSP dan Tanaman Pangan Distanpan	Data Terlampir
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	67 Rekomendasi	Sekretariat Distanpan	Data Terlampir
			4	Persentase prasarana yang digunakan	100%	Bidang PSP Distanpan	48 paket prasarana aktif digunakan. Data Terlampir
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	95,71%	Sekretariat Distanpan	70 usulan izin usaha, 67 rekomendasi. Data Terlampir
			6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Distanpan	40 bencana, 40 ditindaklanjuti
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

28	KEHUTANAN		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak ada	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK	Alokasi anggaran belum ada. Surat Keterangan Terlampir
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak ada	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK	Alokasi anggaran belum ada. Surat Keterangan Terlampir
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak ada	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK	Alokasi anggaran belum ada. Surat Keterangan Terlampir
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak ada	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK	Alokasi anggaran belum ada. Surat Keterangan Terlampir
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak Ada	Bidang Perencanaan Fasilitas Pertanahan dan ESDM	Tidak ada program kegiatan ESDM terkait panas bumi. Surat Keterangan Terlampir
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		DPMPTSP dan Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir
				a. Pusat perbelanjaan	Tidak ada IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan diterbitkan selama 2021		
				b. Toko swalayan	58,33 %		
			2	Persentase penerbitan TDG	37,50 %		Data terlampir

	3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Tidak Ada	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Belum memiliki data komprehensif terkait jumlah gudang.
	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	Tidak Ada	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Belum pernah menerbitkan STPW selama tahun 2021.
	5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tidak Ada	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data tidak tersedia.
	6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Tidak Ada	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Belum pernah menerbitkan SPKA selama tahun 2021.
	7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	30,30 %	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir
	8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,37 %	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir
Persentase kinerja realisasi pupuk	9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	14.885,25 Ton	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	99,20 %	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir

			11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	99,06 %	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data terlampir
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IUKI dan IPKI karena belum ada kawasan industri.
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	-	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Belum ada RPIK yang ditetapkan.
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	-	Bidang Perindustrian dan Bidang Perizinan DPMPTSP	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IPUI karena belum ada kawasan industri.

		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota.	-	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Belum ada sosialisasi dari provinsi terkait SII Nas
32	TRANSMIGRASI		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1 Kawasan (Kawasan Tubbi Taramanu)	Bidang Perencanaan Fasilitas Pertanian dan ESDM. Disnakertrans dan ESDM	
			2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3 Satuan Permukiman (SP Patambanua, SP Pirian Tapiko dan SP Ratte)		
			3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 Satuan Permukiman (SP Pirian Tapiko dan SP Ratte)		



LAMPIRAN II

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA KUNCI

HASIL / OUTCOME

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{15.914}{26.987} \times 100\%$	58,969 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud : 12.766 Kemenag : 3.148 Data Terlampir
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{52.516}{55.598} \times 100\%$	94,457 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud : 43.528 Kemenag : 8.988 Data Terlampir
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{25.313}{25.849} \times 100\%$	97,926 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud : 16.696 Kemenag : 8.617 Data Terlampir
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{890}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	1,138 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Data Terlampir

			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	78.206			
2	KESEHATAN	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk ----- x 100% Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	482 ----- x100% 486.339	0,099 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di kabupaten/kota	1 ----- x100% 1	100 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ----- x 100% Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	7.632 ----- x100% 9.274	82,295 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	8.239 ----- x100% 8.851	93,086 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	8.267 ----- x100% 8.323	99,327 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di kabupaten/kota	35.781 ----- x100% 56.277	63,580 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	52.922 ----- x100% 60.294	87,773 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	86.401 ----- x100% 301.074	28,698 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	15.152 ----- x100% 35.176	43,075 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	23.173 ----- x100% 24.964	92,826 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	5.633 ----- x100% 6.664	84,529 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	663 ----- x100% 957	69,279 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	3.505 ----- x100% 8.176	42,869 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	4.434 ----- x100% 11.546	38,403 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	28,91 ----- x100% 70,59	40,955 %	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0 ----- x100% 5,38	0 %	Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir

		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	3.960 ----- x100% 4.898	80,849 %	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	87.663 ----- x100% 104.084	84,223 %	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten	96.318 ----- x100% 104.084	92,539 %	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	279 ----- x100% 279	100 %	Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100% Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	643.035 ----- x100% 874.766	73,509 %	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir

		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	0 ----- x100% 1	0 %	Bidang Bina Konstruksi dan Balai Bina Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	442 peserta dari tahun 2019-2021 Surat Keterangan Terlampir
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 ----- x100% 1	0 %	Dinas PUPR	Belum ada data karena minimnya dana sehingga kegiatan belum terlaksana. Surat Keterangan Terlampir
4	PERUMAHAN RAKYAT	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	134 ----- x100% 134	100 %	Bidang Perumahan Disrumkimtan dan BPBD	Data Terlampir
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0 ----- x100% 1	0 %	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Belum ada program dan kegiatan. Surat Keterangan Terlampir
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	28,7 ----- x100% 57,6	49,826 %	Bidang Permukiman Disrumkimtan	2019 : 12,5 2020 : 2,2 2021 : 14,0 Total yang tertangani : 28,7 Data Terlampir

		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	18.680 ----- x100% 101.058	18,484 %	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah unit rumah kab/kota	975 ----- x100% 4.763	20,47 %	Bidang Perumahan	Data Terlampir
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	32 ----- x100% 32	100 %	Satpol PP	Data Terlampir
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	57 ----- x100% 61	93,443 %	Satpol PP	Data Terlampir
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	83.944	83.944	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Berupa Papan Informasi Rawan Bencana di 18 Kelurahan / Desa serta Sosialisasi KIE Rawan Bencana. Data terlampir
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	486.339	486.339	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Surat Himbuan yang ditujukan kepada 16 Kecamatan. Data terlampir
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	134	134	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Data terlampir

		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	22 ----- x100% 22	100 %	UPTD Pemadam Kebakaran Satpol PP	Data Terlampir
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Rata-rata waktu tanggap = 19 menit	19	SOP UPTD Pemadam Kebakaran	Menerima informasi, laporan, menuju lokasi, pemadaman, laporan setelah pemadaman (5 tahapan) = 95 menit Rata-rata = 95/5 = 19 menit. SOP / Data terlampir
6	SOSIAL	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	145 ----- x100% 409	35,452 %	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos	Jumlah jiwa yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Penyandang disabilitas = 55 Anak Terlantar = 40 Lansia = 50 Gepeng = 0

		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.747 ----- x100% 1.747	100 %	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos	Bencana Alam = 1.629 jiwa Bencana Sosial = 118 jiwa
7	TENAGA KERJA	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	2 ----- x100% 2	100 %	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Data Terlampir
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	40 ----- x100% 218.765	0,018 %	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Data Terlampir
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja	9.414,99 ----- x100% 218.765	4,304 %	Kab. Polman Dalam Angka 2021 dan Bidang Tenaga Kerja	Data Terlampir
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	161 ----- x100% 541	29,760 %	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Data Terlampir
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	53 ----- x100% 686	7,726 %	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Data Terlampir

8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<p>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh belanja langsung APBD</p>	<p>324.240.000</p> <p>----- x100%</p> <p>9.307.691.808</p>	3,484 %	Bidang PPPA	Data Terlampir
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	<p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)</p>	<p>42</p> <p>----- x100%</p> <p>142.840</p>	0,029 %	Bidang PPPA	Data Terlampir
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</p> <p>-----x100.000</p> <p>Jumlah penduduk perempuan</p>	<p>32</p> <p>-----x100.000</p> <p>183.879</p>	17.403	Bidang PPPA	Data Terlampir
9	PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	<p>Jumlah cadangan pangan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan pangan</p>	<p>13.946,12</p> <p>----- x100%</p> <p>826,48</p>	1.687,412 %	Bidang Ketahanan Pangan Distanpan	Data Terlampir
10	PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p>Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi</p>	<p>19.869,14</p> <p>----- x100%</p> <p>19.869,14</p>	100 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan dan DPMPSTP	Data Terlampir
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	<p>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p>	<p>3</p> <p>----- x100%</p> <p>3</p>	100 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Data Terlampir

		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	19.869,14 ----- x100% 19.869,14	100 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan dan DPMPTSP	Data Terlampir
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	0 ----- x100% 1	0 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0 ----- x100% 1	0 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	5 ----- x100% 5	100 %	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	5 pengaduan sengketa tanah semuanya difasilitasi / ditangani
11	LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) + (IKU 40,5%) + (ITH 21,9%) a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	(52,58 x 0,376) + (88,56 x 0,405) + (44,41 x 0,219)	65,363	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran	Metode perhitungan berdasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318 / PPKLH / SET / REN.O / 12 / 2020. Data terlampir.

		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total volume timbulan sampah Ibukota Kabupaten Polewali Mandar	6.719,10 ----- x100% 9.606,80	69,941 %	Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK	Sumber Data Jakstrada. Data terlampir
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	0 -----x100% 13	0 %	Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup DLHK	Tidak ada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP elektronik ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	302.579 ----- x100% 312.033	96,970 %	Data Agregat Dan Pelayanan	Data terlampir
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	45.279 ----- x100% 144.672	31,298 %	Data Agregat Dan Pelayanan	Data terlampir
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	161.558 ----- x100% 178.786	90,36 %	Data Agregat Dan Pelayanan	Data terlampir
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100%	4 ----- x100%	9,091 %	Bidang Pemanfaatan Data Disdukcapil	Bidang Pemanfaatan Data. OPD :

				Jumlah OPD	44			-Kec. Matakali -Kec. Anreapi -Kec. Binuang -Kec.Polewali
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	38 ----- x100% 38	100 %	Indeks Desa Membangun (IDM)	Data terlampir
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)	0 ----- x100% 94	0,00	Indeks Desa Membangun (IDM)	Data terlampir
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun) ----- Jumlah Perempuan Usia Subur (15-49 tahun)	3.808 ----- x100% 101.811	3,740 %	DP2KBP3A	Data terlampir
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	63.925 ----- x100% 78.566	81,365 %	DP2KBP3A	Data terlampir
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	5.358 ----- x100% 78.566	6,820 %	DP2KBP3A	Data terlampir

15	PERHUBUNGAN	1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kabupaten tersebut)</p> <p>- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kabupaten tersebut)</p> <p>Keterangan : IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</p>	<p>Rasio Konektivitas = $(0,53 \times 70) + (0,66 \times 30) = 37,69 + 20$</p> <p>IK1 = $(7 \times 1) / 13 = 0,53$</p> <p>IK2 = $(10 \times 0,8) / 12 = 0,66$</p>	57,69	Data jumlah trayek dan data jumlah lintas penyeberangan Kabupaten tahun 2021	Data terlampir
----	-------------	---	-----------------------------------	--	---	-------	--	----------------

- jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)

2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70))

4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1

b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8

			c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (< 3 dalam seminggu), bobot = 0.5					
		2	Kinerja lalu lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	645 / 2505,6	0,257	Dinas Perhubungan	Data Terlampir
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	39 ----- x100% 44	88,636 %	Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	8 ----- x100% 10	80 %	Seksi e-Government dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk	310.321 ----- x100% 486.236	63,821 %	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP dan Disdukcapil	Data Terlampir
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	10 ----- x100% 242	4,132 %	Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	77 ----- x100% 75.286	0,102 %	Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

18	PENANAMAN MODAL		1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota $\frac{\text{(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{2021 - 2020 = (\text{Rp.79.507.530.000} - \text{Rp.99.289.000.000}) = -19.781.470.000}{99.289.000.000} \times 100\%$		-19,923	Penyebab rendahnya Nilai Investasi adalah : - Karena masih adanya para pelaku usaha atau perusahaan yang masih belum melaporkan LKPM - Para pelaku usaha atau perusahaan ada yang melaporkan LKPM nya tidak sesuai dengan nilai investasi yang dilaporkan dengan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tim penanaman modal Bidang Penanaman Modal DPMPTSP
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{691}{129.972} \times 100\%$	0,532 %	Bidang Pemuda Dispop	Data dukung terlampir
			2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{4.642}{129.972} \times 100\%$	3,572 %	Bidang Pemuda Dispop	Data OKP = 1.477 Karang Taruna = 3.165 Total = 4.642 Data dukung terlampir

		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	0	Bidang Olahraga Dispop	Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan even olahraga diikuti dikarenakan pandemi covid-19. Suket Terlampir.
20	STATISTIK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	28 ----- x100% 44	63,636 %	Seksi pengolahan data sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	28 ----- x100% 44	63,636 %	Seksi pengolahan data sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir
21	PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	5 ----- x100% 28	17,857 %	Seksi e-government dan persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
22	KEBUDAYAAN	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	15 ----- x100% 56	26,786 %	Bidang Kebudayaan	Data Terlampir
23	PERPUSTAKAAN	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indikator Jumlah Bahan Bacaan	2.967	2.967	Bidang Budaya Gemar Membaca	1.471 + 1.496 = 2.967

		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	Perpustakaan Nasional RI belum memberikan kajian indeks pembangunan literasi masyarakat	Surat Keterangan Terlampir
24	KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ Keterangan : T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = (100 + 100 + 100 + 100) / 4$ 100% (332 box) 100% (710 box) 100% (7 box) 100% (993 Arsip)	100 %	Bidang Kearsipan	Arsip Aktif = 332 box Arsip InAktif = 710 box Arsip Statis = 7 box Arsip Dinamis = 993 Arsip
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ Keterangan : T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK	$T = (0+0+100+0+0+0) / 6$ 0% 0% 100%	16,66	Bidang Kearsipan	Ada Arsip pemekaran Daerah Kabupaten yaitu Naskah Sejarah Terbentuknya Polewali Mandar. Belum ada NSPK Pedoman layanan arsip statis karena kurangnya anggaran yang mendukung.

			<p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>l = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	0%			
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)</p> <p>- Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</p> <p>- Total Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</p>	<p>36.315,25 Ton</p> <p>26.896,20 Ton</p>	63.211,45 Ton	One Data KKP	Data Terlampir
26	PARIWISATA	1	<p>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1</p>	<p>2021 - 2020 0-0 = 0</p> <p>0 ----- x100% 0</p>	0	Bidang Promosi Wisata Dispop	<p>2021 = 0 2020 = 0 Dikarenakan pandemi covid19 jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2021 dan 2021 = 0</p>
		2	<p>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten</p> <p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1</p>	<p>147.207 ----- x100% 78.430</p>	187,692 %	Bidang Promosi Wisata Dispop	<p>2020 = 78.430 2021= 225.637 2021 – 2020 225.637 – 78.430 = 147.207</p>
		3	<p>Tingkat hunian akomodasi</p> <p>Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia</p>	<p>26.166 ----- x100% 147.240 (402 x 365 hari)</p>	17,771 %	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	<p>Total jumlah kamar 402 kamar Jumlah Kamar yang tersedia : 402 x 365 hari = 147.240</p>

		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35,49 (miliar rupiah) atau Rp. 35.490.000.000.		Kab. Polman Dalam Angka 2022	Data Terlampir
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4.224.808.681,00		Dispop dan Bapenda	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame
27	PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x 100% luas panen	280.355,30 ----- x100% 41.621,30	673,586 %	Bidang Tanaman Pangan Distanpan	Data Terlampir
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	1.023 – 785 = 238 ----- x100% 785			30,318 %
28	KEHUTANAN							
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0 ----- x100% 1	0	Bidang Perencanaan Fasilitas Pertanian dan ESDM	Tidak ada program kegiatan ESDM terkait panas bumi. Surat Keterangan Terlampir
30	PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	7 ----- x100% 12	58,333 %	DPMPSTSP Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100%	14.885,25 ----- x100%			40,390 %

			RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	36.854			
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	1.488 4.284	----- x100%	34,734 %	UPTD Meterologi Legal Data Terlampir
31	PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	2021 – 2020 6.792 – 6.702 = 90 6.702	----- x100%	1,343 %	Bidang Perindustrian IKM 2020 = 6.702 IKM 2021 = 6.792
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten ----- x 100% Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional	0 7	----- x100%	0	Bidang Perindustrian Belum ada RPIK yang ditetapkan. Surat Keterangan terlampir
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	5 5	----- x100%	100 %	Bidang Perindustrian dan Bidang Perizinan DPMPTSP Data Terlampir
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0 1	----- x100%	0	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IPIU karena belum ada kawasan industri. Surat Keterangan terlampir.

		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0	Bidang Perindustrian	Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IUKI dan IPKI karena belum ada kawasan industri. Surat Keterangan terlampir.
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	0	3	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Belum Bisa ditargetkan
				b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	0			Belum Bisa ditargetkan
				c. Informasi produksi dan kapasitas produksi	326.359.210.900			Tersedia
				d. Informasi bahan baku dan bahan penolong	0			Belum tersedia
				e. Informasi bahan bakar/ energy	0			Belum tersedia
				f. Informasi tenaga kerja	15.684			Tersedia
				g. Informasi investasi	46.084.474.000			Tersedia
32	TRANSMIGRASI							



LAMPIRAN III

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{208.887.665.469}{1.532.252.885.688} \times 100\%$	13,633 %	Bidang Anggaran BPKAD Data Terlampir
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD non migas}} \times 100\%$	$\frac{260.705.653.019,60}{13.800.700.000.000} \times 100\%$	1,889 %	Bidang Akuntansi BPKAD <i>Data Unaudited</i> Data Terlampir
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Inspektorat Data Terlampir
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Inspektorat Data Terlampir
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{(1.279.982.865.011,66 - 275.510.272.206,66)}{1.494.721.491.473,66} \times 100\%$	67,201 %	Bidang Akuntansi BPKAD. <i>Data Unaudited</i> Data Terlampir

		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Bidang Akuntansi BPKAD.	5 Tahun berturut-turut <i>Data Unaudited Data Terlampir</i>
2	PENGADAAN	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0 ----- x100% 1	0 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Belum pernah dilaksanakan. Surat Keterangan terlampir
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	129 ----- x100% 251	51,394 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Data Terlampir
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100% total belanja langsung	203.829.751.176 ----- x100% 274.674.662.082	74,208 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Data Terlampir
3	KEPEGAWAIAN	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- x 100% Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah	5.388 ----- x100% 671	802,981 %	SIM Kepegawaian BKPP Polewali Mandar	Data Terlampir
		2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100%	509 ----- x100%	17,878 %	SIM Kepegawaian BKPP Polman	Data Terlampir

			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.847				
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	58 ----- x100% 509	11,395 %	SIM Kepegawaian BKPP Polewali Mandar	Data Terlampir
4	MANAJEMEN KEUANGAN	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- x 100% total belanja APBD dikurangi satu	1.494.721.491.473,66 ----- x100% 1.547.425.280.307,56	96,59 %	Bidang Akuntansi BPKAD.	<i>Data Unaudited</i> Data Terlampir
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- x 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	260.705.653.019,60 ----- x100% 203.690.330.170,00	127,99 %	Bidang Akuntansi BPKAD.	<i>Data Unaudited</i> Data Terlampir
		3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) = Ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) = Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) = Tidak	1. Ada daftar asset tetap 2. Menggunakan Laporan belanja modal masing-masing perangkat daerah. Mengacu pada nilai dan nomor SP2D 3. Inventarisasi terakhir dilakukan pada Tahun 2016		Bidang Aset BPKAD	Data Terlampir

			4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) = Ya	4. Laporan Keuangan yang dibuat setiap tahun yaitu neraca asset				
		4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA ----- x 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	73.077.829.615,54 ----- x100% 1.520.021.546.542	4,808 %	Bidang Akuntansi BPKAD.	<i>Data Unaudited</i> Data Terlampir
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	6.464.486.324 ----- x100% 6.061.173.674	106,654 %	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Data Terlampir
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	9 ----- x100% 12	75 %	Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik	Data Terlampir